



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

PETA JALAN SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam pemberian pelayanan publik perlu adanya tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan adanya peta jalan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Bupati Cilacap Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Jalan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2023-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA JALAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023-2026.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Cilacap.
2. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah Penyelenggaraan Pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
8. Tata Kelola SPBE adalah Kerangka kerja yang memastikan terlaksanakannya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
9. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungan serta layanan SPBE yang berkualitas.
10. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
11. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.

12. Peta Jalan SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Peta Jalan SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah kesiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah
13. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.
14. Audit teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
15. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
16. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah Perangkat Daerah pemilik sistem informasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.
17. Keamanan informasi adalah proteksi informasi dalam sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.

## BAB II PETA JALAN SPBE

### Pasal 2

- (1) Peta Jalan SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Jalan SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan dan penerapan SPBE di Daerah.
- (3) Peta Jalan SPBE memuat :
  - a. Tata Kelola SPBE;
  - b. manajemen SPBE;
  - c. Layanan SPBE;
  - d. Infrastruktur SPBE;
  - e. aplikasi SPBE;
  - f. Keamanan SPBE; dan
  - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (4) Peta Jalan SPBE dilakukan revidi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan:
  - a. perubahan rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
  - b. perubahan rencana strategis Daerah; dan
  - c. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.

- (5) Review Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Tim Koordinasi SPBE.

### Pasal 3

- (1) Peta Jalan SPBE Kabupaten Cilacap disusun dalam sistematika sebagai berikut:
- a. bab I pendahuluan;
  - b. bab II visi, misi, tujuan dan sasaran;
  - c. bab III arahan kebijakan dan strategi;
  - d. bab IV evaluasi dan penilaian SPBE;
  - e. bab V kondisi aktual SPBE Daerah;
  - f. bab VI visi dan misi rencana pembangunan Daerah;
  - g. bab VII target pengembangan SPBE Daerah;
  - h. bab VIII analisis kesenjangan;
  - i. bab IX Peta Jalan SPBE Daerah;
  - j. bab X detail rencana proyek implementasi; dan
  - k. bab XI penutup.
- (2) Penjabaran lebih lanjut sistematika Peta Jalan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PENUTUP

### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 4 Oktober 2024

Pj. BUPATI CILACAP,

Cap&ttd

MOHAMAD ARIEF IRWANTO

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 4 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

Cap&ttd

JAROT PRASOJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024 NOMOR 35

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 35 TAHUN 2024  
TENTANG  
PETA JALAN SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN  
2023-2026

PETA JALAN SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023-2026

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah daerah sudah menampakkan keniscayaan. Disebutkan dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. E-Government adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan informasi dan komunikasi.

Salah satu evaluasi penerapan *e-Government* di pemerintahan daerah adalah belum terwujudnya sistem yang saling terintegrasi. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan transformasi dari era *e-Government* menuju *i-Government (integrated Government)*. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara terintegrasi. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Peraturan Presiden Nomor 95 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi payung hukum adanya Tata Kelola Pemerintahan yang berbasis elektronik. Inti dari Peraturan Presiden ini adalah kematangan pemanfaatan elektronik. Inti dari Peraturan Presiden ini adalah kematangan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di pemerintahan hingga level integrasi, dimana integrasi dimulai dari antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga antar pemerintah daerah dan ke pemerintah pusat. Peran teknologi informasi saat ini sudah termasuk sebagai motor penggerak dalam proses pembangunan daerah, sehingga diperlukan Perencanaan

Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selaras dengan Perencanaan Pembangunan, dimana peran TIK akan sangat optimal dalam ikut serta menjalankan laju pembangunan daerah.

Penyusunan peta jalan SPBE Kabupaten Cilacap ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan arahan bagi Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dokumen peta jalan SPBE diharapkan dapat mengurangi resiko kegagalan proyek akibat pencapaian sasaran yang kurang terarah, memberikan kendali pengembangan SPBE sehingga solusi parsial yang tidak sinergis dapat dihindari, memberikan solusi dalam pengintegrasian sistem sehingga duplikasi kerja, duplikasi data, dan ketidaktepatan data dapat dihindari.

## 1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
14. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia;
15. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;
16. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
17. Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
18. Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

19. Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan peta jalan SPBE Kabupaten Cilacap adalah untuk memberikan landasan berpikir, standarisasi, pentahapan, dan implementasi bagi pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Cilacap yang komprehensif, efisien, efektif, dan terpadu dalam bentuk :

1. Kerangka Pemikiran Dasar (SPBE *Framework*);
2. Solusi Pentahapan Pengembangan (SPBE *Roadmap*);
3. Rencana proyek implementasi 5 tahun (SPBE *Implementation Plan*).

#### 1.3.2 Tujuan

Tujuan dari peta jalan SPBE Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya arah kebijakan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Cilacap yang sesuai dengan visi dan misi Bupati Cilacap;
2. Tersedianya acuan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang teknologi, informasi dan komunikasi;
3. Tersedianya acuan dalam pengembangan infrastruktur SPBE Kabupaten Cilacap;
4. Tersedianya acuan dalam pengelolaan dan pengembangan perangkat lunak yang mendukung layanan SPBE;
5. Tersedianya acuan dalam standar pengamanan layanan SPBE.

### 1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 BAB I : PENDAHULUAN

1.4.2 BAB II : VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN SPBE

Bab ini menjelaskan visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE serta arah kebijakan dan strategi SPBE.

1.4.3 BAB III : ARAHAN KEBIJAKANDAN STRATEGI SPBE DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang arah kebijakan & strategi SPBE Kabupaten Cilacap yang terdiri dari kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE

1.4.4 BAB IV : EVALUASI DAN PENILAIAN SPBE

Bab ini memberikan penjelasan evaluasi dan penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai ketentuan Permen PANRB No 59 Tahun 2020 tentang penilaian dan evaluasi SPBE.

- 1.4.5 BAB V : KONDISI AKTUAL SPBE DAERAH  
Bab ini menggambarkan kondisi aktual penerapan SPBE Kabupaten Cilacap sesuai hasil evaluasi SPBE Tahun 2022
- 1.4.6 BAB VI : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAHJANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN CILACAP  
Bab ini menjelaskan visi, misi, tujuan, dan sasaran Pembangunan menengah Kabupaten Cilacap.
- 1.4.7 BAB VII : TARGET PENGEMBANGAN SPBE DAERAH  
Bab ini memberikan penjelasan tentang target index SPBE dan target kuantitatif yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap
- 1.4.8 BAB VIII : ANALISIS KESENJANGAN  
Bab ini memberikan analisis kesenjangan dari setiap domain dan aspek SPBE berdasarkan kondisi aktual dan target pengembangan SPBE Kabupaten Cilacap.
- 1.4.9 BAB IX : PETA JALAN SPBE DAERAH  
Bab ini memberikan penjelasan tentang rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh Pemkab Cilacap dari Tahun 2023 – 2026
- 1.4.10 BAB X : DETAIL RENCANA PROYEK IMPLEMENTASI  
Bab ini memberikan penjelasan tentang inisiatif program untuk implementasi SPBE di Kabupaten Cilacap
- 1.4.11 BAB XI : PENUTUP

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara terintegrasi. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

#### 2.1 Visi SPBE

Visi SPBE menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Instansi Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk menghasilkan Birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

Visi SPBE Kabupaten Cilacap selaras dengan Visi SPBE Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, yaitu:

*“Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi”*

#### 2.2 Misi SPBE

Misi SPBE merupakan upaya umum tentang bagaimana cara mewujudkan Visi SPBE. Misi SPBE Kabupaten Cilacap dirumuskan sebagai berikut:

1. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
2. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
3. Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; dan
4. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

#### 2.3 Tujuan SPBE

Berdasarkan visi dan misi SPBE, tujuan SPBE Kabupaten Cilacap adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya;
3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

#### 2.4 Sasaran SPBE

Berdasarkan visi dan misi SPBE, sasaran SPBE Kabupaten Cilacap adalah:

1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
2. Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
3. Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi;
4. Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE.

## BAB III ARAHAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI SPBE DAERAH

Mengingat visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE, maka arah kebijakan dan strategi SPBE meliputi :

1. Kebijakan SPBE;
2. Tata Kelola SPBE;
3. Manajemen SPBE;
4. Layanan SPBE;
5. Aplikasi SPBE;
6. Keamanan SPBE; dan
7. Audit TIK.

### 3.1 Kebijakan SPBE

Dasar arah kebijakan strategi SPBE Kabupaten Cilacap adalah mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran SPBE yang semua tertera dalam Perpres No. 95 tahun 2018, ditambahkan dengan langkah percepatan transformasi digital dari Presiden Joko Widodo serta RPD Pemerintah Kabupaten Cilacap 2023-2026 yang merupakan penjabaran Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan Keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD, RTRW dan memperhatikan RPJMD Provinsi serta RPJMN. Kebijakan SPBE yang menyeluruh diarahkan untuk melibatkan semua pemangku kepentingan di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan makro, kebijakan meso, dan kebijakan mikro SPBE. Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE hendaknya berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Daerah sehingga menciptakan kebijakan SPBE yang terpadu.

Strategi untuk mencapai penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu adalah:

1. Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dan masyarakat di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE;
2. Melakukan harmonisasi kebijakan Tim Koordinasi SPBE;
3. Melakukan evaluasi penerapan kebijakan SPBE.

### 3.2 Tata Kelola SPBE

Tata Kelola SPBE merupakan kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu, yang terdiri dari 3 aspek yaitu Aspek Perencanaan Strategis SPBE, Aspek Teknologi Informasi & Aspek Penyelenggaraan SPBE.

#### 3.2.1 Aspek Perencanaan Strategis SPBE

Aspek perencanaan SPBE terdiri Arsitektur SPBE, peta jalan SPBE, Keterpaduan rencana dan anggaran SPBE serta inovasi proses bisnis SPBE. Pembuatan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Cilacap merupakan Kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Arsitektur SPBE terdiri dari :

- a. Arsitektur Proses bisnis;
- b. Arsitektur Layanan;
- c. Arsitektur Data;
- d. Arsitektur Aplikasi;
- e. Arsitektur Infrastruktur; dan
- f. Arsitektur Keamanan.

#### 3.2.2 Teknologi Informasi dan Komunikasi

Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri dari:

1. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE mencakup :
  - a. Pusat Data, Jaringan Intra Pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah;
  - b. Peningkatan efektivitas, efisiensi, kesinambungan, aksesibilitas, dan keamanan dalam penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan dengan cara :
    - b.1. Mandiri, yaitu pengelolaan infrastruktur SPBE yang meminimalkan ketergantungan kepada pihak-pihak non-pemerintah.
    - b.2. Terintegrasi, yaitu keterhubungan dan pemanfaatan bersama infrastruktur SPBE antar instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap.
    - b.3. Terstandarisasi, yaitu keseragaman aspek teknis dan pengoperasian infrastruktur SPBE, dan menjangkau semua instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap.

- c. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan Pusat Data Nasional dan sentralisasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
2. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas:
    - a. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.
    - b. Penyediaan data dan informasi diarahkan untuk menjaga keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan rahasia dalam rangka mewujudkan kedaulatan informasi pemerintah.
    - c. Strategi untuk mencapai penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas adalah:
      - 1) Menerapkan manajemen data yang terpadu;
      - 2) Menerapkan manajemen keamanan informasi yang terpadu; dan
      - 3) Menggunakan teknologi analitik data dan kecerdasan buatan.

### 3.2.3 Aspek Penyelenggaraan SPBE

Penyelenggaraan SPBE terdiri dari tim koordinasi SPBE & Dewan TIK. Tim koordinasi pemerintah daerah adalah pejabat dalam tim yang diberi tugas untuk mengendalikan, mengarahkan dan mengevaluasi SPBE, termasuk di dalamnya merumuskan kebijakan dan penetapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Tim koordinasi SPBE dapat disejajarkan dengan tim pengarah TIK, Komite Pengarah TIK. Tim Koordinasi SPBE pemerintah daerah dipimpin oleh seorang koordinator ditetapkan oleh pimpinan daerah. Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi Pemerintah Daerah di Kabupaten Cilacap.

Masing-masing OPD di Kabupaten Cilacap perlu melakukan upaya transformasi yang mendasar dan berkelanjutan di dalam pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE dalam rangka mewujudkan SPBE yang terpadu. Keterpaduan SPBE

ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya SPBE secara optimal dan mencegah timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran dalam pelaksanaan SPBE.

Strategi untuk mencapai penguatan kapasitas pengelolaan dan tim koordinasi untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi Pemerintah Daerah di Kabupaten Cilacap adalah :

- a) Melakukan pembentukan dan penguatan tim koordinasi SPBE;
- b) Membangun Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Cilacap;
- c) Melakukan penyederhanaan proses bisnis yang terintegrasi di dalam dan antar instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap; dan
- d) Membangun peta jalan SPBE Pemerintah Kabupaten Cilacap.

### 3.3 Manajemen SPBE

Manajemen SPBE merupakan serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas. Manajemen berarti ketersediaan panduan atau pedoman pelaksanaan dan entitas yang melaksanakannya. Perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap manajemen SPBE, dan langkah pertama yang harus ada adalah tersedianya panduan atau pedoman sebagai berikut :

- a. Manajemen Resiko
- b. Manajemen Data
- c. Manajemen Keamanan Informasi
- d. Manajemen Aset TIK
- e. Manajemen SDM
- f. Manajemen Pengetahuan
- g. Manajemen Perubahan
- h. Manajemen Layanan

### 3.4 Layanan SPBE

Keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Layanan ini adalah suatu rangkaian proses bisnis yang terintegrasi dan memiliki *single entry*. Untuk memudahkan mengaksesnya dapat diletakkan dalam sebuah Portal Layanan Terpadu. Terdapat 2 pengelompokan layanan:

1. Layanan Administrasi Pemerintahan
  - a. Layanan Perencanaan
  - b. Layanan Penganggaran
  - c. Layanan Keuangan
  - d. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
  - e. Layanan Kepegawaian
  - f. Layanan Pengarsipan
  - g. Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah
  - h. Layanan Pengawasan Pemerintah
  - i. Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
  - j. Layanan Kinerja Pegawai
  
2. Layanan Publik / Tematik
  - a. Layanan Pengaduan
  - b. Layanan Open Data
  - c. Layanan JDIH
  - d. Layanan Kesehatan
  - e. Layanan Rumah Sakit
  - f. Layanan Administrasi Kependudukan
  - g. Layanan Perizinan
  - h. Layanan Pariwisata
  - i. Layanan UMKM dan Perdagangan
  - j. Layanan Kebencanaan
  - k. Layanan Ketenagakerjaan
  - l. Layanan Perumahan dan Pemukiman
  - m. Layanan Perhubungan dan Transportasi
  - n. Layanan Sektor Pangan dan Perikanan
  - o. Layanan Sektor Kesejahteraan Sosial

### 3.5 Aplikasi SPBE

Aplikasi SPBE digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan SPBE yang terdiri dari Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus. Aplikasi umum adalah aplikasi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang aparatur negara yang wajib digunakan oleh seluruh kementerian, lembaga maupun daerah.

Aplikasi Umum yang sudah dipakai oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap antara lain :

1. Aplikasi SIPD untuk layanan perencanaan dan penganggaran

2. Aplikasi SPSE untuk layanan pengadaan barang dan jasa
3. Aplikasi SRIKANDI layanan pengarsipan
4. Aplikasi SP4N Laporan untuk layanan pengaduan

Dalam hal pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE menggunakan kode sumber terbuka jika menggunakan kode sumber tertutup harus berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan dari Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika. Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE harus berpedoman pada prinsip pengembangan dan pembangunan aplikasi yang ada pada Pemerintah Kabupaten Cilacap.

### 3.6 Keamanan SPBE

Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE. Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi, infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.

Strategi untuk mencapai penguatan keamanan SPBE antara lain:

1. Mengedukasi kesadaran keamanan SPBE melalui sosialisasi kepada agen perubahan di seluruh OPD.
2. Penilaian kerentanan secara berkala.
3. Peningkatan keamanan SPBE melalui penerapan dan pengimplementasian prosedur / langkah-langkah pengamanan SPBE.
4. Penanganan insiden keamanan SPBE.
5. Melakukan audit terhadap keamanan SPBE.

### 3.7 Audit TIK

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas audit infrastruktur, audit aplikasi dan audit keamanan. Pemeriksaan audit teknologi informasi dan komunikasi meliputi hal pokok teknis pada :

1. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
2. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
3. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
4. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

## BAB IV EVALUASI DAN PENILAIAN SPBE

SPBE memiliki 3 (tiga) unsur penting dalam penerapannya, yaitu: penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (*enabler*) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam rangka menjamin pelaksanaan SPBE dapat berjalan mencapai tujuannya, dan seiring dengan semangat reformasi birokrasi, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) ingin mendorong ketiga unsur tersebut agar lebih terintegrasi dan efisien, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pemerintah.

Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

1. Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
2. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai;  
dan
3. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Bobot diberikan pada domain dan aspek menurut tingkat prioritas pembangunan yang berbeda. Bobot yang diberikan pada pelaksanaan evaluasi SPBE pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Domain dan Aspek Penilaian SPBE Tahun 2019

Domain dan Aspek Penilaian	Jumlah Indikator	Total Bobot
Domain 1 – Kebijakan Internal SPBE	17	17%
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	7	7%
Aspek 2 - Kebijakan Internal Layanan SPBE	10	10%
Domain 2 – Tata Kelola SPBE	7	28%
Aspek 3 - Kelembagaan	2	8%
Aspek 4 - Strategi dan Perencanaan	2	8%
Aspek 5 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	3	12%
Domain dan Aspek Penilaian	Jumlah Indikator	Total Bobot
Domain 3 – Layanan SPBE	11	55%
Aspek 6 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	7	35%
Aspek 7 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	4	20%

Sedangkan bobot yang diberikan pada pelaksanaan evaluasi SPBE pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 2. Domain dan Aspek Penilaian SPBE Tahun 2021

Domain dan Aspek Penilaian	Jumlah Indikator	Total Bobot
Domain 1 – Kebijakan Internal Terkait SPBE	10	13%
Aspek 1 - Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola SPBE		13%
Domain 2 – Tata Kelola SPBE	10	25 %
Aspek 2 - Perencanaan Strategis SPBE		10%
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan komunikasi		10%
Aspek 4 - Penyelenggara SPBE		5%
Domain 3 - Manajemen SPBE	11	16,5%
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE		12%

Aspek 6 - Audit TIK		4,5%
Domain 4 - Layanan SPBE	16	45,5%
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		27,5%
Aspek 8 - Layanan Publik Berbasis Elektronik		18%

*Tabel 3. Perbedaan komposisi bobot perhitungan Indek SPBE dalam Permen PANRB 8 tahun 2018 dengan Permen PANRB 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.*

Domain dan Aspek Penilaian	Instrumen Sebelumnya		Instrumen Baru	
	Jumlah Indikator (35)	Bobot (100%)	Jumlah Indikator (47)	Bobot (100%)
Domain 1 - Kebijakan Internal Terkait SPBE	17	17 %	10	13%
Aspek 1 - Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola SPBE				13%
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	7	28 %	10	%
Aspek 2 - Perencanaan Strategis SPBE				10%
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi				10%
Aspek 4 - Penyelenggara SPBE				5%
Domain 3 - Manajemen SPBE	-	-	11	16,5%
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE				12%
Aspek 6 - Audit TIK				4,5%
Domain 4 - Layanan SPBE	11	55 %	16	45,5%
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik				27,5%
Aspek 8 - Layanan Pengaduan Pelayanan Publik				18%

Tabel 4. Perbedaan Indikator indek SPBE dalam Permen PANRB 8 tahun 2018 dengan Permen PANRB 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Domain/Aspek/Indikator	Nama Domain/Aspek/Indikator Evaluasi SPBE 2020	Nama Domain/Aspek/Indikator Evaluasi SPBE 2018
Domain 2	Tata Kelola SPBE	
Aspek 2	<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	X
Indikator 11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Rencana Induk SPBE
Indikator 12	Tingkat Kematangan peta jalan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Rencana Induk SPBE
Indikator 13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	Anggaran dan Belanja TIK
Indikator 14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi
Aspek 3	<i>Teknologi Informasi dan komunikasi</i>	
Indikator 15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	Integrasi Sistem Aplikasi
Indikator 16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	Pengoperasian Pusat Data
Indikator 17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	X
Indikator 18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	X
Aspek 4	<i>Penyelenggara SPBE</i>	
Indikator 19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Tim Pengarah SPBE
Indikator 20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	X

Tabel 5. Bobot Aspek SPBE sesuai Permen PANRB 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Nomor Aspek	Nama Aspek	Bobot
Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13,00
Aspek 2	Perencanaan Strategis SPBE	10,00
Aspek 3	Teknologi Informasi dan Komunikasi	10,00
Aspek 4	Penyelenggara SPBE	5,00
Aspek 5	Penerapan Manajemen SPBE	12,00
Aspek 6	Pelaksanaan Audit TIK	4,50
Aspek 7	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,50
Aspek 8	Layanan Publik Berbasis Elektronik	18,00
	Total Bobot	100,00

Tabel 6. Bobot Indikator Indek SPBE sesuai Permen PANRB 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Nomor Indikator	Nama Indikator	Bobot
Indikator 1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat / Pemerintah Daerah	1,30
Indikator 2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal peta jalan SPBE Instansi Pusat / Pemerintah Daerah	1,30
Indikator 3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	1,30
Indikator 4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	1,30
Indikator 5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	1,30
Indikator 6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,30
Indikator 7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah	1,30
Indikator 8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	1,30
Indikator 9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	1,30
Indikator 10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat / Pemerintah Daerah	1,30
Indikator 11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi	2,50

	Pusat / Pemerintah Daerah	
Indikator 12	Tingkat Kematangan peta jalan SPBE Instansi Pusat / Pemerintah Daerah	2,50
Indikator 13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	2,50
Indikator 14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2,50
Indikator 15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	2,50
Indikator 16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2,50
Indikator 17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat / Pemerintah Daerah	2,50
Indikator 18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah	2,50
Indikator 19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat / Pemerintah Daerah	2,50
Indikator 20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	2,50
Indikator 21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1,50
Indikator 22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1,50
Indikator 23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1,50
Indikator 24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1,50
Indikator 25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1,50
Indikator 26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1,50
Indikator 27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1,50
Indikator 28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1,50
Indikator 29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1,50

Indikator 30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1,50
Indikator 31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1,50
Indikator 32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	2,75
Indikator 33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	2,75
Indikator 35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	2,75
Indikator 36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	2,75
Indikator 37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	2,75
Indikator 38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	2,75
Indikator 39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	2,75
Indikator 40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	2,75
Indikator 41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	2,75
Indikator 42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	3,00
Indikator 43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3,00
Indikator 44	Tingkat Kematangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	3,00
Indikator 45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	3,00
Indikator 46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	3,00
Indikator 47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	3,00
	Total Bobot	100,00

Nilai indeks SPBE yang diberikan untuk masing-masing indikator di dalam domain dan aspek penilaian adalah angka dari 0 – 5. Kategori dari nilai indeks SPBE tersebut dapat dilihat dalam tabel 2 berikut.

*Tabel 7. Kategori Nilai Indeks SPBE*

NO	Nilai Indeks	Kategori
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

#### KRITERIA TINGKAT KEMATANGAN SPBE

##### 1. Kapabilitas Proses Pengukuran

Kapabilitas proses mencakup pengukuran tingkat kematangan pada kebijakan SPBE, proses tata kelola SPBE, dan proses manajemen SPBE.

Adapun penjelasan rinci kriteria tingkat kematangan kapabilitas proses dapat diuraikan sebagai berikut:

##### A. Tingkat Rintisan

- 1) Kebijakan internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai landasan pelaksanaan proses tata kelola dan manajemen SPBE belum tersedia atau masih dalam bentuk konsep/rancangan kebijakan.
- 2) Proses tata kelola dan manajemen SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dilaksanakan tanpa perencanaan, sewaktu-waktu, dan bersifat reaktif atas inisiatif pimpinan di dalam penerapan SPBE sehingga mengakibatkan pegawai tidak mengetahui tanggung jawab yang harus dilakukan. Selain itu, proses tata kelola dan manajemen SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tidak terdokumentasi, tidak terorganisasi dengan baik, dan tidak dipantau, dan hasilnya tidak dapat diprediksi.

## B. Tingkat Terkelola

- 1) Kriteria Tingkat Rintisan telah terpenuhi.
- 2) Kebijakan internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai landasan pelaksanaan proses tata kelola dan manajemen SPBE telah dilegalisasi, tetapi pengaturannya masih bersifat parsial atau sektoral sehingga belum mampu mendorong keterpaduan pelaksanaan proses tata kelola dan manajemen SPBE tersebut.
- 3) Proses tata kelola dan manajemen SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilaksanakan dengan fungsi manajemen (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi) yang telah didefinisikan dan didokumentasikan. Namun, setiap unit kerja/perangkat daerah melaksanakan proses tata kelola dan manajemen SPBE tersebut berdasarkan persepsi, pemahaman, dan fungsi manajemen masing-masing, tanpa panduan/pedoman yang baku.

## C. Tingkat Terdefinisi

- 1) Kriteria Tingkat Terkelola telah terpenuhi.
- 2) Kebijakan internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai landasan pelaksanaan proses tata kelola dan manajemen SPBE telah mengatur ruang lingkup substansi yang lengkap dan menyeluruh untuk dijadikan pedoman bagi semua unit kerja/perangkat daerah, namun belum mengatur keterpaduan antar unit kerja/perangkat daerah.
- 3) Proses tata kelola dan manajemen SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilaksanakan dengan fungsi manajemen (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi) oleh semua unit kerja/perangkat daerah dengan mengacu pada pedoman yang baku. Namun, keterpaduan antar unit kerja/perangkat daerah belum diarahkan dan dikendalikan dalam pelaksanaan proses tata kelola dan manajemen SPBE sehingga kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah untuk penerapan SPBE yang terpadu belum dapat dilaksanakan.

## D. Tingkat Terpadu dan Terukur

- 1) Kriteria Tingkat Terdefinisi telah terpenuhi.
- 2) Kebijakan internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai landasan pelaksanaan proses tata kelola dan

manajemen SPBE telah mengatur keterpaduan antar unit kerja/perangkat daerah untuk mencapai tujuan penerapan tata kelola dan manajemen SPBE, serta dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala terhadap perubahan peraturan perundang-undangan, teknologi, dan lingkungan internal atau eksternal organisasi.

- 3) Proses tata kelola dan manajemen SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilaksanakan secara kolaboratif oleh semua unit kerja/perangkat daerah terkait untuk mewujudkan penerapan SPBE yang terpadu. Penerapan tata kelola dan manajemen SPBE telah menghasilkan kinerja yang dapat diukur secara kuantitatif melalui kegiatan reviu dan evaluasi secara berkala.

#### E. Tingkat Optimum

- 1) Kriteria Tingkat Terpadu dan Terukur telah terpenuhi.
- 2) Kebijakan internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai landasan pelaksanaan proses tata kelola dan manajemen SPBE telah dilakukan revisi atau penggantian kebijakan baru sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal serta mengatur mekanisme pengelolaan perubahan tersebut.
- 3) Proses tata kelola dan manajemen SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilaksanakan perbaikan atau peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi. Dampak perubahan dari perbaikan atau peningkatan kualitas proses tata kelola dan manajemen SPBE dapat diantisipasi dengan menerapkan manajemen perubahan.

#### 2. Kriteria Tingkat Kematangan Kapabilitas Layanan

Pengukuran kapabilitas layanan mencakup pengukuran tingkat kematangan pada layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik. Kriteria tingkat kematangan kapabilitas layanan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tingkat Informasi Sistem elektronik/sistem aplikasi Instansi Pusat/Pemerintah Daerah hanya mampu memberikan layanan berupa informasi satu arah kepada pengguna SPBE seperti diseminasi informasi terkait dengan layanan, tautan, atau referensi informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

## 2. Tingkat Interaksi

- a. Kriteria Tingkat Informasi telah terpenuhi.
- b. Sistem elektronik/sistem aplikasi Instansi Pusat/Pemerintah Daerah mampu memberikan fasilitas yang bersifat interaktif (dua arah) dimana pengguna SPBE dapat melakukan interaksi dengan sistem elektronik/sistem aplikasi dan sistem elektronik/sistem aplikasi tersebut dapat memberikan respon. Sistem elektronik/sistem aplikasi memberikan fasilitas unduh/unggah informasi atau dokumen dan fasilitas pencarian informasi kepada pengguna SPBE.

## 3. Tingkat Transaksi

- a. Kriteria Tingkat Interaksi telah terpenuhi.
- b. Sistem elektronik/sistem aplikasi Instansi Pusat/Pemerintah Daerah mampu memberikan fasilitas transaksi kepada pengguna SPBE, yaitu beberapa operasi layanan yang menggunakan berbagai sumber daya SPBE dilaksanakan dalam satu transaksi. Sistem elektronik/sistem aplikasi mampu melakukan serangkaian proses kerja secara otomatis (*automatic workflow*) berupa serangkaian komputasi, analitik, validasi, persetujuan, pembayaran finansial, dan notifikasi yang menghasilkan layanan kepada pengguna dalam satu transaksi.

## 4. Tingkat Kolaborasi

- a. Kriteria Tingkat Transaksi telah terpenuhi.
- b. Sistem elektronik/sistem aplikasi Instansi Pusat/Pemerintah Daerah mampu memberikan fasilitas kolaborasi atau integrasi antar layanan SPBE. Kolaborasi atau integrasi layanan SPBE dapat dilakukan secara horisontal, yaitu layanan SPBE yang berbeda dan dihasilkan dari sistem elektronik/sistem aplikasi yang berbeda dapat dikolaborasikan atau diintegrasikan menjadi satu kesatuan alur kerja seperti layanan kepegawaian yang dikolaborasikan dengan layanan keuangan. Selain itu, kolaborasi atau integrasi layanan SPBE dapat dilakukan secara vertikal, yaitu layanan SPBE yang sama dan dihasilkan dari sistem elektronik/sistem aplikasi yang berbeda dapat dikolaborasikan atau diintegrasikan secara berjenjang menjadi satu kesatuan layanan, seperti layanan informasi pengadaan secara elektronik yang ada di masing-masing Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dapat diagregasi menjadi satu layanan.

## 5. Tingkat Optimum

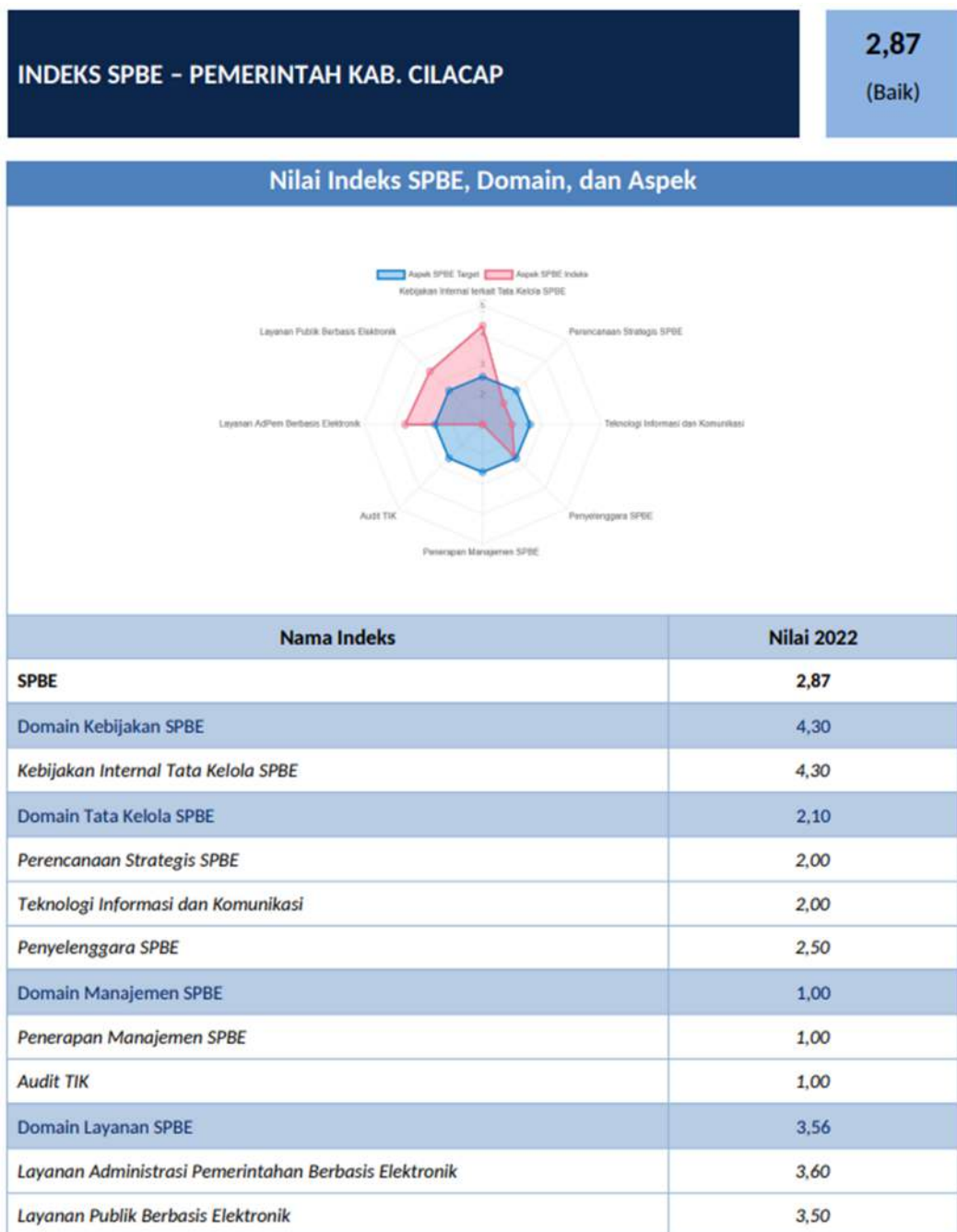
- a. Kriteria Tingkat Kolaborasi telah terpenuhi.
- b. Sistem elektronik/sistem aplikasi Instansi Pusat/Pemerintah Daerah mampu memberikan nilai tambah layanan kepada pengguna SPBE yang dihasilkan dari perbaikan atau peningkatan kualitas layanan secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan kebutuhan pengguna, peraturan perundang-undangan, teknologi, ataupun lingkungan internal atau eksternal organisasi. Dampak perubahan dari perbaikan dan peningkatan kualitas layanan diantisipasi dengan penerapan manajemen perubahan sehingga nilai tambah layanan dapat dirasakan oleh pengguna SPBE

BAB V  
KONDISI AKTUAL SPBE KABUPATEN CILACAP

A. HASIL EVALUASI SPBE 2022

Kementerian PANRB pada tahun 2022 telah melakukan penilaian terkait Indeks SPBE Kabupaten Cilacap yang meliputi 4 domain SPBE yaitu domain Kebijakan SPBE, Domain Tata Kelola SPBE, Domain Manajemen SPBE dan Domain Layanan SPBE, dengan nilai indeks SPBE sebesar 2,87 dengan kategori BAIK. Detail hasil penilaian Indeks SPBE Kabupaten Cilacap tahun 2022 ditunjukkan oleh tabel berikut.

Gambar.1 Nilai Indeks SPBE Kabupaten Cilacap Tahun 2022



Tabel . 8 Hasil Penilaian Indeks SPBE Kabupaten Cilacap Tahun  
2022

	Nilai Akhir	Penilaian Mandiri
Indeks SPBE	2,87	3,29
Predikat SPBE	Baik	Baik
Nilai Indeks		
Domain Kebijakan SPBE	4,30	4,60
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	4,30	4,60
Domain Tata Kelola SPBE	2,10	2,60
Perencanaan Strategis SPBE	2,00	2,25
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,00	2,75
Penyelenggara SPBE	2,50	3,00
Domain Manajemen SPBE	1,00	1,91
Penerapan Manajemen SPBE	1,00	2,38
Audit TIK	1,00	2,00
Domain Layanan SPBE	3,56	3,34
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,60	2,90
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,50	4,00

Berdasarkan hasil penilaian Indeks SPBE tersebut, tingkat kematangan kapabilitas proses penerapan SPBE Kabupaten Cilacap sebagai berikut :

1. Untuk *Domain Kebijakan* dengan nilai indek 4,30 dalam kategori Terintegrasi dan Terstruktur. Dimana kebijakan internal Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap sebagai landasan pelaksanaan proses tata kelola dan manajemen SPBE telah dilegalisasi sudah ada kolaborasi antar instansi, dievaluasi, dikendalikan dan ada hasil reuiu dan rekomendasi.

2. Domain Tata Kelola dengan nilai indek 2,10 memiliki kategori Terkelola. Dimana Proses tata kelola SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dilaksanakan dengan perencanaan di dalam penerapan SPBE, namun baru diterapkan pada sebagian unit kerja dalam organisasi.
3. Domain Manajemen SPBE dengan nilai 1,00 kategori Rintisan, dimana proses tata kelola dan manajemen SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dilaksanakan tanpa perencanaan, sewaktu-waktu, dan bersifat reaktif atas inisiatif pimpinan di dalam penerapan SPBE sehingga mengakibatkan pegawai tidak mengetahui tanggung jawab yang harus dilakukan. Selain itu, proses tata kelola dan manajemen SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tidak terdokumentasi, tidak terorganisasi dengan baik, dan tidak dipantau, dan hasilnya tidak dapat diprediksi.
4. Domain Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik memiliki nilai 3,56. Pengukuran kapabilitas layanan mencakup pengukuran tingkat kematangan pada layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik. Kriteria tingkat Transaksi dimana Sistem elektronik/sistem aplikasi Instansi Pusat/Pemerintah Daerah mampu memberikan fasilitas transaksi kepada pengguna SPBE, yaitu beberapa operasi layanan yang menggunakan berbagai sumber daya SPBE dilaksanakan dalam satu transaksi. Sistem elektronik/sistem aplikasi mampu melakukan serangkaian proses kerja secara otomatis (automatic workflow) berupa serangkaian komputasi, analitik, validasi, persetujuan, pembayaran finansial, dan notifikasi yang menghasilkan layanan kepada pengguna dalam satu transaksi.

#### B. REKOMENDASI HASIL PENILAIAN SPBE 2022 PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata kelola, dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE pada Pemkab Cilacap. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemkab Cilacap, sudah dapat menggambarkan predikat baik dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Pemerintah Kabupaten Cilacap masih terdapat beberapa kelemahan, khususnya pada aspek kebijakan internal, Perencanaan Strategis SPBE, TIK, Penerapan Manajemen SPBE, dan Audit TIK.

1. Perencanaan Strategis SPBE belum tersedia
2. Kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan tanpa perencanaan dan Kegiatan Audit Aplikasi dan Audit Infrastruktur dilaksanakan tanpa pedoman maka berimbas pada aspek penerapan Manajemen SPBE yang sama sekali belum diterapkan di Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Pada Aspek Kebijakan internal, Perencanaan Strategis SPBE, TIK, Penerapan Manajemen SPBE, dan Audit TIK sangat perlu menjadi perhatian Pemkab Cilacap. Diharapkan dapat melakukan inisiatif penerapan Manajemen SPBE sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sehingga pada pelaksanaan evaluasi SPBE selanjutnya sudah dapat memenuhi indikator dan kriteria penilaian sesuai target.

### C. KEBIJAKAN

Beberapa kebijakan berupa peraturan yang sudah dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam memberikan kekuatan dan payung hukum dalam menyelenggarakan TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, seperti ditunjukkan tabel 9.

*Tabel 9. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE*

	Nomor referensi kebijakan	Tentang/ruang lingkup	Jenis kebijakan
1	Nomor 91 Tahun 2021	Master Plan e-government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap	Peraturan Bupati
2	Nomor 99 Tahun 2021	Sistem Pengelolaan Satu Data di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap	Peraturan Bupati
3	Nomor 18 Tahun 2022	Arsitektur SPBE	Peraturan Bupati

4	Nomor 21 Tahun 2022	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap	Peraturan Bupati (Mengatur secara lengkap tentang Arsitektur SPBE, peta jalan, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Manajemen Keamanan Informasi dan Tim Koordinasi)
5	Nomor 23 Tahun 2022	Sistem Manajemen Keamanan Informasi	Peraturan Bupati
6	Nomor 31 Tahun 2022	Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap	Peraturan Bupati

Kebijakan-kebijakan tersebut memberikan pedoman dan aturan mengenai Arsitektur SPBE, peta jalan, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Manajemen Keamanan Informasi dan Tim Koordinasi serta pengelolaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Cilacap.

#### D. TATA KELOLA TIK

Tata Kelola TIK di Kabupaten Cilacap dapat digambarkan dalam 3 ( Tiga ) aspek yaitu:

1. Perencanaan Strategis SPBE ( Terdiri dari Arsitektur SPBE, peta jalan SPBE, Keterpaduan Rencana Dan Anggaran SPBE,

serta Inovasi Proses Bisnis SPBE ) ;

2. Adanya pelaksana Teknologi Informasi Dan Komunikasi meliputi Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan ;
3. Adanya penyelenggara SPBE yang terdiri dari tim pengarah, tim koordinasi dan tim kolaborasi SPBE.

*Tabel 10. Tata Kelola TIK di Kabupaten Cilacap*

No	Komponen	Kondisi Aktual	Keterangan
1	Arsitektur SPBE	Ada	Secara regulasi sudah memiliki yang ditetapkan melalui Perbup Nomor 18 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap namun masih memerlukan evaluasi karena menyesuaikan dengan Perpres no 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional
2	Peta Jalan SPBE	Belum Ada	Dalam tahap penyusunan dan pembahasan
3	Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	Belum Ada	Dalam tahap pembahasan
4	Inovasi Proses Bisnis SPBE	Belum Ada	Dalam tahap pembahasan
5	Pembangunan Aplikasi SPBE	Ada	Secara regulasi telah memiliki Perbup Nomor 91 Tahun 2021 tentang masterplan E-Government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dan sudah ada turunannya yang telah ditetapkan dengan SOP Nomor 048/0819/36 tanggal 24 Mei tahun 2021

6	Layanan Pusat Data	Belum Ada	Secara Regulasi Tahapan Layanan Pusat Data dengan Perbup Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPBE Pasal 13 dan terdapat turunanya ada SOP Layanan Pusat Data
7	Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Belum Ada	Belum ada DED FO
8	Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Daerah	Belum Ada	Belum ada SOP Sistem Penghubung Layanan Instansi.
9	Tim Koordinasi SPBE	Ada	ada dan diperbaharui setiap tahun
10	Kolaborasi Penerapan SPBE	Ada	Ada tim kolaborasi berupa tim dewan TIK

#### E. Manajemen SPBE

Manajemen SPBE terdiri dari :

1. Aspek penerapan manajemen SPBE yaitu Manajemen Resiko SPBE, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, Manajemen Aset TIK, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan Dan Manajemen Layanan SPBE.
2. Audit TIK yang terdiri dari Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE dan Audit Keamanan SPBE.

*Tabel 11. Manajemen SPBE Cilacap*

No	Komponen	Kondisi Aktual	Keterangan
1	Manajemen Resiko SPBE	Ada	Perlu diterapkan manajemen resiko SPBE
2	Manajemen Keamanan Informasi	Ada	Perlu diterapkan manajemen keamanan informasi
3	Manajemen Data	Ada	Perlu diterapkan manajemen data
4	Manajemen Aset TIK	Belum Ada	Perlu disusun dan diterapkan manajemen aset TIK

5	Manajemen Sumber Daya Manusia	Belum Ada	Perlu adanya perencanaan, monitoring dan evaluasi serta kapasitas SDM TIK
6	Manajemen Pengetahuan	Ada	Penerapan manajemen pengetahuan SPBE menggunakan <a href="https://spbe.cilacapkab.go.id/">https://spbe.cilacapkab.go.id/</a>
7	Manajemen Perubahan	Belum Ada	Perlu disusun dan diterapkan manajemen perubahan
8	Manajemen Layanan SPBE	Ada	Penerapan manajemen layanan SPBE melalui <a href="https://apl.cilacapkab.go.id/">https://apl.cilacapkab.go.id/</a>
9	Audit Infrastruktur SPBE	Ada	Telah melaksanakan audit internal, masih perlu dilaksanakan audit eksternal
10	Audit Aplikasi SPBE	Ada	Telah melaksanakan audit internal, masih perlu dilaksanakan audit eksternal
11	Audit Keamanan SPBE	Ada	Telah melaksanakan audit dengan Indeks KAMI

#### F. LAYANAN SPBE

Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Cilacap terdiri dari :

1. Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik meliputi layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan keuangan, layanan pengadaan barang dan jasa, layanan kepegawaian, layanan kearsipan, layanan pengelolaan barang milik negara, layanan pengawasan internal dan layanan akuntabilitas kinerja serta layanan kinerja berbasis elektronik.
2. Layanan publik berbasis elektronik terdiri dari layanan pengaduan, layanan publik, layanan data terbuka, JDIH, layanan sektor kesehatan, layanan sektor perizinan, layanan sektor administrasi kependudukan, Layanan perencanaan, Layanan penganggaran, Layanan keuangan, Layanan pengadaan barang dan jasa, Layanan kepegawaian, Layanan kearsipan, Layanan pengelolaan barang milik negara, Layanan pengawasan internal dan layanan akuntabilitas kinerja, Layanan kinerja berbasis elektronik, Layanan

pengaduan, Layanan data terbuka, Layanan sektor administrasi kependudukan, Layanan Publik sektor Pendidikan, Layanan Publik Sektor UMKM, Layanan Publik Sektor Pariwisata, Layanan Administrasi Pemerintahan Desa, Layanan Publik Sektor Transportasi , dan Layanan Publik Sektor Sosial.

Tabel 12. Layanan SPBE

No	Komponen	Kondisi Aktual	Keterangan
1	Layanan perencanaan	Ada	Menggunakan <a href="https://sipd.go.id/">https://sipd.go.id/</a>
2	Layanan penganggaran	Ada	Menggunakan <a href="https://sipd.go.id/">https://sipd.go.id/</a>
3	Layanan keuangan	Ada	Menggunakan <a href="https://cilacapkab.fmis.id/2023/">https://cilacapkab.fmis.id/2023/</a>
4	Layanan pengadaan barang dan jasa	Ada	Menggunakan <a href="https://lpse.cilacapkab.go.id/">https://lpse.cilacapkab.go.id/</a>
5	Layanan kepegawaian,	Ada	Menggunakan <a href="https://bkd.cilacapkab.go.id/">https://bkd.cilacapkab.go.id/</a>
6	Layanan kearsipan	Ada	Menggunakan <a href="https://srikandi.arsip.go.id/login">https://srikandi.arsip.go.id/login</a>
7	Layanan pengelolaan barang milik negara	Ada	Menggunakan aplikasi desktop SIMDA BMD
8	Layanan pengawasan internal dan layanan akuntabilitas kinerja	Ada	Menggunakan <a href="https://wbs.cilacapkab.go.id">wbs.cilacapkab.go.id</a> dan <a href="https://e-sakip.cilacapkab.go.id/">https://e-sakip.cilacapkab.go.id/</a>
9	Layanan kinerja	Ada	Menggunakan <a href="https://kinerjapns.cilacapkab.go.id/">https://kinerjapns.cilacapkab.go.id/</a> digunakan untuk penyusunan SKP, Rencana kerja bulanan dan pencatatan kinerja harian. Kedepan perlu dikembangkan untuk penghitungan tukin
10	Layanan pengaduan	Ada	Menggunakan <a href="https://laporbup.cilacapkab.go.id/">https://laporbup.cilacapkab.go.id/</a>
11	Layanan data terbuka	Ada	<a href="https://data.cilacapkab.go.id/">https://data.cilacapkab.go.id/</a> atau di <a href="https://ppid.cilacapkab.go.id/">https://ppid.cilacapkab.go.id/</a> perlu dilakukan evaluasi tentang konten data yang dipublish berdasarkan jenis data yang wajib

			dipublikasikan selain jenis data yang dikecualikan
12	JDIH	Ada	<a href="http://jdih.cilacapkab.go.id">jdih.cilacapkab.go.id</a> perlu dilakukan update data secara berkelanjutan
13	Layanan Publik sektor kesehatan	Ada	Layanan pendaftaran online rumah sakit, Layanan antrian, Cek ketersediaan kamar kosong. PSC 119 Cilacap
14	Layanan Publik sektor perijinan	Ada	Menggunakan aplikasi perizinan pusat <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a>
15	Layanan sektor administrasi kependudukan	Ada	Menggunakan aplikasi “Dolan Teluk Penyu”(Dokumen Online Tekan Telunjuk Permohonan Nyusul Metu) namun baru bisa diakses di playstore
16	Layanan Publik sektor Pendidikan	Ada	Menggunakan Aplikasi
17	Layanan Publik Sektor UMKM	Ada	Menggunakan <a href="https://ciblon.cilacapkab.go.id/">https://ciblon.cilacapkab.go.id/</a>
18	Layanan Publik Sektor Pariwisata	Belum Ada	Perlu dikembangkan layanan informasi sektor pariwisata berbasis android
19	Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	Ada	Siskeudes, <a href="https://sipades-binapemdes.kemendagri.go.id/">https://sipades-binapemdes.kemendagri.go.id/</a>
20	Layanan Publik Sektor Transportasi	Ada	Informasi tentang tarif pengujian kendaraan <a href="https://smarkir.cilacapkab.go.id/">https://smarkir.cilacapkab.go.id/</a>
21	Layanan Publik Sektor Sosial	Belum ada	Perlu dikembangkan layanan
22	Layanan Publik Sektor Pangan dan Perikanan	Ada	SIMONSTOK APP dan <a href="https://aksespangan.com/login">https://aksespangan.com/login</a> digunakan untuk input laporan stok dan harga pangan strategis dari kementerian pertanian  <a href="https://sislogda.jatengprov.go.id/index_dex">https://sislogda.jatengprov.go.id/index_dex</a> dan <a href="http://panelharga.bkp.pertanian.go.id/">http://panelharga.bkp.pertanian.go.id/</a>

			<p>SATU DATA KKP aplikasi dari Kementerian kelautan perikanan yang digunakan untuk memastikan data dan informasi dengan integritas tinggi</p> <p><a href="https://neraca.aksespangan.com">https://neraca.aksespangan.com</a> aplikasi yang digunakan untuk mencermati kebutuhan dan pemenuhan pangan rumah tangga di daerah</p> <p><a href="https://skpg.bkp.pertanian.go.id">https://skpg.bkp.pertanian.go.id</a> dari kementerian pertanian yang digunakan untuk menyediakan data dan informasi tentang keadaan pangan dan gizi secara rutin</p> <p>Aplikasi harmonisasi PPH Susenas yang digunakan untuk menghitung estimasi kebutuhan konsumsi pangan wilayah berdasarkan data proyeksi konsumsi pangan penduduk</p>
23	Layanan Publik sektor Ketenagakerjaan	Ada	<p>Aplikasi Tka Daerah dari Kemnaker, Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing) <a href="https://tka-online.kemnaker.go.id/">https://tka-online.kemnaker.go.id/</a></p> <p>Sisko TKLN Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri <a href="http://siskotkln.bnp2tki.go.id/">http://siskotkln.bnp2tki.go.id/</a></p> <p>e-Makaryo <a href="https://bursakerja.jatengprov.go.id/">https://bursakerja.jatengprov.go.id/</a></p>

#### G. SISTEM INFORMASI

Di setiap OPD mempunyai website yang bisa menjadi media informasi tiap-tiap OPD yang ada di Kabupaten Cilacap seperti ditunjukkan tabel 11.

Tabel 11. Daftar Website OPD Pemerintah Kabupaten Cilacap

NO	PERANGKAT DAERAH	WEBSITE	STATUS (AKTIF / TIDAK AKTIF)
1.	Pemerintah Kabupaten Cilacap	<a href="http://www.cilacapkab.go.id">www.cilacapkab.go.id</a>	AKTIF
2.	Sekretariat Daerah	<a href="http://setda.cilacapkab.go.id">setda.cilacapkab.go.id</a>	AKTIF
3.	Sekretariat DPRD	<a href="http://setwan.cilacapkab.go.id">setwan.cilacapkab.go.id</a>	AKTIF
4.	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	<a href="http://bppkad.cilacapkab.go.id">bppkad.cilacapkab.go.id</a>	AKTIF
5.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	<a href="http://bkd.cilacapkab.go.id">bkd.cilacapkab.go.id</a>	AKTIF
6.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	<a href="http://bappeda.cilacapkab.go.id">bappeda.cilacapkab.go.id</a>	AKTIF
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<a href="http://bpbd.cilacapkab.go.id">bpbd.cilacapkab.go.id</a>	AKTIF
8.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	<a href="http://bakesbangpol.cilacapkab.go.id">bakesbangpol.cilacapkab.go.id</a>	AKTIF
9.	Inspektorat Daerah	<a href="http://inspektorat.cilacapkab.go.id">inspektorat.cilacapkab.go.id</a>	AKTIF
10.	Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap	<a href="http://rsud.cilacapkab.go.id">rsud.cilacapkab.go.id</a>	AKTIF
11.	Rumah Sakit Umum Daerah Majenang	<a href="http://rsmajenang.cilacapkab.go.id">rsmajenang.cilacapkab.go.id</a>	AKTIF
12.	Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)	<a href="http://kominfo.cilacapkab.go.id">kominfo.cilacapkab.go.id</a>	AKTIF
13.	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	<a href="http://dlh.cilacapkab.go.id">dlh.cilacapkab.go.id</a>	AKTIF
14.	Dinas Perhubungan (Dishub)	<a href="http://dishub.cilacapkab.go.id">dishub.cilacapkab.go.id</a>	AKTIF

15.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	<a href="http://dpmptsp.cilacapkab.go.id">dpmptsp.cilacapkab.go.id</a>	AKTIF
16.	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPKUKM)	<a href="http://dpkukm.cilacapkab.go.id">dpkukm.cilacapkab.go.id</a>	AKTIF
17.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K)	<a href="http://pdk.cilacapkab.go.id">pdk.cilacapkab.go.id</a>	AKTIF
18.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)	<a href="http://disdukcapil.cilacapkab.go.id">disdukcapil.cilacapkab.go.id</a>	AKTIF
19.	Dinas Pertanian (Dispertan)	<a href="http://dispertan.cilacapkab.go.id">dispertan.cilacapkab.go.id</a>	AKTIF
20.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimta)	<a href="http://disperkimta.cilacapkab.go.id">disperkimta.cilacapkab.go.id</a>	AKTIF
21.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades)	<a href="http://dispermades.cilacapkab.go.id">dispermades.cilacapkab.go.id</a>	AKTIF
22.	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata (Disporapar)	<a href="http://disporapar.cilacapkab.go.id">disporapar.cilacapkab.go.id</a>	AKTIF
23.	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian (Disnakerin)	<a href="http://disnakerin.cilacapkab.go.id">disnakerin.cilacapkab.go.id</a>	AKTIF
25.	Dinas Kesehatan (Dinkes)	<a href="http://dinkes.cilacapkab.go.id">dinkes.cilacapkab.go.id</a>	AKTIF
26.	Dinas Pangan dan Perkebunan	<a href="http://dispabun.cilacapkab.go.id">dispabun.cilacapkab.go.id</a>	AKTIF
27.	Dinas Perikanan	<a href="http://disperka.cilacapkab.go.id">disperka.cilacapkab.go.id</a>	AKTIF
28.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	<a href="http://arpus.cilacapkab.go.id">arpus.cilacapkab.go.id</a>	AKTIF

29.	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<a href="http://kbpppa.cilacapkab.go.id">kbpppa.cilacapkab.go.id</a>	AKTIF
30.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<a href="http://dpupr.cilacapkab.go.id">dpupr.cilacapkab.go.id</a>	AKTIF
31.	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	<a href="http://psda.cilacapkab.go.id">psda.cilacapkab.go.id</a>	AKTIF
32.	Dinas Sosial	<a href="http://dinsos.cilacapkab.go.id">dinsos.cilacapkab.go.id</a>	AKTIF
33.	Satpol PP	<a href="http://satpolpp.cilacapkab.go.id">satpolpp.cilacapkab.go.id</a>	AKTIF

Tabel 12. Daftar email OPD Pemerintah Kabupaten Cilacap

NO	PERANGKAT DAERAH	EMAIL
1.	Pemkab Cilacap	pemkab@cilacapkab.go.id
2.	Sekretariat Daerah	setda@cilacapkab.go.id
3.	Sekretariat DPRD	setwan@cilacapkab.go.id
4.	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)	bppkad@cilacapkab.go.id
5.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD)	bkd@cilacapkab.go.id
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	bpbd@cilacapkab.go.id
7.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	bappeda@cilacapkab.go.id
8.	Inspektorat Daerah	inspektorat@cilacapkab.go.id
9.	Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap	rsud@cilacapkab.go.id
10.	Rumah Sakit Umum Daerah Majenang	rsmajenang@cilacapkab.go.id
11.	Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)	kominfo@cilacapkab.go.id
12.	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	dlh@cilacapkab.go.id
13.	Dinas Perhubungan (Dishub)	dishub@cilacapkab.go.id
14.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	dpmptsp@cilacapkab.go.id
15.	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPKUKM)	dpkukm@cilacapkab.go.id
16.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K )	pdk@cilacapkab.go.id
17.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)	disdukcapil@cilacapkab.go.id
18.	Dinas Pertanian (Dispertan)	dispertan@cilacapkab.go.id
19.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	disperkimta@cilacapkab.go.id

20.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes)	dispermades@cilacapkab.go.id
21.	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	disporapar@cilacapkab.go.id
22.	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	disnakerin@cilacapkab.go.id
23.	Dinas Kesehatan (Dinkes)	dinkes@cilacapkab.go.id
24.	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	kbpppa@cilacapkab.go.id
25.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	dpupr@cilacapkab.go.id
26.	Dinas Perikanan	perikanan@cilacapkab.go.id
27.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Arpus)	arpus@cilacapkab.go.id
28.	Dinas Pangan dan Perkebunan	dispabun@cilacapkab.go.id
29.	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	satpolpp@cilacapkab.go.id
30.	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	psda@cilacapkab.go.id
31.	Dinas Sosial	dinsos@cilacapkab.go.id
32.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	bakesbangpol@cilacapkab.go.id

*Tabel 13. Daftar Website Kecamatan Kabupaten Cilacap*

NO	KECAMATAN	WEBSITE
1.	Kecamatan Adipala	<a href="http://adipala.cilacapkab.go.id">adipala.cilacapkab.go.id</a>
2	Kecamatan Bantarsari	<a href="http://bantarsari.cilacapkab.go.id">bantarsari.cilacapkab.go.id</a>
3	Kecamatan Binangun	<a href="http://binangun.cilacapkab.go.id">binangun.cilacapkab.go.id</a>
4	Kecamatan Cilacap Selatan	<a href="http://cilacapselatan.cilacapkab.go.id">cilacapselatan.cilacapkab.go.id</a>
5	Kecamatan Cilacap Tengah	<a href="http://cilacaptengah.cilacapkab.go.id">cilacaptengah.cilacapkab.go.id</a>
6	Kecamatan Cilacap Utara	<a href="http://cilacaputara.cilacapkab.go.id">cilacaputara.cilacapkab.go.id</a>
7	Kecamatan Cimanggu	<a href="http://cimanggu.cilacapkab.go.id">cimanggu.cilacapkab.go.id</a>
8	Kecamatan Cipari	<a href="http://cipari.cilacapkab.go.id">cipari.cilacapkab.go.id</a>
9	Kecamatan Dayeuhluhur	<a href="http://dayeuhluhur.cilacapkab.go.id">dayeuhluhur.cilacapkab.go.id</a>

10	Kecamatan Gandrungmangu	<a href="mailto:gandrungmangu.cilacapkab.go.id">gandrungmangu.cilacapkab.go.id</a>
11	Kecamatan Jeruk legi	<a href="mailto:jeruklegi.cilacapkab.go.id">jeruklegi.cilacapkab.go.id</a>
12	Kecamatan Kampung Laut	<a href="mailto:kampunglaut.cilacapkab.go.id">kampunglaut.cilacapkab.go.id</a>
13	Kecamatan Karangpucung	<a href="mailto:karangpucung.cilacapkab.go.id">karangpucung.cilacapkab.go.id</a>
14	Kecamatan Kawunganten	<a href="mailto:kawunganten.cilacapkab.go.id">kawunganten.cilacapkab.go.id</a>
15	Kecamatan Kedungreja	<a href="mailto:kedungreja.cilacapkab.go.id">kedungreja.cilacapkab.go.id</a>
16	Kecamatan Kesugihan	<a href="mailto:kesugihan.cilacapkab.go.id">kesugihan.cilacapkab.go.id</a>
17	Kecamatan Kroya	<a href="mailto:kroya.cilacapkab.go.id">kroya.cilacapkab.go.id</a>
18	Kecamatan Majenang	<a href="mailto:majenang.cilacapkab.go.id">majenang.cilacapkab.go.id</a>
19	Kecamatan Maos	<a href="mailto:maos.cilacapkab.go.id">maos.cilacapkab.go.id</a>
20	Kecamatan Nusawungu	<a href="mailto:nusawungu.cilacapkab.go.id">nusawungu.cilacapkab.go.id</a>
21	Kecamatan Patimuan	<a href="mailto:patimuan.cilacapkab.go.id">patimuan.cilacapkab.go.id</a>
22	Kecamatan Sampang	<a href="mailto:sampang.cilacapkab.go.id">sampang.cilacapkab.go.id</a>
23	Kecamatan Sidareja	<a href="mailto:sidareja.cilacapkab.go.id">sidareja.cilacapkab.go.id</a>
24	Kecamatan Wanareja	<a href="mailto:wanareja.cilacapkab.go.id">wanareja.cilacapkab.go.id</a>

*Tabel 14. Daftar Email Kecamatan Kabupaten Cilacap*

NO	KECAMATAN	EMAIL
1	Kecamatan Adipala	<a href="mailto:adipala@cilacapkab.go.id">adipala@cilacapkab.go.id</a>
2	Kecamatan Bantarsari	<a href="mailto:bantarsari@cilacapkab.go.id">bantarsari@cilacapkab.go.id</a>
3	Kecamatan Binangun	<a href="mailto:binangun@cilacapkab.go.id">binangun@cilacapkab.go.id</a>
4	Kecamatan Cilacap Selatan	<a href="mailto:cilacapselatan@cilacapkab.go.id">cilacapselatan@cilacapkab.go.id</a>
5	Kecamatan Cilacap Tengah	<a href="mailto:cilacaptengah@cilacapkab.go.id">cilacaptengah@cilacapkab.go.id</a>
6	Kecamatan Cilacap Utara	<a href="mailto:cilacaputara@cilacapkab.go.id">cilacaputara@cilacapkab.go.id</a>
7	Kecamatan Cimanggu	<a href="mailto:cimanggu@cilacapkab.go.id">cimanggu@cilacapkab.go.id</a>
8	Kecamatan Cipari	<a href="mailto:cipari@cilacapkab.go.id">cipari@cilacapkab.go.id</a>
9	Kecamatan Dayeuhluhur	<a href="mailto:dayeuhluhur@cilacapkab.go.id">dayeuhluhur@cilacapkab.go.id</a>
10	Kecamatan Gandrungmangu	<a href="mailto:gandrungmangu@cilacapkab.go.id">gandrungmangu@cilacapkab.go.id</a>
11	Kecamatan Jeruklegi	<a href="mailto:jeruklegi@cilacapkab.go.id">jeruklegi@cilacapkab.go.id</a>
12	Kecamatan Kampung Laut	<a href="mailto:kampunglaut@cilacapkab.go.id">kampunglaut@cilacapkab.go.id</a>
13	Kecamatan Karangpucung	<a href="mailto:karangpucung@cilacapkab.go.id">karangpucung@cilacapkab.go.id</a>

14	Kecamatan Kawunganten	kawunganten@cilacapkab.go.id
15	Kecamatan Kedungreja	kedungreja@cilacapkab.go.id
16	Kecamatan Kesugihan	kesugihan@cilacapkab.go.id
17	Kecamatan Kroya	kroya@cilacapkab.go.id
18	Kecamatan Majenang	majenang@cilacapkab.go.id
19	Kecamatan Maos	maos@cilacapkab.go.id
20	Kecamatan Nusawungu	nusawungu@cilacapkab.go.id
21	Kecamatan Patimuan	patimuan@cilacapkab.go.id
22	Kecamatan Sampang	sampang@cilacapkab.go.id
23	Kecamatan Sidareja	sidareja@cilacapkab.go.id
24	Kecamatan Wanareja	wanareja@cilacapkab.go.id

Tabel 15. Daftar Website Kelurahan Kabupaten Cilacap

NO	KELURAHAN	WEBSITE
1	Kelurahan Cilacap	<a href="http://cilacap-cilacapselatan.cilacapkab.go.id">cilacap-cilacapselatan.cilacapkab.go.id</a>
2	Kelurahan Sidakaya	<a href="http://sidakaya-cilacapselatan.cilacapkab.go.id">sidakaya-cilacapselatan.cilacapkab.go.id</a>
3	Kelurahan Tambakreja	<a href="http://tambakreja-cilacapselatan.cilacapkab.go.id">tambakreja-cilacapselatan.cilacapkab.go.id</a>
4	Kelurahan Tegalreja	<a href="http://tegalreja-cilacapselatan.cilacapkab.go.id">tegalreja-cilacapselatan.cilacapkab.go.id</a>
5	Kelurahan Tegalkamulyan	<a href="http://tegalkamulyan-cilacapselatan.cilacapkab.go.id">tegalkamulyan-cilacapselatan.cilacapkab.go.id</a>
6	Kelurahan Donan	<a href="http://donan-cilacaptengah.cilacapkab.go.id">donan-cilacaptengah.cilacapkab.go.id</a>
7	Kelurahan Gunung Sumping	<a href="http://gunungsumping-cilacaptengah.cilacapkab.go.id">gunungsumping-cilacaptengah.cilacapkab.go.id</a>
8	Kelurahan Kutawaru	<a href="http://kutawaru-cilacaptengah.cilacapkab.go.id">kutawaru-cilacaptengah.cilacapkab.go.id</a>
9	Kelurahan Lomanis	<a href="http://lomanis-cilacaptengah.cilacapkab.go.id">lomanis-cilacaptengah.cilacapkab.go.id</a>
10	Kelurahan Sidanegara	<a href="http://sidanegara-cilacaptengah.cilacapkab.go.id">sidanegara-cilacaptengah.cilacapkab.go.id</a>
11	Kelurahan Gumilir	<a href="http://gumilir-cilacaputara.cilacapkab.go.id">gumilir-cilacaputara.cilacapkab.go.id</a>
12	Kelurahan Karangtalun	<a href="http://karangtalun-cilacaputara.cilacapkab.go.id">karangtalun-cilacaputara.cilacapkab.go.id</a>
13	Kelurahan Kebonmanis	<a href="http://kebonmanis-cilacaputara.cilacapkab.go.id">kebonmanis-cilacaputara.cilacapkab.go.id</a>
14	Kelurahan Mertasinga	<a href="http://mertasinga-cilacaputara.cilacapkab.go.id">mertasinga-cilacaputara.cilacapkab.go.id</a>
15	Kelurahan Tritih Kulon	<a href="http://tritihkulon-cilacaputara.cilacapkab.go.id">tritihkulon-cilacaputara.cilacapkab.go.id</a>

Tabel 16. Daftar Website Desa Kabupaten Cilacap

NO	DESA	WEBSITE
1	Adipala	<a href="http://adipala-adipala.cilacapkab.go.id">adipala-adipala.cilacapkab.go.id</a>
2	Adiraja	<a href="http://adiraja-adipala.cilacapkab.go.id">adiraja-adipala.cilacapkab.go.id</a>
3	Adireja Kulon	<a href="http://adirejakulon-adipala.cilacapkab.go.id">adirejakulon-adipala.cilacapkab.go.id</a>
4	Adireja Wetan	<a href="http://adirejawetan-adipala.cilacapkab.go.id">adirejawetan-adipala.cilacapkab.go.id</a>
5	Bunton	<a href="http://bunton-adipala.cilacapkab.go.id">bunton-adipala.cilacapkab.go.id</a>
6	Doplang	<a href="http://doplang-adipala.cilacapkab.go.id">doplang-adipala.cilacapkab.go.id</a>
7	Glempangpasir	<a href="http://glempangpasir-adipala.cilacapkab.go.id">glempangpasir-adipala.cilacapkab.go.id</a>
8	Gombolharjo	<a href="http://gombolharjo-adipala.cilacapkab.go.id">gombolharjo-adipala.cilacapkab.go.id</a>
9	Karanganyar	<a href="http://karanganyar-adipala.cilacapkab.go.id">karanganyar-adipala.cilacapkab.go.id</a>
10	Karangbenda	<a href="http://karangbenda-adipala.cilacapkab.go.id">karangbenda-adipala.cilacapkab.go.id</a>
11	Karangsari	<a href="http://karangsari-adipala.cilacapkab.go.id">karangsari-adipala.cilacapkab.go.id</a>
12	Pedasong	<a href="http://pedasong-adipala.cilacapkab.go.id">pedasong-adipala.cilacapkab.go.id</a>
13	Penggalang	<a href="http://penggalang-adipala.cilacapkab.go.id">penggalang-adipala.cilacapkab.go.id</a>
14	Welahan Wetan	<a href="http://welahanwetan-adipala.cilacapkab.go.id">welahanwetan-adipala.cilacapkab.go.id</a>
15	Wlahar	<a href="http://wlahar-adipala.cilacapkab.go.id">wlahar-adipala.cilacapkab.go.id</a>
16	Bantarsari	<a href="http://bantarsari-bantarsari.cilacapkab.go.id">bantarsari-bantarsari.cilacapkab.go.id</a>
17	Binangun	<a href="http://binangun-bantarsari.cilacapkab.go.id">binangun-bantarsari.cilacapkab.go.id</a>
18	Bulaksari	<a href="http://bulaksari-bantarsari.cilacapkab.go.id">bulaksari-bantarsari.cilacapkab.go.id</a>
19	Cikedondong	<a href="http://cikedondong-bantarsari.cilacapkab.go.id">cikedondong-bantarsari.cilacapkab.go.id</a>
20	Citembong	<a href="http://citembong-bantarsari.cilacapkab.go.id">citembong-bantarsari.cilacapkab.go.id</a>
21	Kamulyan	<a href="http://kamulyan-bantarsari.cilacapkab.go.id">kamulyan-bantarsari.cilacapkab.go.id</a>
22	Kedungwadas	<a href="http://kedungwadas-bantarsari.cilacapkab.go.id">kedungwadas-bantarsari.cilacapkab.go.id</a>
23	Rawajaya	<a href="http://rawajaya-bantarsari.cilacapkab.go.id">rawajaya-bantarsari.cilacapkab.go.id</a>
24	Alangamba	<a href="http://alangamba-binangun.cilacapkab.go.id">alangamba-binangun.cilacapkab.go.id</a>
25	Bangkal	<a href="http://bangkal-binangun.cilacapkab.go.id">bangkal-binangun.cilacapkab.go.id</a>
26	Binangun	<a href="http://binangun-binangun.cilacapkab.go.id">binangun-binangun.cilacapkab.go.id</a>
27	Jati	<a href="http://jati-binangun.cilacapkab.go.id">jati-binangun.cilacapkab.go.id</a>
28	Jepara Kulon	<a href="http://jeparakulon-binangun.cilacapkab.go.id">jeparakulon-binangun.cilacapkab.go.id</a>
29	Jepara Wetan	<a href="http://jeparawetan-binangun.cilacapkab.go.id">jeparawetan-binangun.cilacapkab.go.id</a>
30	Karangnangka	<a href="http://karangnangka-binangun.cilacapkab.go.id">karangnangka-binangun.cilacapkab.go.id</a>
31	Kemojing	<a href="http://kemojing-binangun.cilacapkab.go.id">kemojing-binangun.cilacapkab.go.id</a>
32	Kepudang	<a href="http://kepudang-binangun.cilacapkab.go.id">kepudang-binangun.cilacapkab.go.id</a>
33	Pagubugan	<a href="http://pagubugan-binangun.cilacapkab.go.id">pagubugan-binangun.cilacapkab.go.id</a>
34	Pagubugan Kulon	<a href="http://pagubugankulon-binangun.cilacapkab.go.id">pagubugankulon-binangun.cilacapkab.go.id</a>
35	Pasuruhan	<a href="http://pasuruhan-binangun.cilacapkab.go.id">pasuruhan-binangun.cilacapkab.go.id</a>
36	Pesawahan	<a href="http://pesawahan-binangun.cilacapkab.go.id">pesawahan-binangun.cilacapkab.go.id</a>
37	Sidaurip	<a href="http://sidaurip-binangun.cilacapkab.go.id">sidaurip-binangun.cilacapkab.go.id</a>

38	Sidayu	<a href="http://sidayu-binangun.cilacapkab.go.id">sidayu-binangun.cilacapkab.go.id</a>
39	Widarapayung Kulon	<a href="http://widarapayungkulon-binangun.cilacapkab.go.id">widarapayungkulon- binangun.cilacapkab.go.id</a>
40	Widarapayung Wetan	<a href="http://widarapayungwetan-binangun.cilacapkab.go.id">widarapayungwetan- binangun.cilacapkab.go.id</a>
41	Bantarmangu	<a href="http://bantarmangu-cimanggu.cilacapkab.go.id">bantarmangu-cimanggu.cilacapkab.go.id</a>
42	Bantarpanjang	<a href="http://bantarpanjang-cimanggu.cilacapkab.go.id">bantarpanjang-cimanggu.cilacapkab.go.id</a>
43	Cibalung	<a href="http://cibalung-cimanggu.cilacapkab.go.id">cibalung-cimanggu.cilacapkab.go.id</a>
44	Cilempuyang	<a href="http://cilempuyang-cimanggu.cilacapkab.go.id">cilempuyang-cimanggu.cilacapkab.go.id</a>
45	Cimanggu	<a href="http://cimanggu-cimanggu.cilacapkab.go.id">cimanggu-cimanggu.cilacapkab.go.id</a>
46	Cisalak	<a href="http://cisalak-cimanggu.cilacapkab.go.id">cisalak-cimanggu.cilacapkab.go.id</a>
47	Karangreja	<a href="http://karangreja-cimanggu.cilacapkab.go.id">karangreja-cimanggu.cilacapkab.go.id</a>
48	Karangsari	<a href="http://karangsari-cimanggu.cilacapkab.go.id">karangsari-cimanggu.cilacapkab.go.id</a>
49	Kutabima	<a href="http://kutabima-cimanggu.cilacapkab.go.id">kutabima-cimanggu.cilacapkab.go.id</a>
50	Mandala	
51	Negarajati	<a href="http://negarajati-cimanggu.cilacapkab.go.id">negarajati-cimanggu.cilacapkab.go.id</a>
52	Panimbang	<a href="http://panimbang-cimanggu.cilacapkab.go.id">panimbang-cimanggu.cilacapkab.go.id</a>
53	Pesahangan	
54	Rejodadi	<a href="http://rejodadi-cimanggu.cilacapkab.go.id">rejodadi-cimanggu.cilacapkab.go.id</a>
55	Caruy	<a href="http://caruy-cipari.cilacapkab.go.id">caruy-cipari.cilacapkab.go.id</a>
56	Cipari	<a href="http://cipari.desa.id">cipari.desa.id</a>
57	Cisuru	
58	Karangreja	<a href="http://karangreja-cipari.cilacapkab.go.id">karangreja-cipari.cilacapkab.go.id</a>
59	Kutasari	<a href="http://kutasari-cipari.cilacapkab.go.id">kutasari-cipari.cilacapkab.go.id</a>
60	Mekarsari	<a href="http://mekarsari-cilacap.desa.id">mekarsari-cilacap.desa.id</a>
61	Mulyadadi	<a href="http://mulyadadi-cipari.cilacapkab.go.id">mulyadadi-cipari.cilacapkab.go.id</a>
62	Pegadingan	<a href="http://pegadingan.desa.id">pegadingan.desa.id</a>
63	Segaralangu	<a href="http://segaralangu.desa.id">segaralangu.desa.id</a>
64	Serang	<a href="http://serang-cilacap.desa.id">serang-cilacap.desa.id</a>
65	Sidasari	<a href="http://sidasari-cipari.cilacapkab.go.id">sidasari-cipari.cilacapkab.go.id</a>
66	Bingkeng	<a href="http://bingkeng-dayeuhluhur.cilacapkab.go.id">bingkeng-dayeuhluhur.cilacapkab.go.id</a>
67	Bolang	<a href="http://bolang-dayeuhluhur.cilacapkab.go.id">bolang-dayeuhluhur.cilacapkab.go.id</a>
68	Cijeruk	<a href="http://cijeruk-dayeuhluhur.cilacapkab.go.id">cijeruk-dayeuhluhur.cilacapkab.go.id</a>
69	Cilumping	<a href="http://cilumping-dayeuhluhur.cilacapkab.go.id">cilumping-dayeuhluhur.cilacapkab.go.id</a>
70	Ciwalen	<a href="http://ciwalen-dayeuhluhur.cilacapkab.go.id">ciwalen-dayeuhluhur.cilacapkab.go.id</a>
71	Datar	<a href="http://datar-dayeuhluhur.cilacapkab.go.id">datar-dayeuhluhur.cilacapkab.go.id</a>
72	Dayeuhluhur	<a href="http://dayeuhluhur-dayeuhluhur.cilacapkab.go.id">dayeuhluhur-dayeuhluhur.cilacapkab.go.id</a>
73	Hanum	<a href="http://hanum-dayeuhluhur.cilacapkab.go.id">hanum-dayeuhluhur.cilacapkab.go.id</a>
74	Kutaagung	<a href="http://kutaagung-dayeuhluhur.cilacapkab.go.id">kutaagung-dayeuhluhur.cilacapkab.go.id</a>
75	Matenggeng	<a href="http://matenggeng-dayeuhluhur.cilacapkab.go.id">matenggeng-dayeuhluhur.cilacapkab.go.id</a>
76	Panulisan Barat	<a href="http://panulisanbarat-dayeuhluhur.cilacapkab.go.id">panulisanbarat-dayeuhluhur.cilacapkab.go.id</a>
77	Panulisan	<a href="http://panulisan-dayeuhluhur.cilacapkab.go.id">panulisan-dayeuhluhur.cilacapkab.go.id</a>

78	Panulisan Timur	<a href="http://panulisantimur-dayeuhluhur.cilacapkab.go.id">panulisantimur-dayeuhluhur.cilacapkab.go.id</a>
79	Sumpinghayu	
80	Bulusari	<a href="http://bulusari-gandrungmangu.cilacapkab.go.id">bulusari-gandrungmangu.cilacapkab.go.id</a>
81	Cinangsi	<a href="http://cinangsi-gandrungmangu.cilacapkab.go.id">cinangsi-gandrungmangu.cilacapkab.go.id</a>
82	Cisumur	<a href="http://cisumur-gandrungmangu.cilacapkab.go.id">cisumur-gandrungmangu.cilacapkab.go.id</a>
83	Gandrungmangu	<a href="http://gandrungmangu-gandrungmangu.cilacapkab.go.id">gandrungmangu-gandrungmangu.cilacapkab.go.id</a>
84	Gandrungmanis	<a href="http://gandrungmanis-gandrungmangu.cilacapkab.go.id">gandrungmanis-gandrungmangu.cilacapkab.go.id</a>
85	Gintungreja	<a href="http://gintungreja-gandrungmangu.cilacapkab.go.id">gintungreja-gandrungmangu.cilacapkab.go.id</a>
86	Karanganyar	<a href="http://karanganyar-gandrungmangu.cilacapkab.go.id">karanganyar-gandrungmangu.cilacapkab.go.id</a>
87	Karanggintung	<a href="http://karanggintung-gandrungmangu.cilacapkab.go.id">karanggintung-gandrungmangu.cilacapkab.go.id</a>
88	Kertajaya	<a href="http://kertajaya-gandrungmangu.cilacapkab.go.id">kertajaya-gandrungmangu.cilacapkab.go.id</a>
89	Layansari	<a href="http://layansari-gandrungmangu.cilacapkab.go.id">layansari-gandrungmangu.cilacapkab.go.id</a>
90	Muktisari	<a href="http://muktisari-gandrungmangu.cilacapkab.go.id">muktisari-gandrungmangu.cilacapkab.go.id</a>
91	Rungkang	<a href="http://rungkang-gandrungmangu.cilacapkab.go.id">rungkang-gandrungmangu.cilacapkab.go.id</a>
92	Sidaurip	<a href="http://sidaurip-gandrungmangu.cilacapkab.go.id">sidaurip-gandrungmangu.cilacapkab.go.id</a>
93	Wringinharjo	<a href="http://wringinharjo-gandrungmangu.cilacapkab.go.id">wringinharjo-gandrungmangu.cilacapkab.go.id</a>
94	Brebeg	<a href="http://brebeg-jeruklegi.cilacapkab.go.id">brebeg-jeruklegi.cilacapkab.go.id</a>
95	Cilibang	<a href="http://cilibang-jeruklegi.cilacapkab.go.id">cilibang-jeruklegi.cilacapkab.go.id</a>
96	Citepus	<a href="http://citepus-jeruklegi.cilacapkab.go.id">citepus-jeruklegi.cilacapkab.go.id</a>
97	Jambusari	<a href="http://jambusari-jeruklegi.cilacapkab.go.id">jambusari-jeruklegi.cilacapkab.go.id</a>
98	Jeruklegi Kulon	<a href="http://jeruklegikulon-jeruklegi.cilacapkab.go.id">jeruklegikulon-jeruklegi.cilacapkab.go.id</a>
99	Jeruklegi Wetan	<a href="http://jeruklegiwetan-jeruklegi.cilacapkab.go.id">jeruklegiwetan-jeruklegi.cilacapkab.go.id</a>
100	Karangkemiri	<a href="http://karangkemiri-jeruklegi.cilacapkab.go.id">karangkemiri-jeruklegi.cilacapkab.go.id</a>
101	Mandala	<a href="http://mandala-jeruklegi.cilacapkab.go.id">mandala-jeruklegi.cilacapkab.go.id</a>
102	Sawangan	<a href="http://sawangan-jeruklegi.cilacapkab.go.id">sawangan-jeruklegi.cilacapkab.go.id</a>
103	Sumingkir	<a href="http://sumingkir-jeruklegi.cilacapkab.go.id">sumingkir-jeruklegi.cilacapkab.go.id</a>
104	Tritih Lor	<a href="http://tritihlor-jeruklegi.cilacapkab.go.id">tritihlor-jeruklegi.cilacapkab.go.id</a>
105	Tritih Wetan	<a href="http://tritihwetan-jeruklegi.cilacapkab.go.id">tritihwetan-jeruklegi.cilacapkab.go.id</a>
106	Prapagan	<a href="http://prapagan-jeruklegi.cilacapkab.go.id">prapagan-jeruklegi.cilacapkab.go.id</a>
107	Klaces	<a href="http://klaces-kampunglaut.cilacapkab.go.id">klaces-kampunglaut.cilacapkab.go.id</a>
108	Panikel	<a href="http://panikel-kampunglaut.cilacapkab.go.id">panikel-kampunglaut.cilacapkab.go.id</a>
109	Ujungalang	<a href="http://ujungalang-kampunglaut.cilacapkab.go.id">ujungalang-kampunglaut.cilacapkab.go.id</a>
110	Ujunggagak	<a href="http://ujunggagak-kampunglaut.cilacapkab.go.id">ujunggagak-kampunglaut.cilacapkab.go.id</a>
111	Babakan	<a href="http://babakan-karangpucung.cilacapkab.go.id">babakan-karangpucung.cilacapkab.go.id</a>
112	Bengbulang	<a href="http://bengbulang-karangpucung.cilacapkab.go.id">bengbulang-karangpucung.cilacapkab.go.id</a>
113	Cidadap	<a href="http://cidadap-karangpucung.cilacapkab.go.id">cidadap-karangpucung.cilacapkab.go.id</a>
114	Ciporos	<a href="http://ciporos-karangpucung.cilacapkab.go.id">ciporos-karangpucung.cilacapkab.go.id</a>
115	Ciruyung	<a href="http://ciruyung-karangpucung.cilacapkab.go.id">ciruyung-karangpucung.cilacapkab.go.id</a>
116	Gunungtelu	<a href="http://gunungtelu-karangpucung.cilacapkab.go.id">gunungtelu-karangpucung.cilacapkab.go.id</a>
117	Karangpucung	<a href="http://karangpucung-karangpucung.cilacapkab.go.id">karangpucung-karangpucung.cilacapkab.go.id</a>
118	Pamulihan	<a href="http://pamulihan-karangpucung.cilacapkab.go.id">pamulihan-karangpucung.cilacapkab.go.id</a>

119	Pangawaren	<a href="http://pangawaren-karangpucung.cilacapkab.go.id">pangawaren-karangpucung.cilacapkab.go.id</a>
120	Sidamulya	<a href="http://sidamulya-karangpucung.cilacapkab.go.id">sidamulya-karangpucung.cilacapkab.go.id</a>
121	Sindangbarang	<a href="http://sindangbarang-karangpucung.cilacapkab.go.id">sindangbarang-karangpucung.cilacapkab.go.id</a>
122	Surusunda	<a href="http://surusunda-karangpucung.cilacapkab.go.id">surusunda-karangpucung.cilacapkab.go.id</a>
123	Tayem	<a href="http://tayem-karangpucung.cilacapkab.go.id">tayem-karangpucung.cilacapkab.go.id</a>
124	Tayem Timur	<a href="http://tayemtimur-karangpucung.cilacapkab.go.id">tayemtimur-karangpucung.cilacapkab.go.id</a>
125	Babakan	<a href="http://babakan-kawunganten.cilacapkab.go.id">babakan-kawunganten.cilacapkab.go.id</a>
126	Bojong	<a href="http://bojong-kawunganten.cilacapkab.go.id">bojong-kawunganten.cilacapkab.go.id</a>
127	Bringkeng	<a href="http://bringkeng-kawunganten.cilacapkab.go.id">bringkeng-kawunganten.cilacapkab.go.id</a>
128	Grugu	<a href="http://grugu-kawunganten.cilacapkab.go.id">grugu-kawunganten.cilacapkab.go.id</a>
129	Kalijeruk	<a href="http://kalijeruk-kawunganten.cilacapkab.go.id">kalijeruk-kawunganten.cilacapkab.go.id</a>
130	Kawunganten	<a href="http://kawunganten.desa.id">kawunganten.desa.id</a>
141	Kawunganten Lor	<a href="http://kawungantenlor-kawunganten.cilacapkab.go.id">kawungantenlor-kawunganten.cilacapkab.go.id</a>
142	Kubangkangkung	<a href="http://kubangkangkung-kawunganten.cilacapkab.go.id">kubangkangkung-kawunganten.cilacapkab.go.id</a>
143	Mentasan	<a href="http://mentasan-kawunganten.cilacapkab.go.id">mentasan-kawunganten.cilacapkab.go.id</a>
144	Sarwadadi	<a href="http://sarwadadi-kawunganten.cilacapkab.go.id">sarwadadi-kawunganten.cilacapkab.go.id</a>
145	Sidaurip	<a href="http://sidaurip-kawunganten.cilacapkab.go.id">sidaurip-kawunganten.cilacapkab.go.id</a>
146	Bangunreja	<a href="http://bangunreja-kedungreja.cilacapkab.go.id">bangunreja-kedungreja.cilacapkab.go.id</a>
147	Bojongsari	<a href="http://bojongsari-kedungreja.cilacapkab.go.id">bojongsari-kedungreja.cilacapkab.go.id</a>
148	Ciklapa	<a href="http://ciklapa-kedungreja.cilacapkab.go.id">ciklapa-kedungreja.cilacapkab.go.id</a>
149	Kaliwungu	<a href="http://kaliwungu-kedungreja.cilacapkab.go.id">kaliwungu-kedungreja.cilacapkab.go.id</a>
150	Kedungreja	<a href="http://kedungreja-kedungreja.cilacapkab.go.id">kedungreja-kedungreja.cilacapkab.go.id</a>
151	Sidanegara	<a href="http://sidanegara-kedungreja.cilacapkab.go.id">sidanegara-kedungreja.cilacapkab.go.id</a>
152	Tambakreja	<a href="http://tambakreja-kedungreja.cilacapkab.go.id">tambakreja-kedungreja.cilacapkab.go.id</a>
153	Tambaksari	<a href="http://tambaksari-kedungreja.cilacapkab.go.id">tambaksari-kedungreja.cilacapkab.go.id</a>
154	Ciwuni	<a href="http://ciwuni-kesugihan.cilacapkab.go.id">ciwuni-kesugihan.cilacapkab.go.id</a>
155	Dondong	<a href="http://dondong-kesugihan.cilacapkab.go.id">dondong-kesugihan.cilacapkab.go.id</a>
156	Jangrana	<a href="http://jangrana-kesugihan.cilacapkab.go.id">jangrana-kesugihan.cilacapkab.go.id</a>
157	Kalisabuk	<a href="http://kalisabuk-kesugihan.cilacapkab.go.id">kalisabuk-kesugihan.cilacapkab.go.id</a>
158	Karangjengkol	<a href="http://karangjengkol-kesugihan.cilacapkab.go.id">karangjengkol-kesugihan.cilacapkab.go.id</a>
159	Karangkandri	<a href="http://karangkandri-kesugihan.cilacapkab.go.id">karangkandri-kesugihan.cilacapkab.go.id</a>
160	Keleng	<a href="http://keleng-kesugihan.cilacapkab.go.id">keleng-kesugihan.cilacapkab.go.id</a>
161	Kesugihan	<a href="http://kesugihan-kesugihan.cilacapkab.go.id">kesugihan-kesugihan.cilacapkab.go.id</a>
162	Kesugihan Kidul	<a href="http://kesugihankidul-kesugihan.cilacapkab.go.id">kesugihankidul-kesugihan.cilacapkab.go.id</a>
163	Kuripan	<a href="http://kuripan-kesugihan.cilacapkab.go.id">kuripan-kesugihan.cilacapkab.go.id</a>
164	Kuripan Kidul	<a href="http://kuripankidul-kesugihan.cilacapkab.go.id">kuripankidul-kesugihan.cilacapkab.go.id</a>
165	Menganti	<a href="http://menganti-kesugihan.cilacapkab.go.id">menganti-kesugihan.cilacapkab.go.id</a>
166	Pesanggrahan	<a href="http://pesanggrahan-kesugihan.cilacapkab.go.id">pesanggrahan-kesugihan.cilacapkab.go.id</a>
167	Planjan	<a href="http://planjan-kesugihan.cilacapkab.go.id">planjan-kesugihan.cilacapkab.go.id</a>
168	Slarang	<a href="http://slarang-kesugihan.cilacapkab.go.id">slarang-kesugihan.cilacapkab.go.id</a>
169	Ayamalas	<a href="http://ayamalas-kroya.cilacapkab.go.id">ayamalas-kroya.cilacapkab.go.id</a>

170	Bajing	<a href="http://bajiing-kroya.cilacapkab.go.id">bajiing-kroya.cilacapkab.go.id</a>
171	Bajing Kulon	<a href="http://bajingkulon-kroya.cilacapkab.go.id">bajingkulon-kroya.cilacapkab.go.id</a>
172	Buntu	<a href="http://buntu-kroya.cilacapkab.go.id">buntu-kroya.cilacapkab.go.id</a>
173	Gentasari	<a href="http://gentasari-kroya.cilacapkab.go.id">gentasari-kroya.cilacapkab.go.id</a>
174	Karangmangu	<a href="http://karangmangu-kroya.cilacapkab.go.id">karangmangu-kroya.cilacapkab.go.id</a>
175	Karangturi	<a href="http://karangturi-kroya.cilacapkab.go.id">karangturi-kroya.cilacapkab.go.id</a>
176	Kedawung	<a href="http://kedawung-kroya.cilacapkab.go.id">kedawung-kroya.cilacapkab.go.id</a>
177	Kroya	<a href="http://kroya-kroya.cilacapkab.go.id">kroya-kroya.cilacapkab.go.id</a>
178	Mergawati	<a href="http://mergawati-kroya.cilacapkab.go.id">mergawati-kroya.cilacapkab.go.id</a>
179	Mujur	<a href="http://mujur-kroya.cilacapkab.go.id">mujur-kroya.cilacapkab.go.id</a>
180	Mujur Lor	<a href="http://mujurlor-kroya.cilacapkab.go.id">mujurlor-kroya.cilacapkab.go.id</a>
182	Pekuncen	<a href="http://pekuncen-kroya.cilacapkab.go.id">pekuncen-kroya.cilacapkab.go.id</a>
183	Pesanggrahan	<a href="http://pesanggrahan-kroya.cilacapkab.go.id">pesanggrahan-kroya.cilacapkab.go.id</a>
184	Pucung Kidul	<a href="http://pucungkidul-kroya.cilacapkab.go.id">pucungkidul-kroya.cilacapkab.go.id</a>
185	Pucung Lor	<a href="http://pucunglor-kroya.cilacapkab.go.id">pucunglor-kroya.cilacapkab.go.id</a>
186	Sikampusih	<a href="http://sikampusih-kroya.cilacapkab.go.id">sikampusih-kroya.cilacapkab.go.id</a>
187	Bener	<a href="http://bener-majenang.cilacapkab.go.id">bener-majenang.cilacapkab.go.id</a>
188	Boja	<a href="http://boja-majenang.cilacapkab.go.id">boja-majenang.cilacapkab.go.id</a>
189	Cibeunying	<a href="http://cibeunying-majenang.cilacapkab.go.id">cibeunying-majenang.cilacapkab.go.id</a>
190	Cilopadang	<a href="http://cilopadang-majenang.cilacapkab.go.id">cilopadang-majenang.cilacapkab.go.id</a>
191	Jenang	<a href="http://jenang-majenang.cilacapkab.go.id">jenang-majenang.cilacapkab.go.id</a>
192	Mulyadadi	<a href="http://mulyadadi-majenang.cilacapkab.go.id">mulyadadi-majenang.cilacapkab.go.id</a>
193	Mulyasari	<a href="http://mulyasari-majenang.cilacapkab.go.id">mulyasari-majenang.cilacapkab.go.id</a>
194	Padangjaya	<a href="http://padangjaya-majenang.cilacapkab.go.id">padangjaya-majenang.cilacapkab.go.id</a>
195	Padangsari	<a href="http://padangsari-majenang.cilacapkab.go.id">padangsari-majenang.cilacapkab.go.id</a>
196	Pahonjean	<a href="http://pahonjean-majenang.cilacapkab.go.id">pahonjean-majenang.cilacapkab.go.id</a>
197	Pengadegan	<a href="http://pengadegan-majenang.cilacapkab.go.id">pengadegan-majenang.cilacapkab.go.id</a>
198	Sadahayu	<a href="http://sadahayu-majenang.cilacapkab.go.id">sadahayu-majenang.cilacapkab.go.id</a>
199	Salebu	<a href="http://salebu-majenang.cilacapkab.go.id">salebu-majenang.cilacapkab.go.id</a>
200	Sepatnunggal	<a href="http://sepatnunggal-majenang.cilacapkab.go.id">sepatnunggal-majenang.cilacapkab.go.id</a>
201	Sindangsari	<a href="http://sindangsari-majenang.cilacapkab.go.id">sindangsari-majenang.cilacapkab.go.id</a>
202	Ujung Barang	<a href="http://ujungbarang-majenang.cilacapkab.go.id">ujungbarang-majenang.cilacapkab.go.id</a>
203	Glempang	
204	Kalijaran	<a href="http://kalijaran-maos.cilacapkab.go.id">kalijaran-maos.cilacapkab.go.id</a>
205	Karang Kemiri	<a href="http://karangkemiri-maos.cilacapkab.go.id">karangkemiri-maos.cilacapkab.go.id</a>
206	Karangreja	<a href="http://karangreja-maos.cilacapkab.go.id">karangreja-maos.cilacapkab.go.id</a>
207	Klapagada	<a href="http://klapagada-maos.cilacapkab.go.id">klapagada-maos.cilacapkab.go.id</a>
208	Maos Kidul	<a href="http://maoskidul-maos.cilacapkab.go.id">maoskidul-maos.cilacapkab.go.id</a>
209	Maos Lor	<a href="http://maoslor-maos.cilacapkab.go.id">maoslor-maos.cilacapkab.go.id</a>
210	Mernek	<a href="http://mernek-maos.cilacapkab.go.id">mernek-maos.cilacapkab.go.id</a>
211	Panisihan	<a href="http://panisihan-maos.cilacapkab.go.id">panisihan-maos.cilacapkab.go.id</a>
212	Banjareja	<a href="http://banjareja-nusawungu.cilacapkab.go.id">banjareja-nusawungu.cilacapkab.go.id</a>
213	Banjarsari	<a href="http://banjarsari-nusawungu.cilacapkab.go.id">banjarsari-nusawungu.cilacapkab.go.id</a>

214	Banjarwaru	<a href="http://banjarwaru-nusawungu.cilacapkab.go.id">banjarwaru-nusawungu.cilacapkab.go.id</a>
215	Danasri Kidul	<a href="http://danasrikidul-nusawungu.cilacapkab.go.id">danasrikidul-nusawungu.cilacapkab.go.id</a>
216	Danasri Lor	<a href="http://danasrilor-nusawungu.cilacapkab.go.id">danasrilor-nusawungu.cilacapkab.go.id</a>
217	Danasri	<a href="http://danasri-nusawungu.cilacapkab.go.id">danasri-nusawungu.cilacapkab.go.id</a>
218	Jetis	<a href="http://jetis-nusawungu.cilacapkab.go.id">jetis-nusawungu.cilacapkab.go.id</a>
219	Karangpakis	<a href="http://karangpakis-nusawungu.cilacapkab.go.id">karangpakis-nusawungu.cilacapkab.go.id</a>
220	Karangputat	<a href="http://karangputat-nusawungu.cilacapkab.go.id">karangputat-nusawungu.cilacapkab.go.id</a>
221	Karangsembung	<a href="http://karangsembung-nusawungu.cilacapkab.go.id">karangsembung-nusawungu.cilacapkab.go.id</a>
222	Karangtawang	<a href="http://karangtawang-nusawungu.cilacapkab.go.id">karangtawang-nusawungu.cilacapkab.go.id</a>
223	Karangbenda	<a href="http://kedungbenda-nusawungu.cilacapkab.go.id">kedungbenda-nusawungu.cilacapkab.go.id</a>
224	Klumprit	<a href="http://klumprit-nusawungu.cilacapkab.go.id">klumprit-nusawungu.cilacapkab.go.id</a>
225	Nusawungu	<a href="http://nusawungu-nusawungu.cilacapkab.go.id">nusawungu-nusawungu.cilacapkab.go.id</a>
226	Purwodadi	<a href="http://purwodadi-nusawungu.cilacapkab.go.id">purwodadi-nusawungu.cilacapkab.go.id</a>
227	Sikanco	<a href="http://sikanco-nusawungu.cilacapkab.go.id">sikanco-nusawungu.cilacapkab.go.id</a>
228	Bulupayung	<a href="http://bulupayung-patimuan.cilacapkab.go.id">bulupayung-patimuan.cilacapkab.go.id</a>
229	Cimrutu	<a href="http://cimrutu-patimuan.cilacapkab.go.id">cimrutu-patimuan.cilacapkab.go.id</a>
230	Cinyawang	<a href="http://cinyawang-patimuan.cilacapkab.go.id">cinyawang-patimuan.cilacapkab.go.id</a>
231	Patimuan	<a href="http://patimuan-patimuan.cilacapkab.go.id">patimuan-patimuan.cilacapkab.go.id</a>
232	Purwadadi	<a href="http://purwadadi-patimuan.cilacapkab.go.id">purwadadi-patimuan.cilacapkab.go.id</a>
233	Sidamukti	<a href="http://sidamukti-patimuan.cilacapkab.go.id">sidamukti-patimuan.cilacapkab.go.id</a>
234	Brani	<a href="http://brani-sampang.cilacapkab.go.id">brani-sampang.cilacapkab.go.id</a>
235	Karangasem	<a href="http://karangasem-sampang.cilacapkab.go.id">karangasem-sampang.cilacapkab.go.id</a>
236	Karangjati	<a href="http://karangjati-sampang.cilacapkab.go.id">karangjati-sampang.cilacapkab.go.id</a>
237	Karantengah	<a href="http://karantengah-sampang.cilacapkab.go.id">karantengah-sampang.cilacapkab.go.id</a>
238	Ketanggung	<a href="http://ketanggung-sampang.cilacapkab.go.id">ketanggung-sampang.cilacapkab.go.id</a>
239	Nusajati	<a href="http://nusajati-sampang.cilacapkab.go.id">nusajati-sampang.cilacapkab.go.id</a>
240	Paberasan	<a href="http://paberasan-sampang.cilacapkab.go.id">paberasan-sampang.cilacapkab.go.id</a>
241	Paketingan	<a href="http://paketingan-sampang.cilacapkab.go.id">paketingan-sampang.cilacapkab.go.id</a>
242	Sampang	<a href="http://sampang-sampang.cilacapkab.go.id">sampang-sampang.cilacapkab.go.id</a>
243	Sidasari	<a href="http://sidasari-sampang.cilacapkab.go.id">sidasari-sampang.cilacapkab.go.id</a>
244	Gunungreja	<a href="http://gunungreja-sidareja.cilacapkab.go.id">gunungreja-sidareja.cilacapkab.go.id</a>
245	Karang Gedang	<a href="http://karanggedang-sidareja.cilacapkab.go.id">karanggedang-sidareja.cilacapkab.go.id</a>
246	Kunci	<a href="http://kunci-sidareja.cilacapkab.go.id">kunci-sidareja.cilacapkab.go.id</a>
247	Penyarang	<a href="http://penyarang-sidareja.cilacapkab.go.id">penyarang-sidareja.cilacapkab.go.id</a>
248	Sidamulya	<a href="http://sidamulya-sidareja.cilacapkab.go.id">sidamulya-sidareja.cilacapkab.go.id</a>
249	Sidareja	<a href="http://sidareja-sidareja.cilacapkab.go.id">sidareja-sidareja.cilacapkab.go.id</a>
250	Tegalsari	<a href="http://tegalsari-sidareja.cilacapkab.go.id">tegalsari-sidareja.cilacapkab.go.id</a>
251	Tinggarjaya	<a href="http://tinggarjaya-sidareja.cilacapkab.go.id">tinggarjaya-sidareja.cilacapkab.go.id</a>
252	Adimulya	<a href="http://adimulya-wanareja.cilacapkab.go.id">adimulya-wanareja.cilacapkab.go.id</a>
253	Bantar	<a href="http://bantar-wanareja.cilacapkab.go.id">bantar-wanareja.cilacapkab.go.id</a>
254	Cigintung	<a href="http://cigintung-wanareja.cilacapkab.go.id">cigintung-wanareja.cilacapkab.go.id</a>
255	Cilongkrang	<a href="http://cilongkrang-wanareja.cilacapkab.go.id">cilongkrang-wanareja.cilacapkab.go.id</a>
256	Limbangan	<a href="http://limbangan-wanareja.cilacapkab.go.id">limbangan-wanareja.cilacapkab.go.id</a>

257	Madura	<a href="http://madura-wanareja.cilacapkab.go.id">madura-wanareja.cilacapkab.go.id</a>
258	Madusari	<a href="http://madusari-wanareja.cilacapkab.go.id">madusari-wanareja.cilacapkab.go.id</a>
259	Majingklak	<a href="http://majingklak-wanareja.cilacapkab.go.id">majingklak-wanareja.cilacapkab.go.id</a>
260	Malabar	<a href="http://malabar-wanareja.cilacapkab.go.id">malabar-wanareja.cilacapkab.go.id</a>
261	Palugon	<a href="http://palugon-wanareja.cilacapkab.go.id">palugon-wanareja.cilacapkab.go.id</a>
262	Purwasari	<a href="http://purwasari-wanareja.cilacapkab.go.id">purwasari-wanareja.cilacapkab.go.id</a>
263	Sidamulya	<a href="http://sidamulya-wanareja.cilacapkab.go.id">sidamulya-wanareja.cilacapkab.go.id</a>
264	Tambaksari	<a href="http://tambaksari-wanareja.cilacapkab.go.id">tambaksari-wanareja.cilacapkab.go.id</a>
265	Tarisi	<a href="http://tarisi-wanareja.cilacapkab.go.id">tarisi-wanareja.cilacapkab.go.id</a>
266	Wanareja	<a href="http://wanareja-wanareja.cilacapkab.go.id">wanareja-wanareja.cilacapkab.go.id</a>
267	Bulupayung	<a href="http://bulupayung.desa.id">bulupayung.desa.id</a>
268	Rawaapu	<a href="http://rawaapu.desa.id">rawaapu.desa.id</a>
269	Bumireja	<a href="http://bumireja.desa.id">bumireja.desa.id</a>

Tabel 17. Daftar Website Puskesmas Kabupaten Cilacap

NO	PUSKESMAS	WEBSITE
1	Puskesmas Kroya 1	<a href="http://kroya1puskesmas.cilacapkab.go.id">kroya1puskesmas.cilacapkab.go.id</a>
2	Puskesmas Kroya 2	<a href="http://puskesmaskroya2.cilacapkab.go.id">puskesmaskroya2.cilacapkab.go.id</a>
3	Puskesmas Cipari	<a href="http://puskesmascipari.cilacapkab.go.id">puskesmascipari.cilacapkab.go.id</a>
4	Puskesmas Cimanggu 1	<a href="http://puskesmascimanggu1.cilacapkab.go.id">puskesmascimanggu1.cilacapkab.go.id</a>
5	Puskesmas Cimanggu 2	<a href="http://puskesmascimanggu2.cilacapkab.go.id">puskesmascimanggu2.cilacapkab.go.id</a>
6	Puskesmas Binangun	<a href="http://puskesmasbinangun.cilacapkab.go.id">puskesmasbinangun.cilacapkab.go.id</a>
7	Puskesmas Bantarsari	<a href="http://puskesmasbantarsari.cilacapkab.go.id">puskesmasbantarsari.cilacapkab.go.id</a>
8	Puskesmas Wanareja 1	<a href="http://puskesmaswanareja1.cilacapkab.go.id">puskesmaswanareja1.cilacapkab.go.id</a>
9	Puskesmas Wanareja 2	<a href="http://puskesmaswanareja2.cilacapkab.go.id">puskesmaswanareja2.cilacapkab.go.id</a>
10	Puskesmas Sidareja	<a href="http://puskesmassidareja.cilacapkab.go.id">puskesmassidareja.cilacapkab.go.id</a>
11	Puskesmas Sampang	<a href="http://puskesmassampang.cilacapkab.go.id">puskesmassampang.cilacapkab.go.id</a>
12	Puskesmas Patimuan	<a href="http://puskesmaspatimuan.cilacapkab.go.id">puskesmaspatimuan.cilacapkab.go.id</a>
13	Puskesmas Nusawungu 1	<a href="http://puskesmasnusawungu1.cilacapkab.go.id">puskesmasnusawungu1.cilacapkab.go.id</a>
14	Puskesmas Nusawungu 2	<a href="http://puskesmasnusawungu2.cilacapkab.go.id">puskesmasnusawungu2.cilacapkab.go.id</a>
15	Puskesmas Maos	<a href="http://puskesmasmaos.cilacapkab.go.id">puskesmasmaos.cilacapkab.go.id</a>
16	Puskesmas Majenang 1	<a href="http://puskesmasmajenang1.cilacapkab.go.id">puskesmasmajenang1.cilacapkab.go.id</a>
17	Puskesmas Majenang 2	<a href="http://puskesmasmajenang2.cilacapkab.go.id">puskesmasmajenang2.cilacapkab.go.id</a>
18	Puskesmas Kesugihan 1	<a href="http://puskesmaskesugihan1.cilacapkab.go.id">puskesmaskesugihan1.cilacapkab.go.id</a>
19	Puskesmas Kesugihan 2	<a href="http://puskesmaskesugihan2.cilacapkab.go.id">puskesmaskesugihan2.cilacapkab.go.id</a>
20	Puskesmas Kedungreja	<a href="http://puskesmaskedungreja.cilacapkab.go.id">puskesmaskedungreja.cilacapkab.go.id</a>

21	Puskesmas Adipala 1	<a href="mailto:puskesmasadipala1.cilacapkab.go.id">puskesmasadipala1.cilacapkab.go.id</a>
22	Puskesmas Adipala 2	<a href="mailto:puskesmasadipala2.cilacapkab.go.id">puskesmasadipala2.cilacapkab.go.id</a>
23	Puskesmas Cilacap Selatan 1	<a href="mailto:puskesmascilacapselatan1.cilacapkab.go.id">puskesmascilacapselatan1.cilacapkab.go.id</a>
24	Puskesmas Cilacap Selatan 2	<a href="mailto:puskesmascilacapselatan2.cilacapkab.go.id">puskesmascilacapselatan2.cilacapkab.go.id</a>
25	Puskesmas Cilacap Tengah 1	<a href="mailto:puskesmascilacaptengah1.cilacapkab.go.id">puskesmascilacaptengah1.cilacapkab.go.id</a>
26	Puskesmas Cilacap Tengah 2	<a href="mailto:puskesmascilacaptengah2.cilacapkab.go.id">puskesmascilacaptengah2.cilacapkab.go.id</a>
27	Puskesmas Cilacap Utara 1	<a href="mailto:puskesmascilacaputara1.cilacapkab.go.id">puskesmascilacaputara1.cilacapkab.go.id</a>
28	Puskesmas Cilacap Utara 2	<a href="mailto:puskesmascilacaputara2.cilacapkab.go.id">puskesmascilacaputara2.cilacapkab.go.id</a>
29	Puskesmas Dayeuhluhur 1	<a href="mailto:puskesmasdayeuhluhur1.cilacapkab.go.id">puskesmasdayeuhluhur1.cilacapkab.go.id</a>
30	Puskesmas Dayeuhluhur 2	<a href="mailto:puskesmasdayeuhluhur2.cilacapkab.go.id">puskesmasdayeuhluhur2.cilacapkab.go.id</a>
31	Puskesmas Gandrungmangu 1	<a href="mailto:puskesmasgandrungmangu1.cilacapkab.go.id">puskesmasgandrungmangu1.cilacapkab.go.id</a>
32	Puskesmas Gandrungmangu 2	<a href="mailto:puskesmasgandrungmangu2.cilacapkab.go.id">puskesmasgandrungmangu2.cilacapkab.go.id</a>
33	Puskesmas Jeruklegi 1	<a href="mailto:puskesmasjeruklegi1.cilacapkab.go.id">puskesmasjeruklegi1.cilacapkab.go.id</a>
34	Puskesmas Jeruklegi 2	<a href="mailto:puskesmasjeruklegi2.cilacapkab.go.id">puskesmasjeruklegi2.cilacapkab.go.id</a>
35	Puskesmas Kampung Laut	<a href="mailto:puskesmaskampunglaut.cilacapkab.go.id">puskesmaskampunglaut.cilacapkab.go.id</a>
36	Puskesmas Karangpucung 1	<a href="mailto:puskesmaskarangpucung1.cilacapkab.go.id">puskesmaskarangpucung1.cilacapkab.go.id</a>
37	Puskesmas Karangpucung 2	<a href="mailto:puskesmaskarangpucung2.cilacapkab.go.id">puskesmaskarangpucung2.cilacapkab.go.id</a>
38	Puskesmas Kawunganten	<a href="mailto:puskesmaskawunganten.cilacapkab.go.id">puskesmaskawunganten.cilacapkab.go.id</a>

Tabel 18. Daftar Email Puskesmas Kabupaten Cilacap

NO	PUSKESMAS	EMAIL
1	Puskesmas Kroya 1	kroya1puskesmas@cilacapkab.go.id
2	Puskesmas Kroya 2	puskesmaskroya2@cilacapkab.go.id
3	Puskesmas Cipari	puskesmascipari@cilacapkab.go.id
4	Puskesmas Cimanggu 1	puskesmascimanggu1@cilacapkab.go.id
5	Puskesmas Cimanggu 2	puskesmascimanggu2@cilacapkab.go.id
6	Puskesmas Binangun	puskesmasbinangun@cilacapkab.go.id
7	Puskesmas Bantarsari	puskesmasbantarsari@cilacapkab.go.id
8	Puskesmas Wanareja 1	puskesmaswanareja1@cilacapkab.go.id
9	Puskesmas Wanareja 2	puskesmaswanareja2@cilacapkab.go.id

10	Puskesmas Sidareja	puskesmassidareja@cilacapkab.go.id
11	Puskesmas Sampang	puskesmassampang@cilacapkab.go.id
12	Puskesmas Patimuan	puskesmaspatimuan@cilacapkab.go.id
13	Puskesmas Nusawungu 1	puskesmasnusawungu1@cilacapkab.go.id
14	Puskesmas Nusawungu 2	puskesmasnusawungu2@cilacapkab.go.id
15	Puskesmas Maos	puskesmasmaos@cilacapkab.go.id
16	Puskesmas Majenang 1	puskesmasmajenang1@cilacapkab.go.id
17	Puskesmas Majenang 2	puskesmasmajenang2@cilacapkab.go.id
18	Puskesmas Kesugihan 1	puskesmaskesugihan1@cilacapkab.go.id
19	Puskesmas Kesugihan 2	puskesmaskesugihan2@cilacapkab.go.id
20	Puskesmas Kedungreja	puskesmaskedungreja@cilacapkab.go.id
21	Puskesmas Adipala 1	puskesmasadipala1@cilacapkab.go.id
22	Puskesmas Adipala 2	puskesmasadipala2@cilacapkab.go.id
23	Puskesmas Cilacap Selatan 1	puskesmascilacapselatan1@cilacapkab.go.id
24	Puskesmas Cilacap Selatan 2	puskesmascilacapselatan2@cilacapkab.go.id
25	Puskesmas Cilacap Tengah 1	puskesmascilacaptengah1@cilacapkab.go.id
26	Puskesmas Cilacap Tengah 2	puskesmascilacaptengah2@cilacapkab.go.id
27	Puskesmas Cilacap Utara 1	puskesmascilacaputara1@cilacapkab.go.id
28	Puskesmas Cilacap Utara 2	puskesmascilacaputara2@cilacapkab.go.id
29	Puskesmas Dayeuhluhur 1	puskesmasdayeuhluhur1@cilacapkab.go.id
30	Puskesmas Dayeuhluhur 2	puskesmasdayeuhluhur2@cilacapkab.go.id
31	Puskesmas Gandrungmangu 1	puskesmasgandrungmangu1@cilacapkab.go.id
32	Puskesmas Gandrungmangu 2	puskesmasgandrungmangu2@cilacapkab.go.id
33	Puskesmas Jeruklegi 1	puskesmasjeruklegi1@cilacapkab.go.id
34	Puskesmas Jeruklegi 2	puskesmasjeruklegi2@cilacapkab.go.id
35	Puskesmas Kampung Laut	puskesmaskampunglaut@cilacapkab.go.id
36	Puskesmas Karangpucung 1	puskesmaskarangpucung1@cilacapkab.go.id
37	Puskesmas Karangpucung 2	puskesmaskarangpucung2@cilacapkab.go.id
38	Puskesmas Kawunganten	puskesmaskawunganten@cilacapkab.go.id

## BAB VI

### VISI DAN MISI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CILACAP

Rencana Pembangunan daerah di Kabupaten Cilacap yang akan dilaksanakan dalam empat tahun ke depan merupakan penjabaran Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah.

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah di era otonomi. Rencana pembangunan daerah yang komprehensif akan memberikan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan pembangunan yang tepat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di daerah. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat terselenggara secara terarah, efektif dan efisien serta mampu mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan bagi perangkat daerah, dukungan dunia usaha dan partisipasi masyarakat di daerah.

Agar dapat diimplementasikan dalam program dan kegiatan pembangunan daerah, yang mana Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah disusun karena Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

RPD tahun 2023-2026 merupakan RPD penjabaran dari periode keempat RPJPD Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025.

#### A. VISI

Peraturan Bupati Cilacap Nomor 27 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026. RPD tahun 2023-2026 merupakan RPD penjabaran dari periode keempat RPJPD Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025. Visi pembangunan jangka panjang daerah adalah:

“Cilacap yang Berbudaya dan Sejahtera”

Visi Pembangunan Kabupaten Cilacap 20 tahun ke depan diharapkan mampu mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat dengan tetap mengacu pada kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Disamping itu visi Kabupaten Cilacap tidak lepas dari Visi dalam RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah karena penyusunan RPJMD Kabupaten disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan RPJPD Provinsi. Visi Pembangunan harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat berbudaya dan kesejahteraan yang ingin dicapai.

Makna yang termuat dalam Visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. “Berbudaya” mengandung maksud masyarakat Kabupaten Cilacap yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan

beradab serta mandiri berdasarkan falsafah Pancasila

- b. “Kesejahteraan” terdiri dari dan mengandung maksud Kemajuan Daerah, Keadilan dan kemakmuran. Tingkat kemajuan suatu daerah dinilai berdasarkan berbagai ukuran. Ditinjau dari indikator sosial, tingkat kemajuan suatu Negara diukur dari kualitas sumber daya manusianya. Suatu daerah dikatakan makin maju apabila sumber daya manusianya memiliki kepribadian daerah, berakhlak mulia, dan berkualitas pendidikan yang tinggi.

## B. MISI

Misi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Cilacap diwujudkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2023-2026 ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

1. Mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai luhur serta kerukunan antarumat beragama ditandai dengan hubungan antar masyarakat yang harmonis dan saling menghormati. Misi ini dapat dilaksanakan dengan cara melalui peningkatan budaya disiplin, budaya tertib hukum dan budaya hidup yang baik pada setiap individu dalam masyarakat; budaya disiplin dan tingginya etos kerja aparatur pemerintah daerah serta mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang profesional. Budaya dalam konteks lain adalah dengan cara memperkuat jati diri dan karakter masyarakat Cilacap yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; patuh dan taat aturan hukum; memelihara kerukunan serta toleransi masyarakat dan antarumat beragama; mengembangkan semangat kekeluargaan; menegakkan norma-norma sosial, kesopanan, kesusilaan dan norma-norma agama; melaksanakan interaksi antarbudaya; mengembangkan kehidupan sosial kemasyarakatan; menerapkan nilai-nilai luhur Kabupaten
2. Menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, ditandai dengan makin pendeknya mata rantai Pembenahan struktur kelembagaan untuk mencapai kinerja pelayanan publik yang prima berbasis pada partisipasi masyarakat dan kemampuan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat adalah langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi ini. Disamping itu perlu adanya pemberdayaan dan perwujudan aparatur pemerintah yang profesional dan bersih, serta ditunjang oleh sarana dan prasarana pelayanan secara memadai dalam rangka menuju tata pemerintahan yang baik. Perbaiki pengelolaan keuangan

daerah bertumpu pada sistem anggaran yang akuntabel dan transparan, bertanggung jawab, dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan. Pengelolaan keuangan daerah akan terus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan kapasitas keuangan pemerintah daerah, sehingga dengan meningkatkan volume perputaran keuangan daerah dan terwujudnya optimalisasi fungsi lembaga pengelolaan keuangan daerah.

3. Penegakan supremasi hukum dalam rangka menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, ditandai dengan pemberian sanksi atau tindakan tegas terhadap aparat yang melakukan Pembinaan struktur kelembagaan dan meningkatkan budaya tertib hukum; tidak diskriminatif, berkeadilan dan berkesetaraan gender, memperhatikan upaya pemenuhan hak-hak anak dan memihak pada rakyat kecil merupakan wujud nyata penegakan supremasi hukum. Hal tersebut juga dilakukan melalui peningkatan partisipasi dan pendidikan politik rakyat serta profesionalisme aparat dan penegak hukum; pemenuhan kebutuhan sarana utama serta membangun pengawasan dan mekanisme kontrol lembaga penegak hukum, mengoptimalkan program pemberantasan dan pencegahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
4. Menciptakan stabilitas politik dan keamanan sebagai pendukung iklim investasi dan peningkatan perekonomian. Upaya untuk menyeimbangkan peran dan keharmonisan hubungan antara eksekutif dan legislatif merupakan tujuan yang perlu dicapai oleh pemerintah. Partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam mewujudkan stabilitas politik dan keamanan ditujukan agar para pemodal tertarik untuk menanamkan investasi di Kabupaten Cilacap, sehingga perekonomian daerah menjadi lebih dinamis.
5. Memaksimalkan potensi daerah melalui peningkatan daya saing yang Misi ini merupakan wujud nyata peningkatan peran pemerintah melalui pengembangan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan seluruh potensi daerah serta pengembangan sentra-sentra industri yang berdasarkan demokrasi ekonomi agar produk yang dihasilkan mempunyai keunggulan komparatif dan mempunyai daya saing yang tinggi.
6. Meningkatkan kualitas ekonomi rakyat melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada dengan memperhatikan aspek keseimbangan pelestarian. Harapan untuk dapat terwujudnya usaha memaksimalkan sumber daya alam dan

peningkatan kualitas sumber daya manusia yang didasarkan pada keseimbangan ekosistem dan pelestarian sumber daya alam melalui penerapan teknologi tepat guna merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi. Peran masyarakat dalam pembangunan pada akhirnya menjadi kunci terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

7. Membangun infrastruktur yang dapat menunjang pembangunan. Infrastruktur sangat dibutuhkan untuk terlaksananya suatu kegiatan. Infrastruktur dapat berupa hard infrastructure berupa fasilitas-fasilitas fisik, maupun soft infrastructure berupa aturan-aturan sebagai produk hukum yang dibutuhkan masyarakat untuk menunjang Ketersediaan Infrastruktur yang berkualitas baik berupa fasilitas fisik maupun produk hukum secara memadai, menjadi tuntutan yang harus dipenuhi guna menjamin terlaksananya proses pembangunan. Pengadaan infrastruktur yang dibutuhkan dalam pembangunan tidak harus semuanya mengandalkan pembiayaan dari pemerintah. Pembiayaan bisa dilakukan dalam bentuk kerjasama pemerintah dengan pihak lain, ataupun swadaya masyarakat.
8. Mewujudkan pembangunan yang memperhatikan aspek tata ruang yang menunjang kesejahteraan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap yang telah ditetapkan. Aspek tata ruang dalam pembangunan merupakan aspek yang sangat Wilayah yang dibangun dengan mempertimbangkan tata ruang yang ada secara baik dan benar akan menjamin terjadinya sinergi yang positif antar ruang yang ada; antar masyarakat, antar sumber daya ekonomi, dan aspek polusi yang ditimbulkan. Sebaliknya, akan terjadi sinergi yang negatif jika pembangunan yang dilakukan tidak mempertimbangkan tata ruang yang ada.
9. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, ditandai dengan semakin banyaknya masyarakat yang terlibat dalam proses pembangunan. Konsep bahwa masyarakat yang paling paham tentang kebutuhannya, mengharuskan adanya partisipasi masyarakat dalam penyusunan produk perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, maupun dalam pembiayaannya. Perencanaan terpusat yang bersifat top-down akan menjauhkan masyarakat dari realitas Paradigma baru dalam perencanaan pembangunan menghendaki perencanaan berbasis masyarakat

dengan pendekatan *bottom-up*. Perencanaan yang *bottom-up* akan mendekatkan masyarakat dengan kebutuhan yang ada, masyarakat merasa memiliki perencanaan tersebut, kemudian merasa bertanggung jawab sehingga akan terjadi *check and balance* secara langsung dari segenap masyarakat yang terlibat, akibatnya kelemahan-kelemahan dari pelaksanaan dan perencanaan yang ada dapat segera diketahui.

### C. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Agar Visi dan Misi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Cilacap diwujudkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2023-2026 ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah terarah dalam implementasinya ke depan, maka Visi dan Misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif, dengan sasaran:
  - a. meningkatnya birokrasi yang akuntabel;
  - b. meningkatnya birokrasi yang kapabel;
  - c. meningkatnya kualitas pelayanan publik;
  - d. meningkatnya kualitas inovasi daerah dan kelitbangan dalam pembangunan
2. Tujuan 2 : Meningkatkan Stabilitas Keamanan Ketentraman Wilayah, dengan sasaran menurunnya gangguan keamanan di wilayah
3. Tujuan 3 : Meningkatkan Kesejahteraan dan Daya Saing Masyarakat, dengan sasaran :
  - a. meningkatnya kualitas pendidikan;
  - b. meningkatnya kualitas derajat kesehatan;
  - c. meningkatnya kesetaraan, keadilan gender dan anak;
  - d. meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat
4. Tujuan 4 : Meningkatkan Kualitas Perekonomian Daerah Berbasis Kekuatan Lokal, dengan sasaran :
5. Tujuan 5 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur, dengan sasaran

sebagai berikut:

- a. meningkatnya kualitas kebinamargaan;
  - b. meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang;
  - c. terwujudnya pemenuhan universal akses;
  - d. meningkatnya capaian reforma agraria;
  - e. meningkatnya pengelolaan irigasi kewenangan kabupaten;
  - f. meningkatnya kinerja perhubungan.
6. Tujuan 6 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Kawasan Strategis Perdesaan, dengan sasaran meningkatnya kemandirian dan pembangunan di wilayah perdesaan
  7. Tujuan 7 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
  8. Tujuan 8 : Meningkatkan Pengelolaan Kebencanaan, dengan sasaran meningkatnya kesiapsiagaan bencana di setiap desa/kelurahan

Tabel 16. Sasaran dan Tujuan Kabupaten Cilacap

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran
Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan(governance) : bersih, transparan, kolaboratif, demokratis, dan akuntabel	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel Meningkatnya birokrasi yang Kapabel Meningkatnya kualitas pelayanan Publik Meningkatnya kualitas inovasi daerah dan kelitbangan dalam pembangunan
	Meningkatkan stabilitas keamanan ketentraman wilayah	Menurunnya gangguan keamanan di wilayah
Belum optimalnya kualitas SDM yang berdaya saing dan berinovasi	Meningkatkan Kesejahteraan Dan Daya Saing Masyarakat	Meningkatnya kualitas pendidika Meningkatnya kualitaspendidikan Meningkatnya kualitas derajat kesehatan

		masyarakat Meningkatnya kesetaraan, keadilan gender dan anak
Belum terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan Kesejahteraan Dan Daya Saing Masyarakat	1. Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cilacap belum optimal.	Meningkatkan Kualitas Perekonomian Daerah Berbasis Kekuatan Lokal	Meningkatnya kontribusi industri pengolahan dalam pertumbuhan ekonomi Meningkatnya kontribusi pertanian dalam pertumbuhan ekonomi Meningkatnya investasi dalam penanaman modal Meningkatnya pertumbuhan perdagangan, dan Usaha mikro Kecil Meningkatnya pengembangan pariwisata daerah dan ekonomi kreatif
Belum terpenuhinya infrastruktur yang memadai; pengembangan kawasan strategis dan kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya kualitas kebinamarg an Meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang Terwujudnya pemenuhan universal akses Meningkatnya Capaian Reforma Agraria Meningkatnya pengelolaan irigasi kewenangan Kabupaten Meningkatnya kinerja perhubungan

	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Kawasan Strategis Perdesaan	Meningkatnya kemandirian dan pembangunan di wilayah pedesaan
	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Pengelolaan dan Penanganan Bencana yang belum optimal	Meningkatkan Pengelolaan Bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana di setiap desa/ kelurahan

BAB VII  
TARGET PENGEMBANGAN SPBE KABUPATEN CILACAP

A. Target Indeks SPBE

Dinas Komunikasi, Informatika (Diskominfo) Kabupaten Cilacap berperan sebagai “IT” nya Kabupaten Cilacap. Peran yang bisa diambil oleh Diskominfo adalah sebagai *support* dan *enabler*. *Support* berarti memberi bantuan dan *handling* jika terjadi permasalahan terkait penggunaan teknologi informasi, sedangkan *enabler* berarti menjadikan setiap bisnis proses di pemerintahan menjadi efektif, efisien dan ekonomis.

Target pengembangan SPBE Kabupaten Cilacap selaras dengan rencana strategis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diamanahkan oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Rencana strategis tersebut berisi berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE Daerah dan diuraikan dalam tahapan rencana strategis, deskripsi inisiatif strategis, arsitektur teknologi informasi dan komunikasi, serta rencana strategis.

Berdasarkan hasil penilaian Indeks SPBE Kabupaten Cilacap tahun 2022, target pengembangan SPBE selama 4 tahun mulai tahun 2023 – 2026 adalah meningkatkan indeks SPBE dari nilai 2,87 (Baik) menjadi lebih meningkat lagi.

Detail target pengembangan indeks SPBE di Kabupaten Cilacap dapat dilihat di tabel 17 berikut.

*Tabel 17. Target Pengembangan Indeks SPBE*

Domain/Aspek	Nilai Indeks SPBE Tahun 2022	Target Nilai Indeks SPBE Tahun 2026	Uraian Target
Domain Tata Kelola SPBE	4,30	4,40	
Perencanaan Strategis SPBE	2,00	3,00	Penyusunan Arsitektur SPBE, Penyusunan peta jalan SPBE, Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE, Penyusunan Inovasi Proses Bisnis
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,00	3,00	Adanya Layanan Pusat Data, Pembanguna Aplikasi SPBE, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan

Penyelenggara SPBE	2,50	3,00	Penyusunan Rencana Aksi Tim Koordinasi SPBE dan Pembentukan Tim Kolaborasi SPBE
Domain Manajemen SPBE	1,00	3,00	
Penerapan Manajemen SPBE	1,00	3,00	Menyusun manajemen resiko SPBE, Manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset TIK, manajemen SDM, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan dan manajemen layanan SPBE.
Audit TIK	1,00	3,00	Melakukan audit infrastruktur SPBE, audit aplikasi SPBE, audit keamanan SPBE.
Domain Layanan SPBE	3,56	3,60	
Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik	3,60	3,60	Melakukan monitoring evaluasi dan pengembangan layanan SPBE
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,50	3,60	Melakukan monitoring evaluasi dan pengembangan layanan SPBE
INDEK SPBE	2,87	3,34	Baik

Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik	2,60	3,50	Melakukan monitoring evaluasi dan pengembangan layanan SPBE
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,33	4,00	Melakukan monitoring evaluasi dan pengembangan layanan SPBE
INDEK SPBE	2,87	3,45	Baik

## B. Target Kualitatif Penerapan SPBE

Pengembangan SPBE Kabupaten Cilacap dapat dilihat di gambar yang terdiri dari 4 domain , yaitu:

### - Kebijakan SPBE

Inisiatif Strategis : Penyusunan perda atau perbup yang mengatur tentang kebijakan yang mengatur tentang arsitektur, peta jalan, manajemen data, pembangunan aplikasi, layanan pusat data, layanan jaringan intra, penggunaan sistem penghubung layanan, kebijakan keamanan informasi, evaluasi kebijakan SPBE, Pembentukan kebijakan Tim Koordinasi.

### - Tata Kelola SPBE

Inisiatif strategis : Penyusunan arsitektur SPBE, peta jalan SPBE, keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan inovasi proses bisnis. Penyusunan Tata Kelola (SOP, Petunjuk Teknis) tentang layanan pusat data, pembangunan aplikasi SPBE, layanan jaringan intra. Penggunaan sistem penghubung layanan. Pengembangan TIK (pembangunan aplikasi, layanan pusat data, layanan jaringan intradan pengguna sistem penghubung. Penyusunan Rencana Aksi Tim Koordinasi dan pembentukan tim kolaborasi SPBE.

### - Manajemen SPBE

Inisiatif strategis : Menyusun manajemen risiko SPBE, Manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset TIK, manajemen SDM, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan dan manajemen layanan SPBE.

### - Layanan SPBE

Inisiatif strategis : Melakukan monitoring evaluasi dan pengembangan layanan SPBE, survey pengguna layanan SPBE, pengembangan fitur layanan kepegawaian,

pengembangan fitur e-kinerja, pembuatan aplikasi pengelolaan data penduduk miskin, pemanfaatan layanan perizinan secara menyeluruh.

#### B.1. Kebijakan SPBE

Inisiatif strategis pengembangan SPBE untuk kategori kebijakan SPBE terdiri dari :

1. Menyusun dan mengevaluasi kebijakan yang mengatur tentang arsitektur, peta jalan, manajemen data, pembangunan aplikasi, layanan pusat data, layanan jaringan intra, penggunaan sistem penghubung layanan, kebijakan keamanan informasi. Pembuatan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati tentang SPBE akan menguatkan secara regulasi dan legitimasi program, kepastian anggaran dan payung hukum yang berdampak pada program yang berkelanjutan.

Evaluasi penerapan kebijakan SPBE meliputi :

- a. Evaluasi penerapan kebijakan SPBE bertujuan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE di Kabupaten Cilacap.
  - b. Evaluasi SPBE dilakukan secara menyeluruh yang mencakup sedikitnya domain kebijakan, tata kelola, dan Layanan SPBE;
  - c. Pelaksanaan evaluasi SPBE secara daerah dikoordinasikan oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE Daerah.
  - d. Setiap instansi OPD di Kabupaten Cilacap dapat melakukan evaluasi SPBE secara periodik dan mandiri.
  - e. Evaluasi SPBE juga dapat dilakukan melalui kegiatan Audit TIK.
2. Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE
    - a. Tim koordinasi SPBE perlu dibentuk yang diketuai oleh Sekretaris Daerah;
    - b. Tim koordinasi SPBE diberi tugas untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE yang terpadu di dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap, serta melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Provinsi dan Nasional untuk

- pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- c. Kapasitas tim koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap perlu diperkuat/ditingkatkan dalam hal kepemimpinan, pengetahuan, dan praktik terbaik SPBE antara lain melalui sosialisasi, diskusi, pelatihan, dan studi banding;
  - d. Menyusun Rencana Kerja Tim Koordinasi SPBE.

## B.2. Tata Kelola SPBE

Inisiatif Strategis pengembangan SPBE untuk kategori Tata Kelola SPBE, terdiri dari :

### B.2.1. Perencanaan strategis SPBE

#### 1. Penyusunan Arsitektur SPBE,

Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, Infrastruktur, Aplikasi, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan yang terintegrasi.

Jenis Arsitektur SPBE terdiri atas :

- a. Arsitektur Proses Bisnis
- b. Arsitektur Layanan
- c. Arsitektur Data
- d. Arsitektur Aplikasi
- e. Arsitektur Infrastruktur
- f. Arsitektur Keamanan

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang disusun oleh masing-masing Pemerintah Daerah dan digunakan sebagai pedoman untuk keterpaduan pelaksanaan SPBE di antar instansi OPD.

Arsitektur SPBE yang disusun oleh masing-masing instansi OPD dan digunakan sebagai pedoman

untuk keterpaduan pelaksanaan SPBE di masing-masing instansi OPD. Pembangunan sistem

arsitektur SPBE diperlukan untuk mengelola informasi terkait arsitektur SPBE Kabupaten Cilacap agar memudahkan dalam pengelolaan arsitektur SPBE Kabupaten Cilacap.

#### 2. Penyusunan peta jalan SPBE

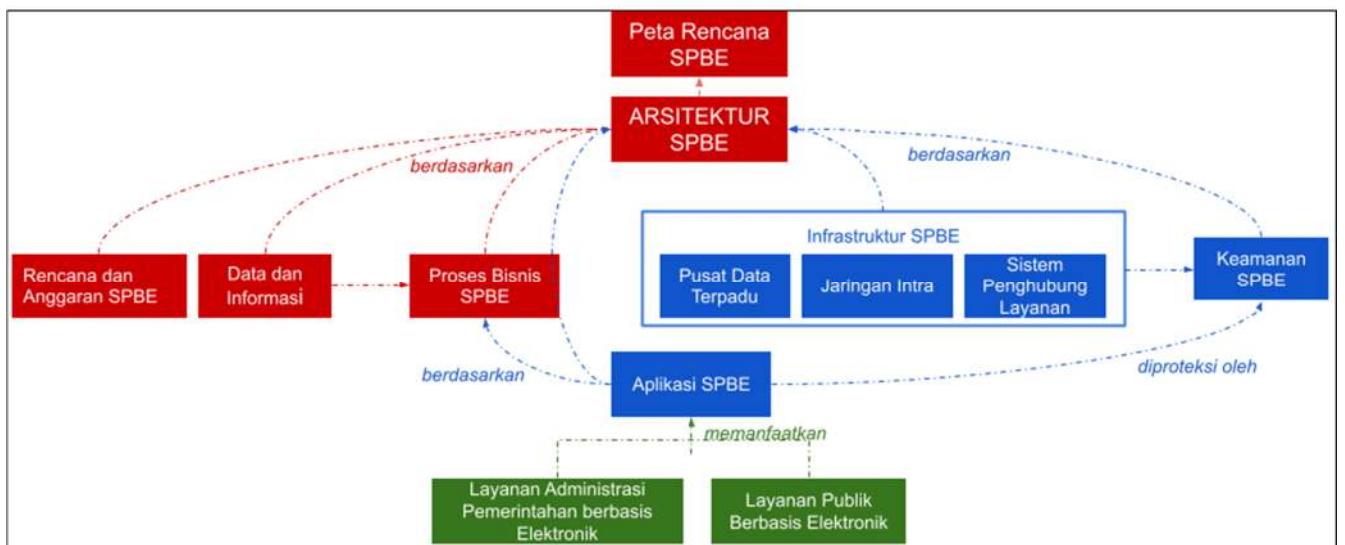
Berdasarkan analisis kesenjangan SPBE Kabupaten

Cilacap, selanjutnya dilakukan tahapan perencanaan pengembangan SPBE untuk mencapai target yang diinginkan selama 5 tahun ke depan.

### 3. Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE

Menganalisa bahwa SPBE adalah sebuah sistem yang saling terkait, sehingga kekurangan yang belum dipenuhi dapat dilihat prioritas dan perannya. Berikut adalah keterpaduan unsur SPBE. Keterpaduan tersebut dimulai dari :

1. Diawali dengan penyediaan layanan terpadu baik administrasi pemerintahan atau publik, yang semuanya berbasis elektronik
2. Sebuah layanan, dapat berjalan secara elektronik dengan memanfaatkan aplikasi
3. Aplikasi dibuat berdasarkan proses bisnis yang telah terdefinisi
4. Aplikasi diproteksi oleh keamanan SPBE
5. Aplikasi dibuat sesuai dengan Arsitektur SPBE
6. Infrastruktur dibuat sesuai dengan Arsitektur SPBE
7. Infrastruktur diproteksi oleh keamanan SPBE
8. Data dan Informasi dibuat sesuai dengan Arsitektur SPBE
9. Data dan Informasi mendukung berjalannya proses bisnis
10. Keamanan SPBE dibuat sesuai dengan Arsitektur SPBE
11. Rencana dan Anggaran dibuat sesuai dengan Arsitektur SPBE
12. Arsitektur SPBE dibuat atas arah dan kebijakan yang tertera dalam peta jalan SPBE
13. peta jalan SPBE daerah dibuat selaras dengan RPJMD dan peta jalan SPBE Nasional



## Gambar Keterpaduan Unsur SPBE

Yang menjadi faktor kunci bagi Kabupaten Cilacap adalah ketersediaan Arsitektur SPBE Cilacap, yang akan menjadi sentral penerapan SPBE dan dengan ketersediaan anggaran SPBE.

1. Penyusunan Inovasi Proses Bisnis/Peta Proses Bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antara unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
2. Penyusunan tata kelola (SOP, Petunjuk Teknis) tentang Layanan Pusat Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan.

### B.2.2. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Inisiatif strategis pengembangan SPBE untuk kategori Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri dari:

1. Kematangan pembangunan aplikasi  
Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai
  - a. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai dilakukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK khususnya pembangunan Aplikasi SPBE dan memudahkan integrasi proses bisnis pemerintahan.
  - b. Strategi untuk mencapai optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai adalah dengan menggunakan teknologi layanan yang mampu melakukan bagi pakai aplikasi umum SPBE seperti teknologi komputasi awan.
2. Kematangan Layanan Pusat Data
  - a. Pusat Data merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data bagi instansi daerah di Kabupaten Cilacap;
  - b. Penyediaan Pusat Data ditujukan untuk memberikan

kemudahan bagi OPD untuk mendapatkan layanan Pusat Data dan meningkatkan efisiensi biaya melalui pemanfaatan bersama Pusat Data di Kabupaten Cilacap;

- c. Penyediaan Pusat Data dapat dilakukan dengan memprioritaskan pemanfaatan Pusat Data yang telah tersedia di Diskominfo yang memenuhi standar Pusat Data;
- d. Pusat Data diarahkan menggunakan teknologi komputasi awan sehingga bagi pakai data, aplikasi, dan infrastruktur dapat dilakukan.

### 3. Penyediaan Jaringan Intra

- a. Jaringan Intra pemerintah merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam pemerintah.
- b. Penggunaan Jaringan Intra pemerintah ditujukan untuk menjaga keamanan dalam melakukan koordinasi dan komunikasi pemerintahan antar simpul jaringan dalam bentuk digital seperti suara, file, teks, dan format data lainnya.
- c. Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap yang menghubungkan jaringan di dalam pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap.
- d. Penyediaan Jaringan Intra pemerintah dapat dilakukan dengan memanfaatkan Jaringan Intra yang telah tersedia dan jaringan pita lebar yang diamankan (*Virtual Private Network*).

### 4. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

- a. Sistem Penghubung Layanan pemerintah merupakan perangkat integrasi/ penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam bentuk antarmuka pemrograman aplikasi;
- b. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE dan melakukan integrasi Layanan SPBE;
- c. Sistem Penghubung Layanan pemerintah dapat menghubungkan data, sistem aplikasi, layanan, dan kanal-kanal perangkat IoT;

- d. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah mensyaratkan adanya standar interoperabilitas, standar keamanan, dan akses melalui Jaringan Intra pemerintah.

### B.2.3. Penyelenggara SPBE

1. Penyusunan Rencana Aksi Tim Koordinasi SPBE dan Pembentukan Tim Kolaborasi SPBE.
2. Pembentukan Tim kolaborasi SPBE.
3. Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara Pemerintah dengan Non Pemerintah.
4. Forum kolaborasi SPBE merupakan wadah informal untuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE bagi Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat.
5. Forum kolaborasi SPBE dapat dimanfaatkan untuk antara lain :
  - a. penyampaian ide/ gagasan SPBE;
  - b. pengembangan infrastruktur dan Aplikasi SPBE dari kontribusi komunitas TIK;
  - c. peningkatan kompetensi teknis;
  - d. perbaikan kualitas Layanan SPBE;
  - e. penelitian dan kajian pengembangan SPBE; dan
  - f. penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama.
6. Forum kolaborasi SPBE dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan informal dan pertemuan virtual.

## C. Manajemen SPBE

### C.1. Penerapan Manajemen SPBE

Serangkaian penerapan manajemen SPBE mengacu pada pedoman manajemen SPBE yang dikeluarkan oleh peraturan menteri dan peraturan badan, serta berpedoman pada Standar Nasional Indonesia atau Standar Internasional.

Penerapan Manajemen SPBE antara lain:

a. Manajemen Risiko SPBE

Manajemen Risiko bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE. Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.

b. Manajemen Keamanan Informasi

Manajemen keamanan informasi bertujuan untuk menjamin keamanan dan keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi. Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.

c. Manajemen Data

Manajemen data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data;

d. Manajemen Aset TIK

Manajemen aset TIK bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE. Manajemen aset TIK dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.

e. Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE

Manajemen sumber daya manusia SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE. Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses

perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE. Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE. Peningkatan kapasitas ASN pelaksana SPBE dapat dilakukan antara lain melalui :

- 1) Pengembangan pola rekrutmen yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ataupun Standar Kompetensi Kerja Internasional;
- 2) pengembangan standar kompetensi teknis SPBE;
- 3) pengembangan pola karir pegawai ASN melalui pengembangan jabatan fungsional yang terkait dengan SPBE;
- 4) pengembangan pola remunerasi untuk pegawai ASN di bidang SPBE; dan
- 5) pengembangan kompetensi teknis melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi.

f. Manajemen Pengetahuan

Manajemen pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE. Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.

g. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE. Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.

h. Manajemen Layanan SPBE

Manajemen layanan SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada pengguna SPBE. Manajemen layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan

pengguna SPBE, pengoperasian layanan SPBE, dan pengelolaan aplikasi SPBE. Pengoperasian layanan SPBE merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan infrastruktur dan aplikasi SPBE, dan pengelolaan aplikasi SPBE merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE.

## C.2. Audit TIK, meliputi :

### 1. Audit Infrastruktur SPBE

Lingkup dari audit infrastruktur SPBE adalah tata kelola dan fungsionalitas kinerja infrastruktur yang dikelompokkan menjadi pusat data, jaringan intra pemerintahan, dan sistem pengembangan layanan.

### 2. Audit Aplikasi SPBE

Audit aplikasi mencakup aplikasi umum dan aplikasi khusus SPBE. Aplikasi umum adalah aplikasi yang sama, standar, dan digunakan secara berbagi pakai oleh instansi pusat dan /atau dalam daerah. Aplikasi umum ditentukan KemenPAN RB. Sedangkan aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, digunakan, dikembangkan dan dikelola oleh instansi pusat atau daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat/ instansi pemerintah dalam daerah. Lingkup dari audit aplikasi adalah tata kelola, manajemen, dan fungsionalitas kinerja aplikasi.

### 3. Audit Keamanan SPBE

Audit Keamanan SPBE dapat dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan dan instrumen yang disusun oleh BSSN. Peraturan tersebut memuat standar dan tata cara dalam melaksanakan Audit Keamanan SPBE, sedangkan instrumen memuat kriteria keamanan minimal yang perlu dilakukan audit. Peraturan dan instrumen dapat diakses pada <https://bssn.go.id/audit-keamanan-spbe> Hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan audit keamanan SPBE adalah menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan / kompetensi tentang instrumen, standar dan tata cara pelaksanaan audit keamanan SPBE. Instansi diharapkan sudah menerapkan Manajemen

Keamanan, bisa melalui SMPI ataupun SMKI, atau Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

#### D. Layanan SPBE

Layanan SPBE merupakan keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Inisiatif strategis pengembangan SPBE untuk kategori Layanan SPBE terdiri dari :

##### 1. Survey Pengguna SPBE

- a. Survei Pengguna SPBE merupakan upaya untuk mengetahui kebutuhan Pengguna SPBE dan kepuasan Pengguna SPBE terhadap Layanan SPBE;
- b. Survei Pengguna SPBE ditujukan untuk memastikan Layanan SPBE yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan harapan;
- c. Survei Pengguna SPBE dilakukan oleh masing-masing instansi OPD Kabupaten Cilacap.

##### 2. Portal Layanan Publik Terintegrasi

- a. Portal pelayanan publik dibangun untuk mengintegrasikan layanan publik berbasis elektronik agar memudahkan pengguna mengakses layanan pemerintah;
- b. Jenis portal pelayanan publik terdiri atas portal pelayanan publik Kabupaten Cilacap yang terdiri atas pelayanan publik semua instansi pemerintah daerah Kabupaten Cilacap
- c. Portal pelayanan publik berisi layanan publik berbasis elektronik dari sektor strategis atau kebutuhan pengguna yang mendesak. Sektor strategis mencakup sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya;
- d. Portal pelayanan publik dapat terdiri satu rumpun pelayanan publik, sebagai contoh portal perizinan terpadu dan portal pelayanan kependudukan terpadu. Selain itu, portal pelayanan publik dapat terdiri dari rumpun pelayanan publik yang berbeda, sebagai contoh

semua layanan publik perangkat daerah di Kabupaten Cilacap diintegrasikan ke dalam satu portal Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap;

- e. Portal pelayanan publik yang terintegrasi mensyaratkan dibangunnya pengintegrasian Proses Bisnis, pengintegrasian data, pengintegrasian Layanan SPBE, dan penerapan Keamanan SPBE;
- f. Agar portal pelayanan publik dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal email, kanal web, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung IoT (*Internet of Things*);
- g. Percepatan penerapan portal pelayanan publik dapat dilakukan dengan pendekatan penerapan Aplikasi Umum berbagi pakai.

### 3. Portal Layanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi

- a. Portal pelayanan administrasi pemerintahan dibangun untuk mengintegrasikan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar memudahkan ASN mengakses pelayanan administrasi pemerintahan;
- b. Layanan administrasi pemerintahan mencakup bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan;
- c. Portal pelayanan administrasi pemerintahan mensyaratkan dibangunnya pengintegrasian Proses Bisnis, pengintegrasian Data, pengintegrasian Layanan SPBE, dan penerapan Keamanan SPBE termasuk akses portal yang diamankan melalui Jaringan Intra pemerintah atau jaringan lain yang telah diamankan;
- d. Agar portal pelayanan administrasi pemerintahan dapat diakses oleh pegawai ASN, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal email, kanal web, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung IoT;
- e. Percepatan penerapan portal pelayanan administrasi pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan penerapan Aplikasi Umum berbagi pakai.

#### 4. Penyelenggaraan Manajemen Layanan

- a. Penyelenggaraan manajemen Layanan SPBE ditujukan untuk memberikan dukungan terhadap layanan publik berbasis elektronik dan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar Layanan SPBE tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan, berkualitas, responsif, dan adaptif;
- b. Manajemen layanan merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE agar Layanan SPBE dapat berjalan berkesinambungan dan berkualitas;
- c. Penyelenggaraan manajemen layanan dapat diwujudkan dengan membangun portal pusat layanan untuk menjalankan proses :
  - 1) pengelolaan keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari pengguna;
  - 2) pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE;
  - 3) pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi.
- d. Agar portal pusat pelayanan dapat diakses oleh pengguna, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal *email*, kanal *web*, kanal *mobile*, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung *Internet of Things (IoT)*.

#### 5. Pembangunan Portal Data Daerah

- a. Portal data daerah merupakan pintu gerbang transparansi pemerintah melalui keterbukaan dan pertukaran data antar instansi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat;
- b. Portal data daerah ditujukan untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia;
- c. Pembangunan portal data daerah mensyaratkan terbangunnya antara lain manajemen portal data, repositori data, standar interoperabilitas, sistem keamanan, dan sistem penghubung layanan sehingga dapat dilakukan pertukaran data dari mesin ke mesin.

6. Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk Pengambilan keputusan

- a. Teknologi kecerdasan buatan merupakan kemampuan mesin yang memiliki fungsi kognitif untuk melakukan pembelajaran dan pemecahan masalah sebagaimana halnya dilakukan manusia;
- b. Teknologi ini dapat diterapkan pada layanan administrasi pemerintahan untuk mengurangi beban kerja administrasi dan pada layanan publik untuk memecahkan permasalahan yang kompleks;
- c. Kecerdasan buatan didukung oleh teknologi *big data analytics* untuk menghasilkan informasi analisis dari data yang besar, tidak terstruktur, dan kompleks. Hasil analisis big data dimanfaatkan oleh mesin kecerdasan buatan untuk pembelajaran kondisi yang kompleks;
- d. Pengembangan teknologi kecerdasan buatan dan *big data* diarahkan untuk menghasilkan layanan berbasis teknologi berbagi pakai.

BAB VIII  
ANALISIS KESENJANGAN

8.1 Domain Kebijakan

Kebijakan merupakan landasan yang menjadi acuan dalam kegiatan dan program yang akan dilakukan. Kebijakan akan terdiri dari Definisi, Pemutakhiran, Tujuan, Ruang Lingkup, Cakupan, Kebijakan, Peran dan Tanggung Jawab. Kebijakan pastinya masih harus diturunkan menjadi suatu SOP (*Standar Operational Procedure*) dan Instruksi Kerja yang akan memudahkan eksekusi di lapangan. Dalam Kebijakan Internal SPBE, terdiri dari 1 jenis aspek kebijakan, yaitu :  
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

*Tabel 18. Analisa Kesenjangan Domain Kebijakan*

No	Aspek	Aktual	Target	Kesenjangan
1	Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	Ada, sudah menyeluruh dan belum dilaksanakan sepenuhnya	Ada, menyeluruh dan dilaksanakan sepenuhnya	Disosialisasikan dan dilaksanakan sepenuhnya

8.2 Domain Tata Kelola

Tata kelola adalah memastikan bahwa target dan tujuan dapat tercapai dengan baik. Komponen dari Tata Kelola adalah target, stakeholder, perencanaan dan enabler (TIK). Target dan sasaran SPBE telah terdefiniskan, adanya lembaga yang bertugas untuk mengarahkan dan melaksanakan SPBE, adanya program kerja dalam waktu tertentu untuk mewujudkan target, serta adanya alat bantu atau enabler berupa TIK yang mempermudah pencapaian target yang telah ditetapkan. Domain tata kelola terdiri dari 3 aspek yaitu :

1. Perencanaan strategis SPBE
2. Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan
3. Penyelenggaraan SPBE

Tabel 19. Analisa Kesenjangan Domain Tata Kelola

No	Aspek	Aktual	Target	Kesenjangan
1	Perencanaan strategis	Belum memiliki peta jalan, Keterpaduan perencanaan dan penganggaran serta inovasi proses bisnis	Ada , disahkan & disosialisasikan	Perlu dibuat dan disosialisasikan
2	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Memiliki, baru sebagian kecil	Ada, Menyeluruh	Perlu dibangun, dikembangkan, dan dikelola
3	Penyelenggaraan SPBE	Sudah ada Tim Koordinasi dan Kolaborasi namun belum dilaksanakan secara maksimal Tim Kolaborasi masih blm mempunyai program kerja	Ada dengan program kerja terencana	Perlu disusun program kerja tim koordinasi SPBE & dan tim kolaborasi

### 8.3 Domain Manajemen

Tabel 20. Analisa Kesenjangan Domain Manajemen

No	Aspek	Aktual	Target	Kesenjangan
1	Penerapan Manajemen SPBE	Sudah memiliki Manajemen Risiko SPBE, Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Data ,  Belum memiliki Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Manajemen Pengetahuan, Penerapan Manajemen Perubahan, dan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	Ada, disahkan & disosialisasikan,	Perlu dibuat dan disosialisasikan

2	Audit TIK	sudah menjalankan Audit TIK terkait Pelaksanaan Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi, dan Audit Keamanan SPBE, namun belum tercantum dalam peta jalan	Ada, disahkan	Perlu dilaksanakan secara terencana
---	-----------	--	---------------	-------------------------------------

#### 8.4 Domain Layanan

Layanan terpadu merupakan *output* dari SPBE yang akan dinikmati oleh masyarakat. Keterpaduan memiliki makna adanya *single entry* dan proses bisnis yang tersambung dalam suatu konteks tertentu. Kontek tersebut dapat berupa layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan perencanaan pembangunan, layanan tata naskah dinas dan lainnya. Kontek merupakan turunan dari visi misi dan sasaran strategis pembangunan yang tertuang dalam RPD dan juga terhubung dalam RPJMN.

Tabel 21. Analisis Kesenjangan Domain Layanan

No	Aspek	Aktual	Target	Kesenjangan
1	Layanan Administrasi Pemerintahan	Belum seluruh layanan terintegrasi dalam suatu proses bisnis dengan <i>single entry</i>	Layanan Terintegrasi dalam suatu portal	Membangun integrasi dengan pilihan integrasi fungsi, integrasi aplikasi atau integrasi data
2	Layanan Publik	Belum seluruh layanan terintegrasi dalam suatu proses bisnis dengan <i>single entry</i>	Layanan Terintegrasi dalam suatu portal	Membangun integrasi dengan pilihan integrasi fungsi, integrasi aplikasi atau integrasi data

## BAB IX PETA JALAN SPBE KABUPATEN CILACAP

Berdasarkan analisis kesenjangan bersumber dari kondisi aktual dan target pengembangan SPBE Kabupaten Cilacap, selanjutnya dilakukan tahapan perencanaan pengembangan SPBE untuk mencapai target yang diinginkan selama 4 tahun ke depan. Tahapan rencana strategis pengembangan SPBE Kabupaten Cilacap terdiri dari:

- Tahapan penguatan Fondasi SPBE Tahun 2023; dan
- Tahapan pengembangan SPBE Tahun 2024 – 2026.

Tahapan penguatan fondasi SPBE dilaksanakan tahun 2023 dan difokuskan pada penguatan tata kelola SPBE, infrastruktur SPBE, dan percepatan SPBE sebagai fondasi pelaksanaan SPBE yang terpadu dan menyeluruh. Capaian pada tahapan ini adalah tersedianya:

1. Arsitektur SPBE Kabupaten Cilacap;
2. Pembentukan dan Fungsi Kerja Tim Koordinasi SPBE Daerah;
3. Kebijakan pendukung pelaksanaan Peraturan Bupati tentang SPBE;
4. Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah;
5. Kapasitas SDM TIK (*Mindset*/Pola Pikir dan Kompetensi) penyelenggara SPBE;
6. Portal layanan publik, Portal administrasi pemerintahan, dan Portal data daerah;
7. Penerapan SPBE pada integrasi layanan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kepegawaian, kearsipan, dan pengaduan publik;
8. Manajemen Layanan SPBE;
9. Infrastruktur SPBE (Pusat Data dan Jaringan Interkoneksi Tertutup antar OPD);
10. Sistem Keamanan Informasi (identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi).

Tahapan pengembangan SPBE dilaksanakan Tahun 2024 - 2026 dan difokuskan pada peningkatan kualitas SPBE yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna Layanan SPBE. Pencapaian kualitas SPBE pada tahapan ini adalah :

1. Penguatan portal Layanan SPBE dan Pengembangan portal layanan SPBE berbasis kecerdasan buatan dan big data;
2. Peningkatan Jaringan Intra Pemerintah;
3. Peningkatan jumlah Layanan SPBE sesuai dengan kebutuhan pengguna;
4. Peningkatan kualitas keamanan informasi; dan
5. Peningkatan kapasitas SDM SPBE.

Tahapan-tahapan rencana strategis pengembangan SPBE Kabupaten Cilacap, selanjutnya dituangkan dalam peta jalan SPBE Kabupaten Cilacap mulai Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026. Berikut peta jalan SPBE Kabupaten Cilacap Tahun 2023 - 2026 dapat dilihat di tabel 22.

9.1 Peta Jalan SPBE Kabupaten Cilacap (2023 – 2026)














Tabel 22. peta jalan SPBE Kabupaten Cilacap (2023 – 2026)

No	Inisiatif Strategis	Target Keluaran	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan				
				2023	2024	2025	2026	
1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE							
1.1	Penguatan Kebijakan SPBE	1.1.1	Review Perbup Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPBE	Diskominfo, Bagian Organisasi, Bagian Hukum	✓	✓	✓	✓
		1.1.2	Reviu Perbup Arsitektur SPBE	Diskominfo, Bappeda, Bagian Organisasi, Bagian Hukum	✓	✓	✓	✓
		1.1.3	Perbup peta jalan SPBE	Diskominfo, Bagian Organisasi, Bagian Hukum	✓	✓	✓	✓
		1.1.4	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang tim Koordinasi SPBE Kabupaten Cilacap	Diskominfo, Bagian Organisasi, Bagian Hukum	✓	✓	✓	✓
2	Tata Kelola SPBE							
2.1	Perencanaan Strategis							
2.1.1.	Peta Jalan SPBE	2.1.1.1	Dokumen peta jalan SPBE	Diskominfo, Bagian Organisasi, Bappeda, Bagian Hukum	✓			
		2.1.1.2	Evaluasi dan optimalisasi penerapan peta jalan SPBE	Diskominfo, Bagian Organisasi, Bappeda, Bagian Hukum		✓	✓	✓

2.1.2	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Cilacap	2.1.2.1	Dokumen Arsitektur Proses Bisnis Kabupaten Cilacap	Bagian Organisasi dan Diskominfo	✓	✓		
		2.1.2.2	Dokumen Arsitektur Layanan Kabupaten Cilacap	Bagian Organisasi dan Diskominfo	✓	✓		
		2.1.2.3	Dokumen Arsitektur Data Kabupaten Cilacap	Bappeda dan Diskominfo	✓	✓		
		2.1.2.4	Dokumen Arsitektur Aplikasi Kabupaten Cilacap	Diskominfo dan OPD terkait	✓	✓		
		2.1.2.5	Dokumen Arsitektur Infrastruktur Kabupaten Cilacap	Diskominfo	✓	✓		
		2.1.2.6	Dokumen Arsitektur Keamanan Informasi Kabupaten Cilacap	Diskominfo	✓	✓		
2.1.3	Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	2.1.3.1	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang perencanaan dan penganggaran TIK	Bappeda BPKAD, Diskominfo, dan Bagian Hukum		✓		
		2.1.3.2	Keputusan Bupati ttg konsultasi rencana anggaran SPBE (kebijakan tentang konsultasi rencana anggaran SPBE OPD kepada OPD Pengelola TIK / Diskominfo)	Bappeda, BPPKAD, Diskominfo, dan Bagian Hukum	✓	✓		
2.1.4	Inovasi Proses Bisnis SPBE	2.1.4.1	Dokumen Inovasi Proses Bisnis SPBE	Bagian Organisasi	✓	✓		

2.2	Teknologi Informasi dan Komunikasi							
2.2.1	Pembangunan Aplikasi	2.2.1.1	Melaksanakan reviu dan evaluasi aplikasi secara periodik	Diskominfo dengan OPD terkait	✓	✓	✓	✓
		2.2.1.2	Melaksanakan konsultasi pembangunan aplikasi dengan OPD pengampu TIK	Diskominfo dengan OPD terkait	✓	✓	✓	✓
		2.2.1.3	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Pembangunan Aplikasi SPBE	Diskominfo, OPD Terkait, dan Bagian Hukum	✓	✓	✓	✓
2.2.2	Pengembangan Pusat Data Terpadu	2.2.2.	Dokumen DED pusat data terpadu	Diskominfo			✓	
		2.2.2.2	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Pusat Data	Diskominfo dan Bagian Hukum	✓	✓		
		2.2.2.3	Adanya pengembangan pusat data (baik berbasis pusat data nasional atau pengembangan yang ada) dengan standar internasional <i>data center</i>	Diskominfo, Bappeda, Bppkad		✓	✓	
2.2.3	Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.2.3.1	Adanya pengembangan jaringan interkoneksi tertutup antar OPD dan kelurahan	Diskominfo, Bappeda, BPPKAD	✓	✓	✓	✓
		2.2.3.2	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang	Diskominfo, OPD Terkait, Bagian Hukum				

			Pengoperasian Jaringan Intra instansi Pemerintah Daerah		✓	✓	✓	✓
2.2.4	Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	2.2.4.1	Adanya pengembangan sistem penghubung layanan pemerintah	Diskominfo dan OPD Terkait	✓	✓	✓	✓
2.2.5	Penyediaan akses berkualitas terhadap layanan SPBE	2.2.5.1	Tersedianya <i>bandwidth</i> yang memadai untuk tiap OPD dan koneksi internet di masyarakat	Diskominfo	✓	✓	✓	✓
2.2.6	Pengembangan layanan berbasis teknologi berbagi pakai	2.2.6.1	Tersedianya layanan <i>Cloud</i> untuk Kabupaten Cilacap	Diskominfo	✓	✓	✓	✓
2.2.7	Pembangunan Portal Data Daerah	2.2.7.1	Adanya pengembangan portal data Kabupaten Cilacap	Diskominfo dan Bappeda		✓	✓	
2.2.8	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah	2.2.8.1	Adanya Manajemen Keamanan Informasi	Diskominfo	✓	✓	✓	✓
		2.2.8.2	Penggunaan Teknologi Keamanan Informasi untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan ( <i>nonrepudiation</i> ) sumber daya terkait data dan informasi	Diskominfo	✓	✓	✓	✓

		2.2.8.3	Adanya budaya keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi ASN dan masyarakat	Diskominfo				
2.2.9	Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk pengambilan keputusan	2.2.9.1	Adanya penerapan Big Data Pemerintah Kabupaten Cilacap	Bappeda, Diskominfo, dan OPD terkait				
		2.2.9.2	Adanya penerapan <i>Machine Learning</i> untuk analisa data menuju kecerdasan buatan	Bappeda, Diskominfo, dan OPD terkait				
2.3	Penguatan Penyelenggara SPBE	2.3.1	Menyusun rencana program kerja tim koordinasi SPBE yang dikoordinasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh OPD	Tim Koordinasi SPBE				
		2.3.2	Membentuk tim kolaborasi SPBE yang melibatkan Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, Lembaga penelitian, pelaku usaha dan masyarakat	Tim Koordinasi SPBE				
3	Penerapan Manajemen SPBE							

3.1	Manajemen Risiko SPBE	3.1.1	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Risiko SPBE Diskominfo	Bagian Organisasi, Diskominfo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
		3.1.2	Penyusunan hasil tindak lanjut hasil evaluasi dan optimalisasi	Bagian Organisasi, Diskominfo		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		3.1.3	Penetapan Konteks Penetapan Risiko	Diskominfo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		3.1.4	Penyusunan laporan manajemen risiko SPBE secara periodik dan insidental	Diskominfo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		3.1.5	Sosialisasi Penerapan Manajemen Risiko pada seluruh OPD	Diskominfo		<input checked="" type="checkbox"/>		
		3.1.6	Penyusunan laporan manajemen risiko SPBE seluruh OPD di Pemkab Cilacap			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		3.1.7	Pelaksanaan Sosialisasi, Pelatihan dan Bimtek serta supervisi pelaksanaan manajemen risiko	Diskominfo, Inspektorat, Bappeda		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.2	Manajemen Keamanan Informasi	3.2.1	Pelaksanaan Audit indeks Kami lokus Diskominfo	Diskominfo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
		3.2.2	Penyusunan perencanaan program kerja/ business plan continuity Plan	Diskominfo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
		3.2.3	Sosialisasi agen perubahan untuk	Diskominfo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

			keamanan informasi di seluruh OPD					
		3.2.4	Penyusunan tim penanggung jawab SMPI	Diskominfo	✓	✓		
		3.2.5	Melakukan identifikasi dan pencatatan resiko (risk register) SMKI	Diskominfo	✓	✓	✓	✓
		3.2.6	Penyusunan standar teknis (SOP) pada ruang lingkup SMKI	Diskominfo		✓		
		3.2.7	Pembentukan tim CSIRT	Diskominfo		✓	✓	
		3.2.8	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanganan siber	Diskominfo		✓	✓	
		3.2.9	evaluasi kebijakan SMKI	Diskominfo	✓	✓		
		3.2.10	Penyusunan pedoman SMKI	Diskominfo	✓	✓		
		3.2.11	Penyusunan formulir daftar aset	Diskominfo		✓		
3.3	Manajemen Data	3.3.1	Penyusunan pedoman manajemen data	Bappeda, Diskominfo, BPS	✓	✓		
		3.3.2	Penyusunan dokumen pedoman manajemen data	Diskominfo, Bappada	✓	✓	✓	
		3.3.3	Penyusunan arsitektur data tingkat Pemkab Cilacap	Diskominfo, Bappeda	✓	✓		
		3.3.4	Pelaksanaan Forum Satu Data	Diskominfo	✓	✓	✓	

		3.3.5	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Manajemen Data	Bappeda, Diskominfo, BPS, dan Bagian Hukum		✓	✓	
		3.3.6	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Data	Bappeda, Diskominfo, BPS	✓	✓	✓	✓
3.4	Manajemen Aset TIK	3.4.1	Penyusunan pedoman manajemen Aset TIK	Bppkad, Diskominfo, dan Bagian Hukum		✓		
		3.4.2	Melakukan inventarisasi aset SPBE (data, informasi, aplikasi, infrastruktur) pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Diskominfo	✓			
		3.4.3	Menyusun pedoman yang mencakup proses perencanaan, pengadaan, pemanfaatan / penggunaan, dan penghapusan aset TIK	Diskominfo, BPPKAD	✓	✓	✓	
		3.4.4	Menyusun program dan kegiatan Manajemen Aset TIK	Diskominfo	✓			
		3.4.5	Penyusunan dokumen perencanaan Aset TIK Dinas Komunikasi dan Informatika	Diskominfo	✓			
		3.4.6	Penyusunan laporan pengadaan Aset TIK Diskominfo	Diskominfo	✓			
		3.4.7	Penyusunan laporan atas penghapusan aset TIK	Diskominfo	✓			

			Diskominfo					
		3.4.8	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Aset TIK	Diskominfo, BPPKAD			✓	
3.5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE	3.5.1	Adanya Standar Kompetensi SDM Teknis Penyelenggara SPBE (Proses Bisnis Pemerintahan, Arsitektur SPBE, Data dan Informasi, Keamanan SPBE, Aplikasi SPBE, Infrastruktur SPBE)	Diskominfo dan BKPPD	✓	✓	✓	✓
		3.5.2	Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Penyelenggara SPBE (Pranata Komputer)	BKPPD dan Diskominfo	✓	✓	✓	✓
		3.5.3	Pelatihan dan sertifikasi kompetensi lingkup SPBE pada Diskominfo	BKPPD dan Diskominfo	✓	✓	✓	✓
3.6	Manajemen Pengetahuan	3.6.1.	Mensosialisasikan penerapan manajemen pengetahuan kepada seluruh OPD.	BKPPD dan Diskominfo		✓	✓	✓
		3.6.2	Reviu dan evaluasi terhadap aplikasi manajemen pengetahuan	BKPPD dan Diskominfo	✓	✓	✓	✓
		3.6.3	Penyusunan dokumen manajemen pengetahuan Diskominfo	Diskominfo	✓			
		3.6.4	Penyusunan dokumen perencanaan manajemen	Diskominfo	✓			

			pengetahuan SPBE yang memuat Program Kerja berdasarkan kategori risiko SPBE dan target realisasinya oleh Diskominfo					
3.7	Manajemen Perubahan	3.7.1	Penyusunan Manajemen Perubahan	Bagian Organisasi	✓	✓	✓	✓
		3.7.2	Penyusunan SOP manajemen perubahan SPBE	Bagian Organisasi	✓			
		3.7.3	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen perubahan	Bagian Organisasi	✓	✓	✓	
3.8	Manajemen Layanan	3.8.1	Adanya manajemen layanan yang merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE supaya berkesinambungan dan berkualitas (Dokumen SOP Layanan, petunjuk penggunaan layanan SPBE, )	Bagian Organisasi dan OPD Terkait	✓	✓	✓	✓
		3.8.2	Adanya portal pusat layanan <i>service desk</i> terdiri dari layanan pengguna (keluhan/masalah, permintaan/perubahan	Diskominfo dan OPD Terkait	✓			
















			layanan), layanan infrastruktur (memastikan operasional layanan berjalan (perbaikan kerusakan) dan layanan pengembangan aplikasi baru					
		3.8.3	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang alur kerja terintegrasi antar OPD	Bagian Organisasi, Diskominfo dan Bagian Hukum	✓	✓	✓	✓
		3.8.4	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Peta Rencana SPBE	Diskominfo dan Bagian Hukum		✓	✓	✓
		3.8.5	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang integrasi sistem aplikasi	Diskominfo dan Bagian Hukum	✓	✓	✓	✓
		3.8.6	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang penggunaan aplikasi umum berbagi pakai	Diskominfo, Bagian Organisasi, dan Bagian Hukum	✓	✓	✓	✓
		3.8.7	Evaluasi Kebijakan tentang Sistem Naskah Dinas Elektronik	Bagian Organisasi, Diskominfo, dan Bagian Hukum	✓	✓		
		3.8.8	Evaluasi dan optimalisasi Kebijakan tentang Sistem Manajemen Kepegawaian	BKPPD, Bagian Organisasi, dan Bagian Hukum	✓	✓		
		3.8.10	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Sistem Manajemen Keuangan Daerah	BPPKAD dan Bagian Hukum	✓	✓		

		3.8.11	Penyusunan Kebijakan tentang layanan Manajemen kinerja	BKPPD, Bagian Organisasi dan Bagian Hukum	✓	✓		
		3.8.12	Evaluasi Kebijakan tentang Layanan Manajemen Kinerja	BKPPD, Bagian Organisasi dan Bagian Hukum			✓	✓
		3.8.13	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Sistem Layanan Pengadaan	Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Administrasi Pembangunan, Diskominfo, dan Bagian Hukum	✓	✓	✓	✓
		3.8.14	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Sistem Layanan Pengaduan Publik	Inspektorat, Diskominfo, Bagian Organisasi, dan Bagian Hukum	✓	✓	✓	✓
		3.8.15	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi	Bagian Hukum	✓	✓	✓	✓
		3.8.16	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Layanan <i>Whistle Blowing System</i>	Inspektorat, Diskominfo, dan Bagian Hukum		✓	✓	✓
		3.8.17	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Layanan Publik Pemerintah Daerah	Diskominfo, Bagian Organisasi, dan Bagian Hukum	✓	✓	✓	✓
		3.8.18	Menyusun Kebijakan tentang Arsitektur SPBE	Diskominfo, Bagian Organisasi, dan Bagian Hukum	✓	✓		

		3.8.19	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Arsitektur SPBE	Diskominfo, Bagian Organisasi, dan Bagian			✓	✓
		3.8.20	Penyediaan platform layanan perizinan online satu pintu melalui MPP	DPMPTSP, Bag Organisasi		✓		
3.9	Audit TIK	3.9.1	Menyusun kebijakan tentang Audit TIK	Diskominfo		✓	✓	
		3.9.2	Evaluasi hasil audit internal aplikasi dan infrastruktur	Diskominfo	✓			
		3.9.3	Menyusun program kerja / rencana audit infrastruktur SPBE	Diskominfo, dan Bagian Hukum	✓	✓	✓	✓
		3.9.4	Menyusun Pedoman Audit Aplikasi SPBE.	Diskominfo, Bagian Hukum		✓		
		3.9.5	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Audit TIK	Diskominfo, dan Bagian Hukum		✓	✓	✓
		3.9.6	Menyusun Pedoman Audit Keamanan SPBE.	Diskominfo, Bagian Hukum		✓		
		3.9.7	Menyusun program kerja / rencana audit Keamanan SPBE	Diskominfo, dan Bagian Hukum		✓	✓	✓
		3.9.8	Menyusun program kerja / rencana audit Keamanan SPBE	Diskominfo, dan Bagian Hukum	✓	✓	✓	✓
		3.8.9	Melaksanakan Audit TIK	Diskominfo, Inspektorat	✓	✓	✓	✓
4	Layanan SPBE							

4.1	Melakukan reviu dan evaluasi terhadap Manajemen Layanan SPBE	4.1.1	Survey Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna SPBE	Diskominfo dan OPD Terkait	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4.2	Membuat kebijakan tentang penggunaan layanan kominfo	4.2.1	Keputusan Kepala Diskominfo tentang penggunaan layanan kominfo	Diskominfo		<input checked="" type="checkbox"/>		
4.3	Portal Pelayanan Publik Terintegrasi	4.3.1	Adanya pembentukan integrasi proses bisnis pelayanan publik Kabupaten Cilacap	Bagian Organisasi, Diskominfo dan OPD terkait			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		4.3.2	Adanya portal pelayanan publik Kabupaten Cilacap	Diskominfo dan OPD terkait		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4.4	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi	4.4.1	Adanya pengembangan layanan kepegawaian	Bappeda, Bakeuda, Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Administrasi Pembangunan, dan Diskominfo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		4.4.2	Adanya pengembangan layanan pengawasan internal pemerintah	BKPPD, Bagian Organisasi, dan Diskominfo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		4.4.3	Adanya pengembangan layanan akuntabilitas	BKPPD, Bagian Organisasi, dan Diskominfo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		4.4.4	Adanya pengembangan integrasi Pengaduan Publik	Bagian Organisasi, Inspektorat, dan Diskominfo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

		4.4.5	Adanya portal pelayanan administrasi pemerintahan	Diskominfo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		4.4.6	Reviu dan evaluasi Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik	Bappeda, Diskominfo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		4.4.7	Melakukan reviu dan evaluasi Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik (SIMDA)	Bakeuda, Diskominfo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		4.4.8	Melakukan reviu dan evaluasi Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, sesuai dengan kebijakan terbaru (SIMDA)	Bakeuda, Diskominfo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		4.4.9	Melakukan reviu dan evaluasi Layanan Pengadaan Barang Jasa Berbasis Elektronik	Bagian Barang dan Jasa, Diskominfo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		4.4.10	Melakukan reviu, evaluasi, dan pengembangan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik	BKPPD, Diskominfo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		4.4.11	Melakukan reviu dan evaluasi Layanan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah	Bagian Organisasi, Diskominfo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
		4.4.12	Mengembangkan fitur transaksi, kolaborasi dan integrasi pada Layanan akuntabilitas kinerja	Bagian Organisasi, Diskominfo			<input checked="" type="checkbox"/>	













			instansi Pemerintah Daerah					
4.5.	LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK							
4.5.1	Melakukan monitoring dan evaluasi Layanan pengaduan pelayanan publik	4.5.1.1	Melakukan monitoring dan evaluasi Layanan pengaduan pelayanan publik (laporbup.cilacapkab.go.id)	Bagian Organisasi, Diskominfo,				
4.5.2	Melakukan reviu dan evaluasi Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik	4.5.2.1	Melakukan reviu dan evaluasi Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik (Satu Data Cilacap, PPID Cilacap)	Bappeda, Diskominfo,				
4.5.3	Melakukan monitoring dan evaluasi Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik	4.5.3.1	Melakukan monitoring dan evaluasi Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik (https://jdih.cilacapkab.go.id/)	Bagian Hukum, Diskominfo				
4.5.4	Melakukan monitoring dan evaluasi Layanan Publik Sektor Kesehatan	4.5.4.1	Melakukan monitoring dan evaluasi Layanan Publik Sektor Kesehatan	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RSUD Cilacap				

4.5.5	Melakukan monitoring dan evaluasi Layanan Publik Sektor Perizinan	4.5.5.1	Melakukan monitoring dan evaluasi Layanan Publik Sektor Perizinan	DPMPTSP, Diskominfo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4.5.6	Melakukan monitoring dan evaluasi Layanan Publik Sektoral administrasi kependudukan Berbasis Elektronik	4.5.6.1	Melakukan monitoring dan evaluasi Layanan Publik Sektoral administrasi kependudukan Berbasis Elektronik	Disdukcapil	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
		4.5.6.2	Aplikasi pelayanan Dukcapil	Disdukcapil	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
		4.5.6.3	KTP Digital dari dirjen dukcapil	Disdukcapil	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
4.5.7	Melakukan monitoring dan evaluasi Layanan Berbasis Elektronik Sektor Pendidikan	4.5.7.1	Pendataan layanan sektor pendidikan berbasis elektronik	Dinas P dan K Diskominfo	<input checked="" type="checkbox"/>			
		4.5.7.2	Survey kebutuhan layanan pendidikan berbasis elektronik	Dinas P dan K Diskominfo	<input checked="" type="checkbox"/>			
		4.5.7.3	Reviu dan pengembangan layanan pendidikan berbasis elektronik	Dinas P dan K Diskominfo		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4.5.8	Melakukan monitoring dan evaluasi Layanan	4.5.8.1	Pendataan layanan Berbasis Elektronik Sektor Kesejahteraan Sosial	Dinsos Diskominfo	<input checked="" type="checkbox"/>			

	Berbasis Elektronik Sektor Kesejahteraan Sosial	4.5.8.2	Survey kebutuhan Layanan Berbasis Elektronik Sektor Kesejahteraan Sosial	Dinsos Diskominfo	✓			
		4.5.8.3	Reviu dan pengembangan Layanan Berbasis Elektronik Sektor Kesejahteraan Sosial	Dinsos Diskominfo		✓	✓	✓
4.5.9	Melakukan monitoring dan evaluasi Layanan Berbasis Elektronik Sektor UMKM	4.5.9.1	Pendataan Layanan Berbasis Elektronik Sektor UMKM antara lain : Cilacap Belanja Online Pasarku	DPKUKM, Diskominfo	✓	✓		
		4.5.9.2	Survey kebutuhan Layanan Berbasis Elektronik Sektor UMKM dengan cara melakukan pemantauan keefektifan penggunaan pendataan berbasis elektronik	DPKUKM, Diskominfo	✓	✓	✓	✓
		4.5.9.3	Reviu dan pengembangan Layanan Berbasis Elektronik Sektor UMKM	DPKUKM, Diskominfo		✓	✓	✓
4.5.10	Melakukan monitoring dan evaluasi Layanan Berbasis Elektronik Sektor Kebencanaan	4.5.10.1	Pendataan Layanan Berbasis Elektronik Sektor Kebencanaan (EWS)	BPBD, Diskominfo	✓			
		4.5.10.2	Survey kebutuhan Layanan Berbasis Elektronik Sektor Kebencanaan	BPBD, Diskominfo	✓			

4.5.11	Melakukan monitoring dan evaluasi Layanan Berbasis Elektronik Sektor Ketenagakerjaan	4.5.11.1	Pendataan Layanan Berbasis Elektronik Sektor Ketenagakerjaan ( <a href="https://bursakerja.jatengprov.go.id/">https:// bursakerja.jatengprov.go .id/</a> )	DISNAKERIN, Diskominfo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		4.5.11.2	Survey kebutuhan Layanan Berbasis Elektronik Sektor Ketenagakerjaan	Disnakerin, Diskominfo	<input checked="" type="checkbox"/>			
4.5.12	Melakukan monitoring dan evaluasi Layanan Berbasis Elektronik Sektor Infrastruktur / Pekerjaan Umum	4.5.12.1	Pendataan Layanan Berbasis Elektronik Sektor Infrastruktur / Pekerjaan Umum	DPU-PR, Diskominfo	<input checked="" type="checkbox"/>			
		4.5.12.2	Survey kebutuhan Layanan Berbasis Elektronik Sektor Infrastruktur / Pekerjaan Umum	DPU-PR, Diskominfo	<input checked="" type="checkbox"/>			
		4.5.12.3	Reviu dan pengembangan Layanan Berbasis Elektronik Sektor Infrastruktur / Pekerjaan Umum ( <a href="http://simbaja.cilacapkab.go.id">simbaja.cilacapkab.go.id</a> )	DPUPR, Diskominfo		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

4.5.13	Melakukan monitoring dan evaluasi Layanan Berbasis Elektronik Sektor Perumahan / Permukiman	4.5.13.1	Pendataan Layanan Berbasis Elektronik Sektor Perumahan / Permukiman	Disperkimta, Diskominfo		✓	✓	
		4.5.13.2	Survey kebutuhan Layanan Berbasis Elektronik Sektor Perumahan / Permukiman	Disperkimta, Diskominfo	✓			
		4.5.13.3	Reviu Layanan Berbasis Elektronik Sektor Perumahan / Permukiman	Disperkimta, Diskominfo	✓	✓	✓	✓
4.5.14	Melakukan monitoring dan evaluasi Layanan Berbasis Elektronik Sektor Pariwisata	4.5.14.1	reviu aplikasi android untuk info wisata dan kuliner di cilacap	Disporapar, Diskominfo	✓	✓		
4.5.15	Melakukan monitoring dan evaluasi Layanan Berbasis Elektronik Sektor Perdagangan	4.5.16.1	Evaluasi Sistem Informasi Retribusi Pasar	DPKUKM, Diskominfo	✓			
		4.5.16.2	Optimalisasi Sistem Informasi Retribusi Pasar	DPKUKM, Diskominfo		✓		
5	INFRASTRUKTUR							

5.1	Pengembangan dan pemeliharaan pusat data	5.1.1	Evaluasi dan optimalisasi SOP Pusat Data	Diskominfo				
5.2	Pengembangan dan pemeliharaan Jaringan data dan lokal (WAN)	5.2.1	Evaluasi dan optimalisasi SOP pemeliharaan jaringan lokal	Diskominfo				
5.3	Pengembangan Infrastruktur Jaringan Data Utama termasuk Keamanan	5.3.1	Pemeliharaan jaringan	Diskominfo				

BAB X  
DETAIL RENCANA PROYEK IMPLEMENTASI

Rencana proyek implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap yang disusun selama 4 tahun ke depan. Implementasi SPBE merupakan inisiatif- inisiatif yang diharapkan dapat mencapai kondisi ideal yang sesuai dengan visi dan misi pengembangan SPBE bagi Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Dalam setiap inisiatif SPBE ditentukan nama program, inisiatif strategis, tahun, penanggung jawab, dan rincian kegiatan. Detail inisiatif SPBE Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut :

Program 1.1. Penyusunan Dokumen peta jalan SPBE Kabupaten Cilacap

Kode Program	1.1
Nama Program	Penyusunan Dokumen peta jalan SPBE Kabupaten Cilacap
Inisiatif Strategis	Dokumen peta jalan SPBE
Tahun	2023
Penanggung Jawab	Diskominfo, Bagian Organisasi, Bappeda, Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami kondisi aktual SPBE Kabupaten Cilacap</li> <li>• Merencanakan Target Pembangunan SPBE Kabupaten Cilacap</li> <li>• Menganalisis dan Memahami kesenjangan berdasarkan kondisi aktual dengan target capaian yang akan dicapai</li> <li>• Menyusun peta jalan SPBE Kabupaten Cilacap Tahun 2023 - 2026, Menyusun detail rencana strategis implementasi SPBE Kabupaten Cilacap</li> <li>• Menyusun Kebijakan sebagai landasan hukum penerapan peta jalan SPBE Kabupaten Cilacap</li> </ul>

Program 1.2. Penyusunan Dokumen Arsitektur Proses Bisnis Kabupaten Cilacap

Kode Program	1.2
Nama Program	Penyusunan Dokumen Arsitektur Proses Bisnis Kabupaten Cilacap
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Cilacap
Tahun	2022-2023
Penanggung Jawab	Diskominfo, Bagian Organisasi, Bappeda, Bagian Hukum

Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami konsep dasar Arsitektur Bisnis</li> <li>• Memahami alur kerja Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE</li> <li>• Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram)</li> <li>• Menyusun dokumen arsitektur bisnis berbasis pada notasi yang disepakati seperti BPMN (<i>Business Process Modeling and Notation</i>)</li> <li>• Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi</li> <li>• Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah.</li> </ul>
------------------	--

Program 1.3. Penyusunan Dokumen Arsitektur Layanan Kabupaten cilacap

Kode Program	1.3
Nama Program	Penyusunan Dokumen Arsitektur Layanan Kabupaten Cilacap
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Cilacap
Tahun	2022 - 2023
Penanggung Jawab	Bagian Organisasi dan Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami konsep dasar Arsitektur Layanan</li> <li>• Memahami daftar layanan dan alur kerja dari proses layanan Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE</li> <li>• Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram)</li> <li>• Menyusun Dokumen Arsitektur Layanan Kabupaten Cilacap</li> <li>• Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi</li> <li>• Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah.</li> </ul>

Program 1.4. Penyusunan Dokumen Arsitektur Data Kabupaten Cilacap

Kode Program	1.4
Nama Program	Penyusunan Dokumen Arsitektur Data Kabupaten Cilacap
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Cilacap
Tahun	2022 - 2023
Penanggung Jawab	Bappeda dan Diskominfo

Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami konsep dasar Arsitektur Data</li> <li>• Memahami alur data Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE</li> <li>• Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram)</li> <li>• Menyusun Dokumen Arsitektur Data Kabupaten Cilacap</li> <li>• Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi pada perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia</li> <li>• Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah.</li> </ul>
------------------	--

Program 1.5. Penyusunan Dokumen Arsitektur Aplikasi Kabupaten Cilacap

Kode Program	1.5
Nama Program	Penyusunan Dokumen Arsitektur Aplikasi Kabupaten Cilacap
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Cilacap
Tahun	2022 - 2023
Penanggung Jawab	Diskominfo dan OPD terkait
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami konsep dasar Arsitektur Aplikasi</li> <li>• Memahami alur aplikasi dari proses bisnis Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE</li> <li>• Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram)</li> <li>• Menyusun Dokumen Arsitektur Aplikasi Kabupaten Cilacap</li> <li>• Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi</li> <li>• Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah.</li> </ul>

Program 1.6. Penyusunan Dokumen Arsitektur Infrastruktur Kabupaten Cilacap

Kode Program	1.6
Nama Program	Penyusunan Dokumen Arsitektur Infrastruktur Kabupaten Cilacap
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Cilacap
Tahun	2022 - 2023
Penanggung Jawab	Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami konsep dasar Arsitektur Infrastruktur</li> <li>• Memahami komponen dan topologi infrastruktur Teknologi Informasi (jaringan dan server) Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE</li> <li>• Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram)</li> <li>• Menyusun Dokumen Arsitektur Infrastruktur Kabupaten Cilacap</li> <li>• Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi</li> <li>• Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur</li> </ul>

	dari yang berwenang di Pemerintah Daerah.
--	---

Program 1.7. Penyusunan Dokumen Arsitektur Keamanan Informasi Kabupaten Cilacap

Kode Program	1.7
Nama Program	Penyusunan Dokumen Arsitektur Keamanan Informasi Kabupaten Cilacap
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Cilacap
Tahun	2023 - 2023
Penanggung Jawab	Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami konsep dasar Arsitektur Keamanan Informasi</li> <li>• Memahami komponen, topologi dan proses keamanan informasi Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro , sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE</li> <li>• Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram)</li> <li>• Menyusun dokumen arsitektur keamanan informasi</li> <li>• Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi</li> <li>• Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah.</li> </ul>

Program 1.8. Penguatan dan Optimalisasi Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Cilacap

Kode Program	1.8
Nama Program	Penguatan dan Optimalisasi Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Cilacap
Inisiatif Strategis	Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Cilacap
Tahun	2022-2023
Penanggung Jawab	Diskominfo, Bagian Organisasi, Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menentukan Anggota Tim Koordinasi SPBE</li> <li>• Menentukan Tupoksi Tim</li> <li>• Merumuskan isu-isu strategis terhadap perkembangan SPBE</li> <li>• Membentuk formulasi rekomendasi untuk menjadi perubahan dalam program kerja berikutnya sebagai tindak lanjut</li> </ul>

Program 1.9. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Cilacap

Kode Program	1.9
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Cilacap
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2022-2023
Penanggung Jawab	Diskominfo, Bagian Organisasi, Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Melakukan review kebijakan berdasarkan rekomendasi Kementerian PAN RB</li> <li>•Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, dalam hal ini adalah Tujuan SPBE dan Aparatur yang akan mewujudkan tujuan tersebut</li> <li>•Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik ( Kajian akademis )</li> <li>•Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>•Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>•Melakukan pengesahan kebijakan</li> <li>•Melakukan sosialisasi kebijakan</li> </ul>

Program 1.10. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang alur kerja terintegrasi antar OPD

Kode Program	1.10
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang alur kerja terintegrasi antar OPD
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2022 - 2026
Penanggung Jawab	Bagian Organisasi, Diskominfo dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Melakukan review kebijakan berdasarkan rekomendasi Kementerian PAN RB</li> <li>•Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, dalam hal ini adalah tujuan alur kerja terintegrasi, proses apa saja yang akan diintegrasikan, dan stakeholder yang terlibat</li> <li>•Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik ( Kajian akademis )</li> <li>•Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>•Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>•Melakukan pengesahan kebijakan</li> <li>•Melakukan sosialisasi kebijakan</li> </ul>

Program 1.11. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang peta jalan SPBE

Kode Program	1.11
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang peta jalan SPBE
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2023 - 2026
Penanggung Jawab	Diskominfo dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Melakukan review kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN</li> <li>•Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan rencana induk SPBE, ruang lingkup rencana induk SPBE serta penanggungjawab dan pelaksana rencana induk SPBE</li> <li>•Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis )</li> <li>•Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>•Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>•Melakukan pengesahan kebijakan</li> <li>•Melakukan sosialisasi kebijakan</li> </ul>

Program 1.12. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Perencanaan dan Penganggaran TIK

Kode Program	1.12
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Perencanaan dan Penganggaran TIK
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2022 - 2023
Penanggung Jawab	Bappeda, BPPKAD, Diskominfo, dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Melakukan review kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PANRB</li> <li>•Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, dalam hal ini adalah prinsip-prinsip perencanaan dan penganggaran TIK, analisis risiko investasi TIK serta penanggung jawab pelaksana kebijakan</li> <li>•Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis)</li> <li>•Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>•Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>•Melakukan pengesahan kebijakan</li> <li>•Melakukan sosialisasi kebijakan</li> </ul>

Program 1.13. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Pusat Data

Kode Program	1.13
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Pusat Data
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2022 - 2023
Penanggung Jawab	Diskominfo dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Melakukan review kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PANRB</li> <li>•Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan pusat data, analisis risiko dan keamanan pusat data, standar pusat data yang digunakan, serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan</li> <li>•Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis)</li> <li>•Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>•Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>•Melakukan pengesahan kebijakan</li> <li>•Melakukan sosialisasi kebijakan</li> </ul>

Program 1.14. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang integrasi sistem aplikasi

Kode Program	1.14
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang integrasi sistem aplikasi
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2023 - 2026
Penanggung Jawab	Diskominfo dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Melakukan review kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PANRB</li> <li>•Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan integrasi sistem aplikasi, arsitektur integrasi, tata kelola integrasi sistem aplikasi, serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan</li> <li>•Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis)</li> <li>•Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>•Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>•Melakukan pengesahan kebijakan</li> <li>•Melakukan sosialisasi kebijakan</li> </ul>

Program 1.15. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai

Kode Program	1.15
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang penggunaan aplikasi umum berbagi pakai
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2023- 2026
Penanggung Jawab	Diskominfo, Bagian Organisasi, dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan review kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PANRB</li> <li>• Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan dan ruang lingkup aplikasi umum berbagi pakai, tata kelola dan teknologi pendukung, serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan</li> <li>• Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis)</li> <li>• Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>• Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>• Melakukan pengesahan kebijakan</li> <li>• Melakukan sosialisasi kebijakan</li> </ul>

Program 1.16. Penyusunan Kebijakan tentang Sistem Naskah Dinas Elektronik

Kode Program	1.16
Nama Program	Penyusunan Kebijakan tentang Sistem Naskah Dinas Elektronik
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2023
Penanggung Jawab	Diskominfo, Arpus, Bagian Organisasi, dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan review kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PANRB</li> <li>• Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan disusun, seperti tujuan penggunaan Sistem Naskah Dinas Elektronik, jaminan keamanan dan keabsahan dokumen (<i>Confidentiality, Integrity, dan Availability</i>), tata kelola dan teknologi pendukung serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan</li> <li>• Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis )</li> <li>• Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>• Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Melakukan pengesahan kebijakan</li> <li>•Melakukan sosialisasi kebijakan</li> </ul>
--	---

Program 1.7. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Sistem Manajemen Kepegawaian

Kode Program	1.17
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Sistem manajemen kepegawaian
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2022 - 2026
Penanggung Jawab	BKPPD, Bagian Organisasi, dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Melakukan review kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PANRB</li> <li>•Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti ruang lingkup sistem manajemen kepegawaian (perencanaan dan pengembangan PNS, administrasi kepegawaian, pengawasan pengendalian, dokumen kepegawaian), tata kelola serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan</li> <li>•Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis )</li> <li>•Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>•Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan social</li> <li>•Melakukan pengesahan kebijakan</li> <li>•Melakukan sosialisasi kebijakan</li> </ul>

Program 1.18. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Sistem Layanan Pengaduan Publik

Kode Program	1.18
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang sistem layanan pengaduan publik
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2022 - 2026
Penanggung Jawab	Inspektorat, Diskominfo, Bagian Organisasi, dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Melakukan review kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PANRB</li> <li>•Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan, fungsi dan ruang lingkup pengaduan, hak pengadu dan kewajiban pengelola, sarana pengaduan, pengelola layanan, prosedur penanganan pengaduan, serta pemantauan dan evaluasi pengaduan</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis )</li> <li>•Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>•Melakukan analisis implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>•Melakukan pengesahan kebijakan</li> <li>•Melakukan sosialisasi kebijakan</li> </ul>
--	---

Program 1.19. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Kode Program	1.19
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2022 - 2026
Penanggung Jawab	Bagian Hukum, Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Melakukan review kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PANRB</li> <li>•Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, dalam hal ini fungsi, pengelolaan dan keanggotaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan</li> <li>•Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis)</li> <li>•Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>•Melakukan analisis implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>•Melakukan pengesahan kebijakan</li> <li>•Melakukan sosialisasi kebijakan</li> </ul>

Program 1.20. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Layanan Pengawasan Internal Pemerintah

Kode Program	1.20
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang layanan Pengawasan Internal Pemerintah
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2022 - 2026
Penanggung Jawab	Inspektorat, Diskominfo, dan Bagian Hukum

Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Melakukan review kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PANRB</li> <li>•Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan, ruang lingkup layanan pengawasan internal pemerintah, pengelola dan yang menangani pengaduan, mekanisme pengaduan serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan</li> <li>•Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis )</li> <li>•Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>•Melakukan analisis implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>•Melakukan pengesahan kebijakan</li> <li>•Melakukan sosialisasi kebijakan</li> </ul>
------------------	---

Program 3.11. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang layanan publik pemerintah daerah

Kode Program	3.11
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang layanan publik pemerintah daerah
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2022 - 2026
Penanggung Jawab	Diskominfo, Bagian Organisasi, dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Melakukan review kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PANRB</li> <li>•Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti definisi, asas dan tujuan pelayanan publik, ruang lingkup pelayanan (pengaduan, Open data, JDIH, Kesehatan, Rumah Sakit, Administrasi Kependudukan, Perizinan, Pariwisata, UMKM, Perdagangan, Kebencanaan, Ketenagakerjaan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan dan Transportasi, Pangan dan Perikanan, Kesejahteraan Sosial), standar pelayanan, penyelenggara pelayanan serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan</li> <li>•Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis)</li> <li>•Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>•Melakukan analisis implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>•Melakukan pengesahan kebijakan</li> <li>•Melakukan sosialisasi kebijakan</li> </ul>

Program 3.12. Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan  
Arsitektur SPBE

Kode Program	3.12
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Arsitektur SPBE
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2023-2026
Penanggung Jawab	Diskominfo, Bagian Organisasi, dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Melakukan review kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PANRB</li> <li>•Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat</li> <li>•Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis)</li> <li>•Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>•Melakukan analisis implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>•Melakukan pengesahan kebijakan</li> <li>•Melakukan sosialisasi kebijakan</li> </ul>

Program 3.13. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang  
Manajemen Data

Kode Program	3.13
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Manajemen Data
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2024 - 2026
Penanggung Jawab	Bappeda, Diskominfo, BPS, dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Melakukan review kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PANRB</li> <li>•Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat</li> <li>•Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis)</li> <li>•Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>•Melakukan analisis implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>•Melakukan pengesahan kebijakan</li> <li>•Melakukan sosialisasi kebijakan</li> </ul>

Program 3.14. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Pembangunan Aplikasi SPBE

Kode Program	3.14
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Pembangunan Aplikasi SPBE
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2023 - 2026
Penanggung Jawab	Diskominfo, OPD Terkait, dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Melakukan review kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PANRB</li> <li>•Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat</li> <li>•Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis)</li> <li>•Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>•Melakukan analisis implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>•Melakukan pengesahan kebijakan</li> <li>•Melakukan sosialisasi kebijakan</li> </ul>

Program 3.15. Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pemerintah Kabupaten Cilacap

Kode Program	3.15
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pemerintah Kabupaten Cilacap
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2023 - 2026
Penanggung Jawab	Diskominfo,OPD Terkait, Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Melakukan review kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PANRB</li> <li>•Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat</li> <li>•Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis)</li> <li>•Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>•Melakukan analisis implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>•Melakukan pengesahan kebijakan</li> <li>•Melakukan sosialisasi kebijakan</li> </ul>

Program 3.16. Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Manajemen Keamanan Informasi

Kode Program	3.16
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Manajemen Keamanan Informasi
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2023 - 2026
Penanggung Jawab	Diskominfo, dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Melakukan review kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PANRB</li> <li>•Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat</li> <li>•Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis)</li> <li>•Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>•Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>•Melakukan pengesahan kebijakan</li> <li>•Melakukan sosialisasi kebijakan</li> </ul>

Program 3.17. Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Audit TIK

Kode Program	3.17
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Audit TIK
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2023 - 2026
Penanggung Jawab	Diskominfo, dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Melakukan review kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PANRB</li> <li>•Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat</li> <li>•Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis)</li> <li>•Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>•Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>•Melakukan pengesahan kebijakan</li> <li>•Melakukan sosialisasi kebijakan</li> </ul>

Program 3.18. Penyusunan, Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Risiko

Kode Program	3.18
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Risiko
Inisiatif Strategis	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE
Tahun	2024-2026
Penanggung Jawab	Bagian Organisasi, Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Melakukan identifikasi dan menyusun daftar risiko SPBE</li> <li>•Melakukan asesmen risiko SPBE</li> <li>•Melakukan analisis dan pengendalian risiko SPBE</li> <li>•Menyusun dokumen manajemen risiko SPBE</li> <li>•Melaksanakan proses pengendalian risiko sesuai dengan hasil rekomendasi</li> <li>•Melakukan evaluasi manajemen risiko</li> </ul>

Program 3.19. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Data

Kode Program	3.19
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Data
Inisiatif Strategis	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE
Tahun	2023-2026
Penanggung Jawab	Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Menyusun arsitektur data</li> <li>•Menyusun desain dan model data</li> <li>•Menentukan struktur fisik penyimpanan data dan pengelolaannya</li> <li>•Memastikan keamanan data yang meliputi <i>confidentiality, integrity</i> dan <i>availability</i> data</li> <li>•Menyusun dan menerapkan integrasi dan interoperability data</li> <li>•Melakukan pengelolaan data yang berupa file dan dokumen non elektronik agar dapat diakses dan diintegrasikan dengan data elektronik</li> <li>•Melakukan pengelolaan, menjaga kualitas dan standarisasi data berbagi pakai (data referensi dan master data)</li> <li>•Melakukan pengelolaan <i>data warehouse</i> dan <i>data lake</i> yang digunakan untuk proses analisis data sebagai data laporan dan analisis pendukung pengambilan keputusan</li> <li>•Melakukan pengumpulan, pengkategorian, perawatan, pengintegrasian, pengendalian, dan pengelolaan metadata</li> <li>•Melakukan evaluasi dan monitoring kualitas data</li> </ul>

Program 4.0. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Aset TIK

Kode Program	4.0
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Aset TIK
Inisiatif Strategis	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE
Tahun	2023-2026
Penanggung Jawab	BPPKAD, Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Menyusun perencanaan aset TIK</li> <li>•Melakukan manajemen pengadaan aset TIK</li> <li>•Melakukan manajemen operasional dan perawatan aset TIK</li> <li>•Melakukan monitoring aset ITK</li> <li>•Melakukan manajemen dalam penggantian atau perbaikan aset TIK</li> <li>•Melakukan manajemen pembuangan aset TIK yang sudah tidak terpakai</li> <li>•Membuat sistem informasi manajemen aset TIK</li> </ul>

Program 4.4. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Pengetahuan

Kode Program	4.4
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Pengetahuan
Inisiatif Strategis	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE
Tahun	2023-2026
Penanggung Jawab	BKPPD dan Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber</li> <li>•Menggunakan dan mengeksploitasi informasi yang dikumpulkan untuk merespon kebutuhan pengguna</li> <li>•Mengumpulkan informasi tambahan dan memperkaya dengan lebih banyak wawasan</li> <li>•Berbagi pengetahuan dan wawasan</li> <li>•Menilai informasi dan pengetahuan yang diperlukan agar sesuai dengan strategi organisasi</li> <li>•Membangun pengetahuan ekstra tentang topik-topik penting dan tidak memakai lagi pengetahuan yang sudah usang</li> <li>•Membangun sistem manajemen pengetahuan (<i>Knowledge Management System</i>) dalam bentuk sistem informasi</li> </ul>

Program 4.5. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Perubahan

Kode Program	4.5
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Perubahan
Inisiatif Strategis	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE
Tahun	2023-2026
Penanggung Jawab	Bagian Organisasi
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengidentifikasi hal-hal terkait SPBE yang perlu ditingkatkan</li> <li>• Menyampaikan usulan perubahan kepada pimpinan untuk mendapat persetujuan</li> <li>• Menyusun perencanaan perubahan</li> <li>• Menyiapkan dan menyediakan segala sumber daya dan data untuk mendukung proses perubahan</li> <li>• Melakukan sosialisasi tentang perubahan yang dilakukan</li> <li>• Melakukan pemantauan dan pengelolaan terkait risiko perubahan, resistansi dan dampak dari perubahan</li> <li>• Melakukan evaluasi, revisi dan perbaikan secara terus menerus</li> </ul>

Program 4.6. Pelaksanaan Audit TIK Kabupaten Cilacap

Kode Program	4.6
Nama Program	Pelaksanaan Audit TIK Kabupaten Cilacap
Inisiatif Strategis	Evaluasi Penerapan Kebijakan SPBE
Tahun	2023 - 2026
Penanggung Jawab	Tim Koordinasi SPBE
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menentukan komponen audit TIK (keamanan, aplikasi, infrastruktur dan tata kelola.</li> <li>• Memilih lembaga Audit TIK (BSSN atau lembaga kredibel)</li> <li>• Melakukan audit</li> <li>• Menganalisa hasil audit</li> <li>• Membuat dokumen audit</li> <li>• Melakukan tindakan koreksi</li> <li>• Pelaksanaan audit TIK secara berkala</li> </ul>

Program 6.1. Pembentukan integrasi proses bisnis pelayanan publik Kabupaten Cilacap

Kode Program	6.1
Nama Program	Pembentukan integrasi proses bisnis pelayanan publik (Pengaduan, Open data, JDIH, Kesehatan, Rumah Sakit, Administrasi Kependudukan, Perizinan, Pariwisata, UMKM, Perdagangan, Kebencanaan, Ketenagakerjaan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan dan Transportasi, Pangan dan Perikanan, Kesejahteraan Sosial dan sektor strategis lainnya) Kabupaten Cilacap
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Publik Terintegrasi
Tahun	2023 - 2026

Penanggung Jawab	Diskominfo dan OPD terkait
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Menerapkan arsitektur bisnis pemda yang telah ada, baik makro atau mikro</li> <li>•Membuat aplikasi elektronik untuk setiap bisnis proses atau alur kerja</li> <li>•Membentuk integrasi database atau integrasi aplikasi berbasis <i>web service</i></li> <li>•Membentuk antarmuka satu pintu untuk layanan publik</li> <li>•Melakukan integrasi dan <i>interoperability</i> dengan aplikasi pelayanan publik yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> </ul>

Program 6.2. Pembentukan Portal Pelayanan Publik Kabupaten Cilacap

Kode Program	6.2
Nama Program	Pembentukan portal pelayanan publik Kabupaten Cilacap
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Publik Terintegrasi
Tahun	2024
Penanggung Jawab	Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Membentuk integrasi proses bisnis untuk layanan publik, baik secara kluster atau menyeluruh</li> <li>•Membentuk integrasi database atau integrasi aplikasi berbasis <i>web service</i></li> <li>•Membentuk antarmuka satu pintu untuk layanan publik</li> </ul>

Program 7.2. Pengembangan Integrasi Kepegawaian

Kode Program	7.2
Nama Program	Pengembangan Integrasi Kepegawaian
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
Tahun	2023-2026
Penanggung Jawab	BKPPD, Bagian Organisasi, dan Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Menerapkan arsitektur bisnis pemda yang telah dibuat, baik makro atau mikro</li> <li>•Menginventaris seluruh layanan kepegawaian yang ada</li> <li>•Memastikan kesiapan aplikasi dari setiap layanan</li> <li>•Menggunakan sistem penghubung layanan jika aplikasi masih terpisah pisah</li> <li>•Mengintegrasikan dengan aplikasi BKN dan aplikasi lain di luar kepegawaian</li> <li>•Lalu membuat satu pintu masuk layanan kepegawaian baik via web atau mobile</li> <li>•Melakukan integrasi dan <i>interoperability</i> dengan sistem kepegawaian yang dimiliki Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> </ul>

Program 7.4. Pengembangan integrasi Pengaduan Publik

Kode Program	7.4
Nama Program	Pengembangan integrasi Pengaduan Publik
Inisiatif Strategis	Portal Pengaduan Publik Terintegrasi
Tahun	2022-2025
Penanggung Jawab	Bagian Organisasi, Inspektorat, dan Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menentukan single contact pengguna dalam (nomor telepon dan aplikasi)</li> <li>• Mengintegrasikan sistem OPD yang masuk dalam pengaduan (Kerusakan jalan, kekerasan, harga pangan, dan sebagainya)</li> <li>• Membuat sistem penyaringan pengaduan dan mengarahkan ke fungsi OPD yang sesuai</li> <li>• Melakukan pencatatan (<i>log</i>)</li> <li>• Memonitor waktu respon</li> <li>• <i>Tracking</i> penyelesaian pengaduan</li> <li>• Eskalasi pengaduan dengan kriteria</li> <li>• Evaluasi pengaduan secara berkala</li> <li>• Melakukan integrasi dan <i>interoperability</i> dengan sistem Pengaduan Publik milik Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> </ul>

Program 7.5. Pembentukan portal pelayanan administrasi pemerintahan

Kode Program	7.5
Nama Program	Pembentukan portal pelayanan administrasi pemerintahan
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
Tahun	2023-2026
Penanggung Jawab	Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan proses bisnis layanan pemerintahan sudah terintegrasi</li> <li>• Memastikan layanan pemerintah sudah terintegrasi secara aplikasi atau sudah berbasis elektronik, pada suatu lingkup tertentu</li> <li>• Membuat antarmuka satu pintu portal yang dapat diakses pengguna baik dalam format web atau mobile</li> <li>• Menerapkan SSO (<i>Single Sign On</i>) pada portal yang ada</li> <li>• Melakukan integrasi dan <i>interoperability</i> dengan sistem pelayanan administrasi pemerintahan Provinsi dan Pusat</li> </ul>

Program 8.1. Pembentukan manajemen layanan yang merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE supaya berkesinambungan dan berkualitas

(Dokumen SOP Layanan)

Kode Program	8.1
Nama Program	Pembentukan manajemen layanan yang merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE supaya berkesinambungan dan berkualitas (Dokumen SOP Layanan)
Inisiatif Strategis	Penyelenggaraan Manajemen Layanan
Tahun	2022
Penanggung Jawab	Bagian Organisasi dan OPD Terkait
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat dokumen siklus layanan SPBE (Strategi, Pengembangan, Operasional dan Evaluasi)</li> <li>• Membuat SOP disetiap siklusnya dengan RACI (<i>Responsible, Accountable, Consult, Inform</i>) bagi personel yang mengampunya</li> <li>• Monitor dan evaluasi kinerja dan pencapaian SLA dari penyedia jasa pihak ketiga secara berkala</li> </ul>

Program 8.2. Pembentukan portal pusat layanan internal

Kode Program	8.2
Nama Program	Pembentukan portal pusat layanan internal
Inisiatif Strategis	Penyelenggaraan Manajemen Layanan
Tahun	2023-2024
Penanggung Jawab	Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun perencanaan dan membangun portal pusat layanan internal yang terdiri dari layanan pengguna (keluhan/masalah, permintaan/perubahan layanan), layanan infrastruktur (memastikan operasional layanan berjalan (perbaikan/kerusakan) dan layanan pengembangan aplikasi baru</li> <li>• Mendidik SDM yang memahami konsep IT Service Management ( ITSM )</li> <li>• Membuat SLA layanan</li> <li>• Menerapkan sistem <i>Service Desk</i> dengan prinsip <i>Single Point of Contact</i></li> <li>• Melakukan evaluasi berkala terhadap keluhan dan masalah yang ada</li> <li>• Melakukan perbaikan layanan dan pemenuhan SLA</li> </ul>

Program 9.1. Pengembangan pusat data dengan standar Tier 1

Kode Program	9.1
Nama Program	Penyediaan pusat data dengan standar tier 1
Inisiatif Strategis	Penyediaan Pusat Data (Data center tier 1 memiliki peralatan dan komponen IT yang hanya dioperasikan oleh 1 jalur distribusi dan 1 uplink per server)
Tahun	2026
Penanggung Jawab	Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Melakukan asesmen <i>data center</i> untuk mengukur tingkat kelayakan data center berbasis tier 1</li> <li>•Menganalisa tindakan koreksi dari asesmen</li> <li>•Menyiapkan anggaran untuk program perbaikan</li> <li>•Perbaikan dari aspek fisik gedung, perangkat hardware, SOP dan SDM</li> </ul>

Program 10.1. Membentuk jaringan interkoneksi tertutup antar OPD

Kode Program	10.1
Nama Program	Membentuk jaringan interkoneksi tertutup antar OPD
Inisiatif Strategis	Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun	2023 - 2026
Penanggung Jawab	Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Melakukan kajian integrasi infrastruktur daerah, untuk menentukan teknologi yang tepat (FO, Metro, VPN atau Wireless)</li> <li>•Membentuk DED integrasi infrastruktur</li> <li>•Memastikan anggaran implementasi</li> <li>•Implementasi integrasi infrastruktur berbasis kajian dan DED yang ada</li> <li>•Pemeliharaan infrastruktur jaringan</li> <li>•Penyediaan fasilitas backup jaringan</li> <li>•Penyusunan SPM/SLA dan SOP Pelayanan Jaringan</li> <li>•Evaluasi Kinerja dan Audit Log Jaringan</li> <li>•Penerapan VPN (<i>Virtual Private Network</i>) untuk akses jaringan secara <i>remote</i></li> </ul>

Program 11.1. Membentuk sistem penghubung layanan pemerintah

Kode Program	11.1
Nama Program	Membentuk sistem penghubung layanan pemerintah
Inisiatif Strategis	Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
Tahun	2023-2026
Penanggung Jawab	Diskominfo dan OPD Terkait

Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk sistem <i>data warehouse</i> (Infrastruktur server dan <i>database</i>)</li> <li>• Memastikan kebijakan integrasi dipahami</li> <li>• Memastikan teknologi dan open aplikasi pada OPD yang akan diintegrasikan</li> <li>• Melakukan instalasi dan konfigurasi WEB-API untuk mengambil <i>output</i> data dari setiap sistem yang akan dihubungkan.</li> <li>• Meletakkan data yang diambil ke dalam <i>data warehouse</i></li> </ul>
------------------	---

Program 12.1. Penyediaan bandwidth yang memadai untuk tiap OPD dan koneksi internet di masyarakat

Kode Program	12.1
Nama Program	Penyediaan <i>bandwidth</i> yang memadai untuk tiap OPD dan koneksi internet di masyarakat
Inisiatif Strategis	Penyediaan akses berkualitas terhadap layanan SPBE di Kabupaten Cilacap
Tahun	2023-2026
Penanggung Jawab	Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisa kebutuhan <i>bandwidth</i> per OPD</li> <li>• Melakukan penambahan kapasitas <i>bandwidth</i> jika diperlukan</li> <li>• Melakukan QoS (Quality of Services), untuk mengatur kebutuhan <i>bandwidth</i></li> <li>• Memastikan sumber internet OPD terpusat melalui Diskominfo</li> <li>• Pemantauan jaringan internet dan intranet dengan NMS (<i>Network Monitoring System</i>)</li> <li>• Penyediaan fasilitas <i>backup</i> jaringan internet</li> </ul>

Program 13.1. Penyediaan layanan *Cloud* untuk Kabupaten Cilacap

Kode Program	13.1
Nama Program	Penyediaan layanan <i>Cloud</i> untuk Kabupaten Cilacap
Inisiatif Strategis	Pengembangan layanan berbasis teknologi berbagi pakai
Tahun	2025-2026
Penanggung Jawab	Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk <i>data center</i> yang berbasis virtualisasi</li> <li>• Menetapkan jenis layanan <i>cloud</i> yang akan disediakan (IAAS, PAAS, SAAS)</li> <li>• Memilih teknologi <i>cloud</i> yang akan digunakan</li> <li>• Mensosialisasi adanya cloud lokal</li> <li>• Penyusunan SPM/SLA dan SOP Pelayanan Server</li> <li>• Evaluasi Kinerja dan Audit Log Server</li> <li>• Penyediaan fasilitas <i>backup</i> server dengan <i>auto-backup realtime</i> dan <i>co-location</i></li> <li>• Penyediaan File Server dengan NAS (<i>Network Attached Storage</i>) untuk OPD</li> </ul>

Program 14.1. Pembentukan Portal Data Kabupaten Cilacap

Kode Program	14.1
Nama Program	Pembentukan Portal Data Kabupaten Cilacap
Inisiatif Strategis	Pembangunan Portal Data Daerah
Tahun	2023-2026
Penanggung Jawab	Diskominfo dan Bappeda
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menentukan sumber data</li> <li>• Menentukan struktur data</li> <li>• Menentukan metadata</li> <li>• Menerapkan <i>Data Security</i></li> <li>• Membangun Aplikasi Sistem Portal Data</li> <li>• Pembentukan proses manajemen data berbasis DMBOK (Data Management Body of Knowledge) dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data</li> <li>• Penyusunan SPM/SLA dan SOP Layanan Pengelolaan Data</li> <li>• Pelaksanaan Bimtek Pengelolaan Data untuk OPD</li> <li>• Implementasi sistem Manajemen <i>Backup</i> Data secara terpusat</li> <li>• Melakukan integrasi dan <i>interoperability</i> dengan portal data Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> </ul>

Program 15.1. Pembentukan Manajemen Keamanan Informasi

Kode Program	15.1
Nama Program	Pembentukan Manajemen Keamanan Informasi (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan)
Inisiatif Strategis	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah
Tahun	2023-2026
Penanggung Jawab	Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan asesmen keamanan berbasis INDEKS KAMI</li> <li>• Menemukan gap analysis untuk tindakan koreksi yang harus dilakukan.</li> <li>• Penerapan kendali dan protokol keamanan informasi sistem informasi</li> <li>• Menyusun kebijakan, standar dan SOP untuk identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan dan evaluasi Keamanan Informasi</li> <li>• Menyusun SPM/SLA dan SOP Pelayanan Keamanan Informasi</li> <li>• Peningkatan kompetensi SDM TIK tentang Keamanan Informasi</li> <li>• Pembentukan CSIRT (<i>Computer Security Incident Response Team</i>)</li> <li>• Penyusunan dokumen <i>Cyber Security Incident Response Plan</i></li> <li>• Pendampingan dan pemberian saran mengenai hukum dan legalitas</li> </ul>

Program 15.2. Penggunaan Teknologi Keamanan Informasi untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (non repudiation) sumber daya terkait data dan informasi

Kode Program	15.2
Nama Program	Penggunaan Teknologi Keamanan Informasi untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan ( <i>non repudiation</i> ) sumber daya terkait data dan informasi
Inisiatif Strategis	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah
Tahun	2023-2026
Penanggung Jawab	Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerapkan <i>Defense In Depth</i></li> <li>• Menerapkan teknologi perimeter ( Firewall, IDS, IPS )</li> <li>• Menerapkan QoS (<i>Quality of Service</i>) untuk pengaturan <i>bandwidth</i></li> <li>• Menerapkan <i>Update Patch</i> secara regular pada PC dan Server</li> <li>• Menerapkan Enkripsi Data</li> <li>• Menerapkan <i>Secure Programming</i> untuk aplikasi</li> <li>• Melakukan Pentest secara berkala</li> <li>• Penyusunan SOP Pengembangan dan Pengujian Sistem Informasi yang aman</li> <li>• Peningkatan kompetensi SDM TIK tentang <i>Secure Programming</i></li> <li>• Penerapan sistem SIEM (<i>Security Information and Event Management</i>)</li> <li>• Penambahan IDS (<i>Intrusion Detection System</i>) / IPS (<i>Intrusion Prevention System</i>)</li> <li>• Penerapan <i>Honeynet</i> dan DMZ (<i>Demilitarized Zone</i>)</li> <li>• Pengadaan perangkat lunak open source atau yang berlisensi</li> </ul>

Program 15.3. Membangun budaya keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi ASN dan masyarakat

Kode Program	15.3
Nama Program	Membangun budaya keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi ASN dan masyarakat
Inisiatif Strategis	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah
Tahun	2023-2026
Penanggung Jawab	Diskominfo

Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat Kebijakan Keamanan Informasi</li> <li>• Melakukan sosialisasi kebijakan</li> <li>• Menurunkan kebijakan dalam SOP harian</li> <li>• Monitor dan Evaluasi SOP</li> <li>• Memasukan SOP sebagai penilaian kinerja</li> <li>• Sosialisasi dan peningkatan kesadaran bagi seluruh OPD tentang keamanan informasi</li> </ul>
------------------	--

Program 17.1. Pelatihan dan sosialisasi tentang SPBE

Kode Program	17.1
Nama Program	Pelatihan dan sosialisasi tentang SPBE
Inisiatif Strategis	Promosi Literasi SPBE
Tahun	2023-2026
Penanggung Jawab	BKPPD, Diskominfo dan OPD terkait
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memilih lembaga pelatihan yang kompeten</li> <li>• Menyusun topik materi sosialisasi SPBE</li> <li>• Menyusun metode sosialisasi yang berkesinambungan</li> <li>• Melakukan sosialisasi</li> <li>• Melakukan evaluasi</li> </ul>

Program 18.1. Pembentukan Standar Kompetensi Teknis SPBE

Kode Program	18.1
Nama Program	Pembentukan Standar Kompetensi Teknis SPBE
Inisiatif Strategis	Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE
Tahun	2023-2026
Penanggung Jawab	Diskominfo dan BKPPD
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami Tugas Pokok Fungsi dari penyelenggara SPBE</li> <li>• Mengambil acuan/referensi Kompetensi TIK yang ada (SKKNI atau sumber lainnya yang diakui oleh Pemerintah Indonesia )</li> <li>• Menentukan <i>Job Role</i> dalam penyelenggaraan SPBE</li> <li>• Menentukan kompetensi untuk <i>Job Role</i> Penyelenggara SPBE</li> <li>• Menetapkan standar kompetensi sebagai acuan penerimaan dan kinerja penyelenggara SPBE</li> </ul>

Program 18.2. Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Penyelenggara SPBE

Kode Program	18.2
Nama Program	Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Penyelenggara SPBE
Inisiatif Strategis	Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE
Tahun	2023-2026
Penanggung Jawab	BKPPD dan Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menentukan dan menambah jumlah formasi jabatan fungsional</li> <li>• Melakukan penerimaan pegawai yang sesuai</li> </ul>

Program 18.3. Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Lingkup SPBE

Kode Program	18.3
Nama Program	Pelatihan dan sertifikasi kompetensi lingkup SPBE
Inisiatif Strategis	Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE
Tahun	2023-2026
Penanggung Jawab	BKPPD dan Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengambil referensi dari standar kompetensi SDM yang ada</li> <li>• Kerjasama dengan akademisi melalui PKL dan Magang</li> <li>• Memilih lembaga pelatihan dengan label LSP (lembaga sertifikasi profesi BNSP)</li> <li>• Menentukan Pelatihan yang sesuai untuk ASN penyelenggara SPBE</li> <li>• Melakukan uji sertifikasi nasional</li> </ul>

Program 19.1. Pembentukan Forum Kolaborasi SPBE

Kode Program	19.1
Nama Program	Pembentukan Forum Kolaborasi SPBE
Inisiatif Strategis	Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara pemerintah dan non pemerintah
Tahun	2023-2026
Penanggung Jawab	Tim Koordinasi SPBE
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menentukan komponen Forum (Universitas, Komunitas, Wakil masyarakat, ASN /OPD, Pelaku Usaha)</li> <li>▪ Menentukan Agenda dan Topik dalam setiap diskusi dengan tujuan tertentu</li> <li>▪ Membahas isu isu strategis terhadap perkembangan SPBE dalam <i>output</i> pada layanan publik terpadu dan layanan Administrasi pemerintahan terpadu</li> <li>▪ Membentuk formulasi rekomendasi untuk menjadi perubahan dalam program kerja berikutnya sebagai tindak lanjut</li> </ul>

## BAB XI PENUTUP

Dokumen peta jalan SPBE Kabupaten Cilacap Tahun 2023 – 2026 memuat analisis kondisi saat ini terkait tata kelola TIK, aplikasi, infrastruktur, dan kondisi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Cilacap.

Selanjutnya ditetapkan kondisi ideal dan target untuk pengembangan SPBE Kabupaten Cilacap sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Target pengembangan SPBE tersebut berisi berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE Kabupaten Cilacap, serta diuraikan dalam tahapan rencana strategis, deskripsi inisiatif strategis, dan rencana strategis.

Tahapan rencana strategis pengembangan SPBE di Kabupaten Cilacap meliputi tahapan pembangunan pondasi SPBE dan tahapan pengembangan SPBE.

Pembangunan SPBE di Kabupaten Cilacap meliputi pengembangan tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi serta pengembangan sumber daya manusia.

Penentuan waktu untuk tahapan pengembangan SPBE digambarkan dalam bentuk *roadmap* yang memetakan tahap pengembangan dalam aspek tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan sumber daya manusia. Setiap tahapan diterjemahkan menjadi rencana proyek implementasi yang berisikan rincian nama program kegiatan, kegiatan operasional, tahun pelaksanaan, penanggung jawab kegiatan.

Dokumen peta jalan SPBE Kabupaten Cilacap ini bukanlah suatu dokumen yang statis, namun merupakan dokumen dinamis dan fleksibel. Dokumen peta jalan SPBE Kabupaten Cilacap harus senantiasa dikaji dan diselaraskan kembali seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasi Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Disamping itu Dokumen peta jalan SPBE Kabupaten Cilacap juga harus terintegrasi dalam Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Cilacap 5 (lima) tahunan (RPJMD), sehingga Dokumen peta jalan SPBE merupakan bagian dari dokumen RPJMD Kabupaten Cilacap yang juga ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pj. BUPATI CILACAP,

Cap&ttd

MOHAMAD ARIEF IRWANTO